

BAB III
GAMBARAN UMUM
KABUPATEN / KOTA DI KAWASAN PANTURA
JAWA BARAT

3.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

3.1.1 Satuan Morfologi Dataran Pantai Utara

Bentang alam ini menempati bagian utara Jawa Barat, membentang luas di sekitar Cirebon hingga Bekasi dengan ketinggian rata-rata kurang dari 40 meter di atas muka laut (aml) dan kemiringan lereng kurang dari 5°.

Sungai yang mengalir di daerah ini umumnya berair sepanjang tahun dan terlihat bermeander dengan bentuk U, sehingga erosi sungai ke arah lateral lebih dominan dibandingkan erosi vertikalnya. Material lepas pembentuk morfologi ini umumnya berasal dari batuan lebih tua di selatannya yang berupa endapan kipas aluvial, maupun endapan aluvium di daerah bantaran banjir beberapa sungai besar yang bermuara di daerah ini.

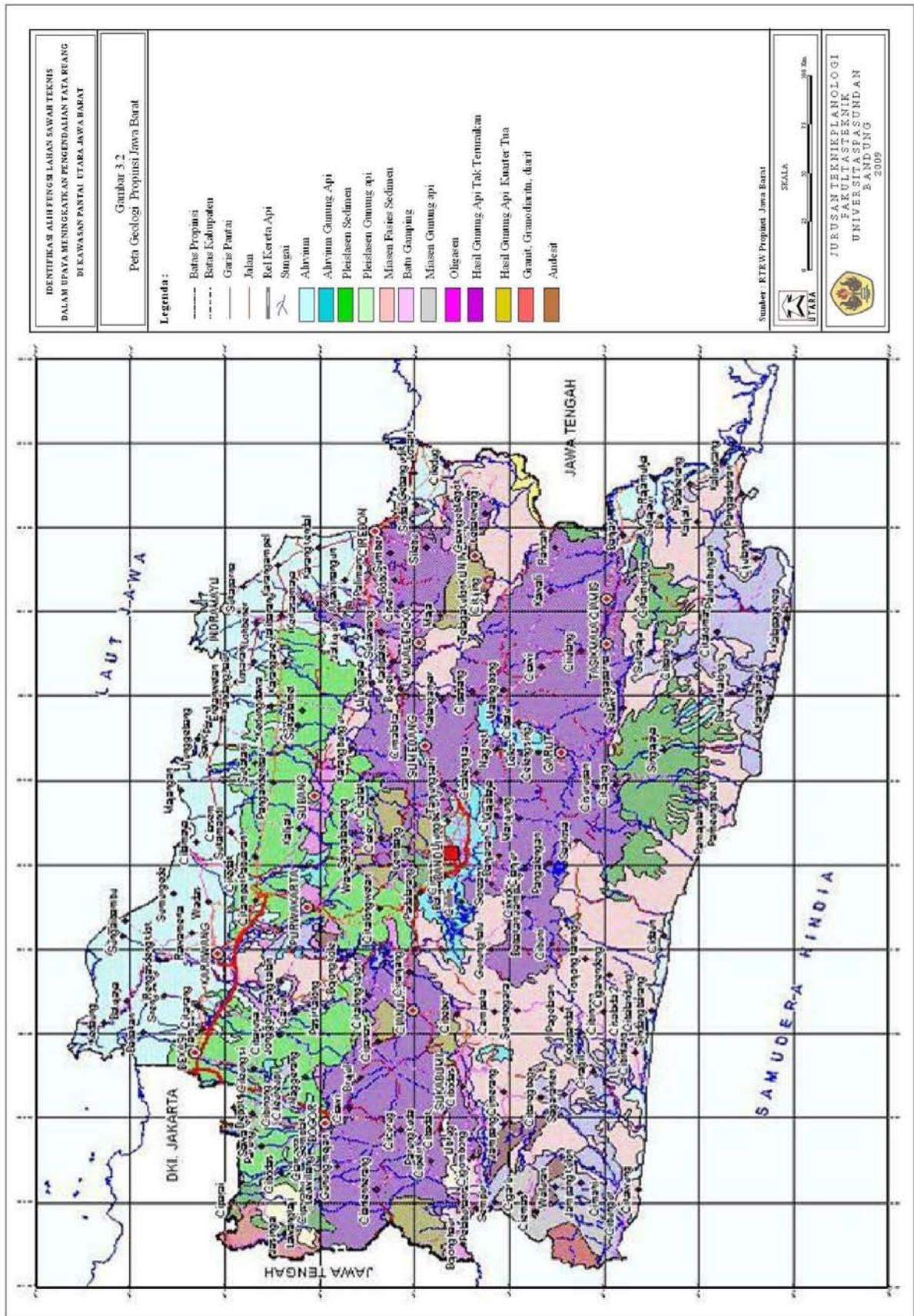
3.1.2 Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng di Kawasan Pantai Utara secara keseluruhan berkisar antara 0- 3 % dan yang lainnya berkisar 4 – 15 % yang menyebar di Kabupaten Cirebon dan Subang, sedangkan kemiringan lereng yang mencapai >40 % berada di Kabupaten Cirebon (Kecamatan Palimanan). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**

3.1.3 Geologi

Kondisi Geologi di Kawasan Pantura didominasi oleh alluvium, alluvium gunung api dan prasedimen akses gunung api sebagian besar dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan alluvium vulkanik. Lapisan-lapisan lempung terutama dijumpai di beberapa bagian, juga lapisan-lapisan tipis pasir dan serpih pada kedalaman yang lebih besar yang terletak di Kabupaten Subang Bagian Selatan, Kabupaten Indramayu Bagian Selatan dan Kabupaten Cirebon. Kawasan Pantura didominasi oleh persawahan menempati hampir seluruh dataran pantai yang didukung oleh jaringan irigasi teknis permanen. Areal ini merupakan daerah penghasil beras utama bagi Propinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 3.2.**





3.1.4 Sebaran batuan Kawasan Pantura

Daerah relatif datar di Kawasan Pantura di bentuk oleh berbagai jenis batuan sedimen lepas hingga kurang padu yang berumur Kuartar, yang merupakan endapan sungai, pantai dan aluvium. Endapan sungai terdiri dari material lepas berukuran lempung, lanau dan pasir, setempat dijumpai kerakal, sedangkan endapan pantai merupakan material lepas berasal dari rombakan batuan lebih tua yang berukuran lempung dan pasir ; kedua jenis endapan sedimen ini terbentuk saat sekarang atau Kuartar Muda. Satuan batuan lain yang berumur Kuartar Tua dan umumnya bersifat setengah padu (semi consolidated sediments) adalah endapan kipas aluvium yang sebagian besar terdiri dari batu pasir tufaan, batu lempung pasiran, dan tufa pasiran, setempat bersifat kerikilan.

3.1.5 Daerah Aliran Sungai Kawasan Pantura

Dikawasan pantura mempunyai banyak aliran sungai besar yang ada diantaranya adalah : Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, dan Sungai Cisanggarung. Sungai-sungai utama antara lain tersebar di Kabupaten Bekasi Sungai Bekasi/Kali Bekasi, Kabupaten Karawang: Sungai Citamaya, Kabupaten Subang: Sungai Ciasem, Sungai Cipunagara, Kabupaten Indramayu: Sungai Cilalanang, Sungai Cimanuk, Kabupaten Cirebon terdapat Sungai Ciwaringin, Sungai Cisanggarung, Kali Bondet dan Bangkaderes. Sungai-sungai tersebut di atas termasuk dalam 3 Satuan Wilayah Sungai (SWS) Citarum, Cimanuk dan Cisanggarung.

3.1.6 Sumberdaya Air Permukaan Kawasan Pantura

Air permukaan adalah air sungai, rawa dan juga danau/waduk. Sungai utama yang ada di pantai utara Jawa Barat adalah Sungai Citarum, Sungai Cimanuk dan Sungai Cisanggarung yang dimanfaatkan untuk pertanian dan untuk keperluan sehari-hari penduduk yang tinggal di sepanjang alur sungai. Daerah rawa yang ada di pantai Jawa Barat bagian utara dari Kabupaten Bekasi sampai Cirebon masing-masing adalah Kabupaten Bekasi daerah rawa ada di Muara Gembong, Kabupaten Karawang ada di daerah Pakisjaya, Karangjati (hilir Sungai Cijalu), Kabupaten Subang ada di hilir Sungai Ciasem dan hilir Sungai Cipunagara.

3.2 Kebijakan Tata Ruang Propinsi Jawa Barat

Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat 2010 telah memberi arahan terhadap pengembangan kawasan Pantura Jawa Barat, yang dapat dilihat dalam berbagai komponen rencana, antara lain rencana pengembangan infrastruktur wilayah, rencana pengembangan kawasan andalan, dan rencana pengembangan kawasan budidaya lahan basah, dan rencana daya dukung dan daya tampung lingkungan

3.2.1 Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah yang akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan kawasan pantura terutama adalah prasarana sumber daya air dan irigasi, yang terkait dengan tujuan untuk :

1. Mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau;
2. Meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka swasembada pangan.

Rencana pengembangan prasarana sumber daya air dan irigasi di Jawa Barat adalah:

1. Mengembangkan waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka penyediaan air baku serta konservasi sumber air.
2. Mengembangkan jaringan irigasi yang diprioritaskan di wilayah utara dan selatan Jawa Barat.

Dalam hal ini yang terkait langsung dengan Kawasan Pantura adalah perlunya rehabilitasi jaringan irigasi yang diprioritaskan pada daerah irigasi di wilayah utara Jawa Barat, karena mempunyai nilai produktivitas yang tinggi.

3.2.2 Kebijakan Pengembangan Kawasan Andalan

Pengembangan kawasan andalan bertujuan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah sesuai dengan kegiatan utamanya melalui penyediaan prasarana wilayah. Dalam konteks Jawa Barat, rencana pengembangan kawasan andalan adalah menetapkan 8 (delapan) kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut maupun kawasan sekitarnya. Sasaran dari rencana pengembangan kawasan andalan

berkembangnya kegiatan-kegiatan yang menjadi unggulan di setiap kawasan andalan.

Secara umum pengertian kawasan andalan adalah kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Penentuan kawasan andalan didasarkan pada potensi yang ada, memiliki aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta pertimbangan perkembangan daerah sekitarnya. Dalam kawasan andalan dihasilkan sektor-sektor unggulan berdasarkan potensi sumberdaya alam kawasan tersebut. Kawasan andalan di Jawa Barat adalah : Bodebek, Bopuncur, Sukabumi, Ciayumajakuning, Cekungan Bandung, Priangan Timur, Pangandaran dan Purwasuka.

Tiga kawasan andalan yang terkait dengan kawasan pantura Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Bogor – Depok – Bekasi (Bodebek)

Kawasan ini diarahkan untuk unggul dalam bidang industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, sumber daya manusia yang mempunyai keterkaitan dengan sumber daya lokal berdaya saing, berorientasi ekspor dan ramah lingkungan.

2. Cirebon–Indramayu–Majalengka–Kuningan (Ciayumajakuning)

Kawasan ini diarahkan untuk menjadi kawasan agribisnis yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan dengan meningkatkan fungsi pelabuhan.

3. Purwakarta – Subang – Karawang (Purwasuka)

Kawasan ini diarahkan untuk menjadi kawasan yang unggul dalam industri pengolahan, pariwisata, perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat, peternakan, dan bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor.

3.2.3 Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya Lahan Sawah

Pengembangan kawasan budidaya lahan sawah bertujuan menjamin ketersediaan produksi beras untuk swasembada beras Jawa Barat. Rencana pengembangan kawasan budidaya lahan sawah adalah :

1. Mempertahankan fungsi lahan di kawasan pertanian lahan basah, terutama lahan sawah beririgasi teknis.
2. Meningkatkan produktivitas lahan sawah melalui upaya intensifikasi.
3. Mengembangkan infrastruktur sumberdaya air untuk menjamin ketersediaan air dan jaringan irigasi.

Sasaran pengembangan kawasan budidaya lahan sawah adalah:

1. Tidak adanya alih fungsi lahan sawah.
2. Meningkatnya produktivitas lahan sawah.
3. Terjaminnya ketersediaan air dan jaringan irigasi.

3.2.4 Kebijakan RTRW Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 Terhadap Lahan Sawah Teknis di Kawasan Pantura

Dalam RTRWP Jawa Barat upaya pentahapan pengembangan lahan sawah tidak dilakukan, namun yang dilakukan adalah upaya mempertahankan keberadaan lahan sawah yang memiliki jaringan irigasi dan jaminan ketersediaan air irigasi. Luas lahan sawah yang dipertahankan sampai tahun 2010 tersebut adalah sebesar 766.218,57 Ha. Dengan demikian dalam RTRW Propinsi Jawa Barat, telah di rencanakan suatu program yang berkaitan dengan pengendalian dan mempertahankan lahan sawah, terutama yang beririgasi teknis, program yang akan dilakukan adalah:

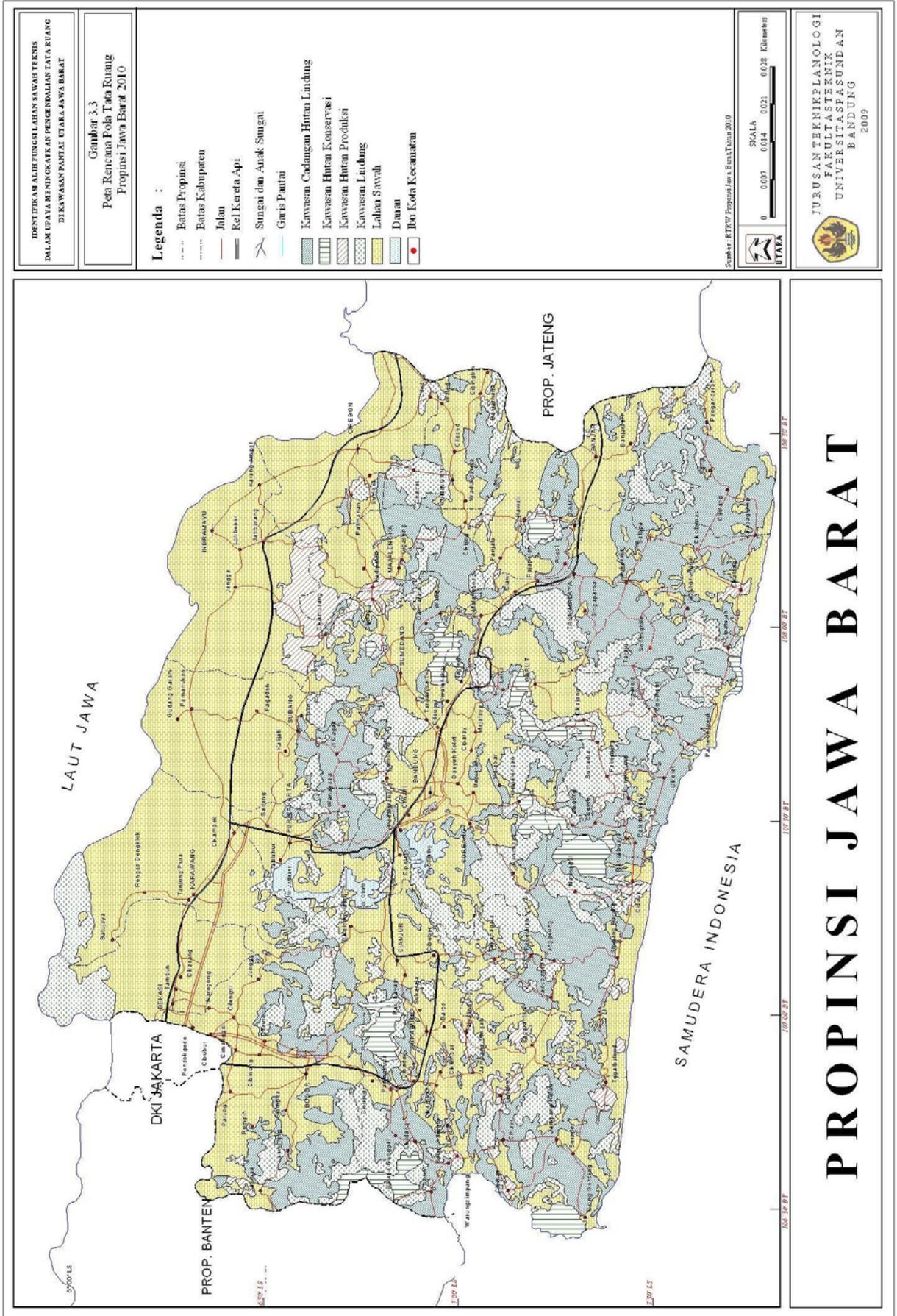
1. Penguohan kawasan pertanian lahan basah khususnya lahan sawah beririgasi teknis.
2. Peningkatan pelayanan infrastruktur pertanian untuk mempertahankan keberadaan fungsi lahan sawah beririgasi teknis.
3. Mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

Adapun program-program tersebut dijabarkan melalui kegiatan- kegiatan di bawah ini:

1. Melakukan kegiatan pemetaan sawah beririgasi teknis dan penetapan lahan sawah beririgasi teknis terutama di kawasan pantura yang dilihat dari kecenderungan penurunan yang terjadi dan dianggap sangat mengawatirkan.
2. Melakukan peningkatan jaringan irigasi, baik pada irigasi primer, sekunder dan tersier, termasuk irigasi desa, kegiatan tersebut dilakukan di seluruh Jawa Barat dalam rangka melakukan penyeimbangan infrastruktur di setiap kabupaten terutama dalam pengendalian lahan sawah teknis. Untuk melihat lebih jelas program- program dalam mempertahankan sawah dapat dilihat pada gambar 3.3

3.2.5 Kebijakan Tata Ruang Kabupaten dan Kota di Kawasan Pantura

Kebijakan Tata Ruang Kabupaten dan Kota di Kawasan Pantura lebih difokuskan pada rencana pemanfaatan ruang kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari enam kabupaten/kota di Kawasan Pantura.



lindung maupun kawasan budidaya. Secara rinci rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Penggunaan lainnya yang meliputi pelabuhan, pergudangan/terminal peti kemas, perkantoran, perdagangan dan jasa campuran, KPI, pertanian, hutan bakau, hutan campuran, pariwisata, pembangkit listrik tenaga gas uap, untuk lebih jelas rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1
Rencana Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Bekasi 2003 – 2012

NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (ha)	(%)
1.	Permukiman	13.918,00	13,60
2.	Pengembangan Permukiman	14.051,00	13,73
3.	Pertanian Lahan Basah	50.409,00	49,25
4.	Pertanian Lahan kering	3.332,00	3,26
5.	Tanaman Tahunan	4.533,00	4,43
6.	Kawasan Industri	3.589,00	3,51
7.	Lahan Peruntukan Industri	2.964,00	2,90
8.	Industri Eksisting	5.059,00	4,94
9.	Pariwisata	137,00	0,13
10.	Rawa/Situ	85,00	0,08
11.	Jalur Hijau	880,00	0,86
12.	Kawasan Rawan Bencana	15,00	0,01
13.	Sempadan Sungai 100 m	1.120,00	1,09
14.	Sempadan Sungai 50 m	841,00	0,82
15.	Sempadan Sungai 10-15 m	485,00	0,47
16.	Kawasan Lainnya (Pendidikan, Lahan Komersial, TPU)	942,00	0,92
	Jumlah	102.360,00	100
17.	Kawasan Khusus Pantura	25.028,00	
	Jumlah Total	127.388,00	100

Sumber : RTRW Kabupaten Bekasi 2003-2013

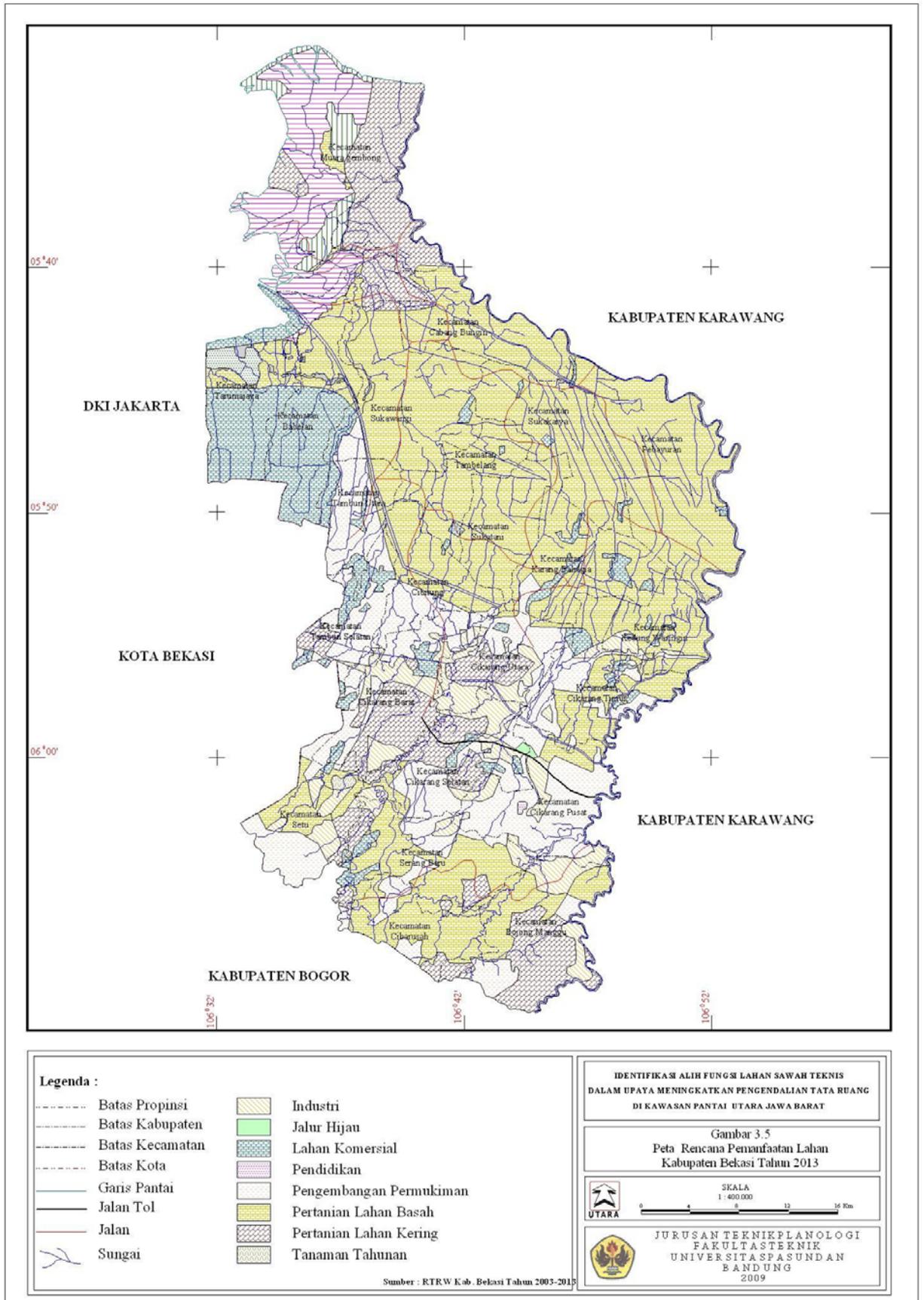
Dalam rencana pemanfaatan ruang Kabupaten Bekasi tahun 2003-2012, akan dilakukan pengembangan lahan permukiman sebesar 14.051 Ha atau sekitar 13,73 %, sedangkan lahan basah atau lahan sawah baik itu sawah beririgasi teknis, setengah teknis, dan tadah hujan luas yang direncanakan sebesar 50.409 Ha (49,25%).

Dengan demikian Kabupaten Bekasi akan mempertahankan luas lahan sawah baik itu sawah beririgasi teknis, setengah teknis dan sawah tadah hujan, selain dari itu Kabupaten Bekasi akan mengarahkan perkembangan kawasan industri maupun perumahan , sehingga perkembangan kawasan industri dan perumahan tidak menggunakan lahan sawah terutama lahan sawah beririgasi teknis.

Dengan luas wilayah 25.028 Ha, Kawasan Pantura Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam 6 (enam) Kawasan Pengembangan (KP) dengan Pusat Kawasan Pengembangan ditetapkan Kecamatan Tarumajaya (Desa Segaramakmur). Rencana guna lahan kawasan terbesar adalah :

- Perumahan = 6.880 Ha
- Perikanan = 658 Ha
- Industri = 1.265 Ha

Untuk lebih jelasnya rencana pemanfaatan lahan Kabupaten Bekasi dan rencana pemanfaatan lahan di Kawasan Pantura Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada **Gambar 3.4 dan Gambar 3.5.**



Dalam RTRW Kabupaten Karawang 2010 (Revisi RTRW 1991-2000) diarahkan rencana pemanfaatan ruang kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya Pertanian, dan Kawasan Budidaya Non-Pertanian. Secara keseluruhan, pengembangan kawasan lindung hanya mencakup 2,30 % dari luas wilayah, sementara kawasan budidaya pertanian 75,43 % dan kawasan budidaya non-pertanian 22,27 %.

Dalam pengembangan kawasan budidaya pertanian, kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah) merupakan jenis pemanfaatan ruang yang paling dominan, yakni seluas 110.325 Ha atau 62,93 % dari luas wilayah. Pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah ini pada dasarnya didukung oleh prasarana pengairan/irigasi : SI Tarum Utara Cabang Barat, SI Tarum Utara Cabang Timur, SI Tarum Barat, Irigasi Cibeet, Irigasi Barugbug dan Pucang, dan Irigasi Sederhana di Kecamatan Pangkalan.

Ditinjau dari lokasinya, pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah ini diarahkan terutama pada wilayah di bagian utara jalan tol / jalan arteri, membentuk hamparan kawasan yang meliputi kecamatan : Karawang, Rawamerta, Kutawaluya, Rengasdengklok, Pedes, Cibuaya, Batujaya, Tirtajaya, Pakisjaya, Klari, Telagasari, Tempuran, Lemahabang, Tirtamulya, Jatisari, Cilamaya, Telukjambe, dan sebagian Pangkalan. Karena dukungan prasarana irigasi yang ada, maka peralihan fungsi lahan dari yang direncanakan dalam RTRW ini harus dibatasi.

Keseimbangan struktur perekonomian sektor industri dan pertanian dari sektor perkotaan ke pedesaan berdasarkan skenario pertumbuhan perekonomian Kabupaten Karawang diperkirakan juga akan berdampak terhadap terjadinya perubahan struktur spasial wilayah Kabupaten Karawang. Kondisi ini didasarkan pada asumsi bahwa kegiatan ekonomi dan sosial akan berimplikasi terhadap kebutuhan ruang. Untuk lebih jelas luasan dan persentase tiap jenis pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Karawang dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2
Rencana Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Karawang Tahun 2000 - 2010

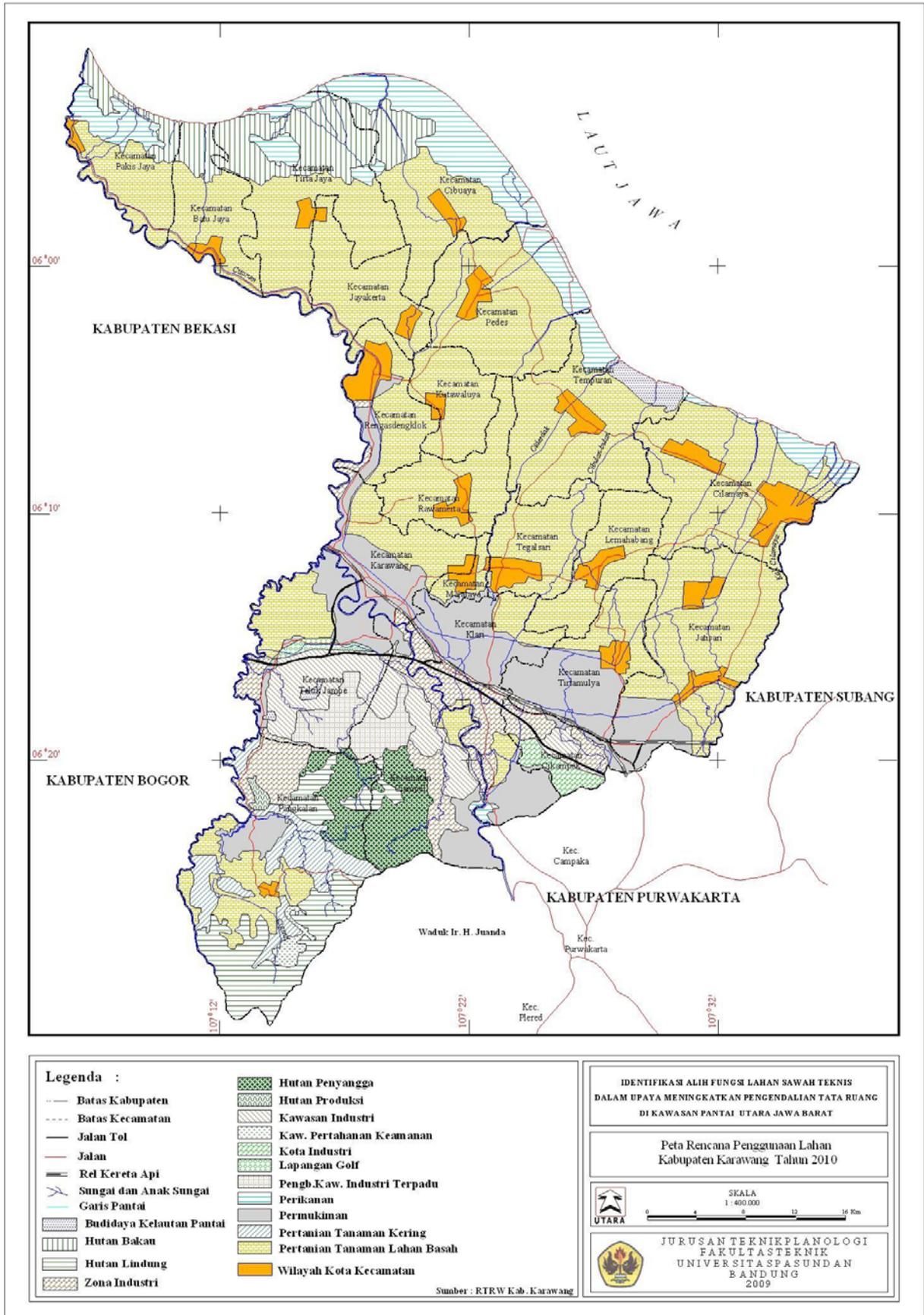
NO.	KAWASAN/PEMANFAATAN RUANG	LUAS (HA)	(%)
1.	Kawasan Lindung	4.042	2,30
	Hutan Lindung	2.364	1,34
	Hutan Bakau	1.696	0,96
2.	Kawasan Budidaya Pertanian	132.248	75,43
	Hutan Produksi	2.411	1,37
	Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering	4.992	2,85
	Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah	110.325	62,93
	Perikanan (Tambak)	14.520	8,28
3.	Kawasan Budidaya Non Pertanian	39.037	22,27
	Permukiman Perkotaan	17.764	10,13
	Wilayah Kota Kecamatan	7.295	4,16
	Kawasan Industri	6.597	3,77
	Zona Industri	6.597	3,77
	Lapangan Golf	556	0,32
	Total Daratan	175.327	100,00
	Wilayah Laut Kewenangan	55.560	

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Karawang 2000-2010

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dalam penataan ruang di Kabupaten Karawang tersebut didasarkan pada pokok – pokok kebijakan sebagai berikut :

1. Pusat Pengembangan Industri
 - a) Pemantapan zona dan kawasan industri yang sudah ada
 - b) Pengembangan jalur – jalur koridor / industri, jalur hijau (green belt) sekitar jalan raya dan jalan Tol (Cikampek – Jakarta dan sekitarnya secara terbatas
2. Pusat Pengembangan Pertanian
 - a) Pemeliharaan sarana irigasi untuk menjamin kelangsungan produksi tanaman pangan dan perikanan

Untuk Lebih jelasnya Rencana Pemanfaatan lahan Kabupaten Karawang dapat dilihat pada **Gambar 3.6.**



Dalam RTRW Kabupaten Subang 2002-2012 diarahkan rencana pemanfaatan ruang kabupaten yang secara garis besar meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Secara keseluruhan, pengembangan kawasan lindung mencakup 10,46 % dari luas wilayah, sementara kawasan budidaya 89,54 %. Secara rinci luasan dan persentase tian jenis pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Subang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Dalam rencana pemanfaatan ruang kawasan budidaya, pengembangan kawasan budidaya pertanian lahan basah mencakup luasan yang paling besar, yakni 93.392,53 Ha atau 45,52 % dari luas wilayah. Luasnya kawasan lahan basah ini pada dasarnya sesuai dengan potensinya selama ini sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat. Ditinjau dari lokasinya, pengembangan kawasan pertanian padi sawah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi diarahkan pada kecamatan-kecamatan: Pamanukan, Blanakan, Pagaden, Cipunagara, Compreng, Binong, Ciasem, Patokbeusi, Cikaum, dan Pusakanagara.

Tabel 3.3
Rencana Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Subang 2012

NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	(%)
1.	Kawasan Lindung		
1.1	Hutan Lindung	10.654,66	5,19
1.2	Hutan Bakau	2.622,14	1,28
1.3	Sempadan Sungai	3.150,00	1,54
1.4	Sempadan Pantai	533,00	0,26
1.5	Rawan Bencana	4.495,00	2,19
	Jumlah	21.454,80	10,46
2.	Kawasan Budidaya		
2.1	Lahan Basah	93.392,53	45,52
2.2	Lahan Kering	35.454,28	17,18
2.3	Tanaman Tahunan/Perkebunan	14.669,73	7,16
2.4	Peternakan	1.450	0,71
2.5	Perikanan	1.981,70	0,97
2.6	Hutan Produksi	8.609,95	4,64
2.7	Industri (Zona/Kawasan dan non zona/kawasan)	12.625,00	6,15
2.8	Permukiman	15.508,00	7,56
	Jumlah	183.721,20	89,54
	LUAS TOTAL	205.176,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Subang 2002-2012

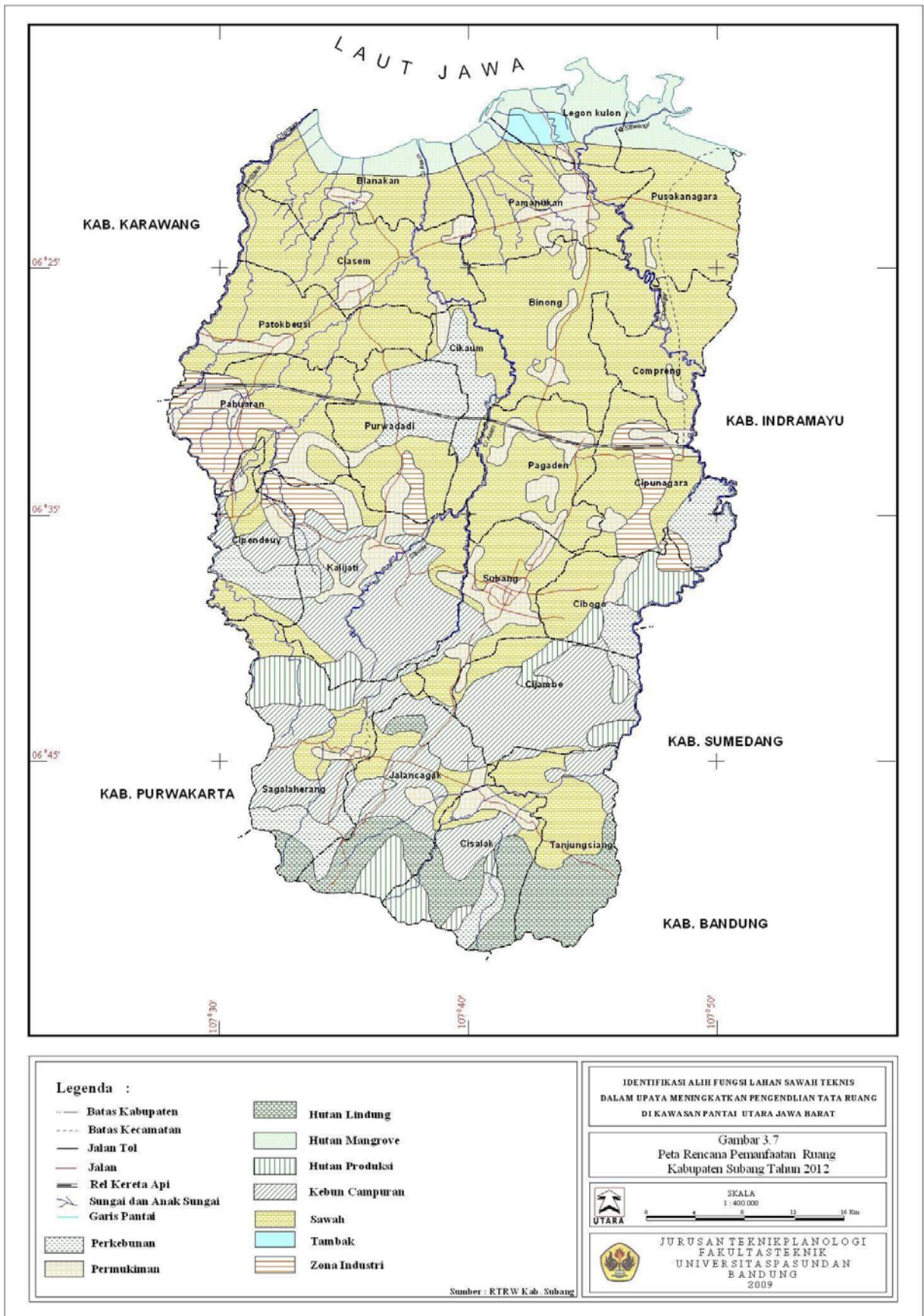
Sehubungan dengan keterkaitan ekosistem persawahan pesisir di utara Kabupaten Subang, maka arahan pengembangan kawasan lahan basah adalah :

- ⇒ Mempertahankan kondisi yang ada dengan memperhatikan pengelolaan persawahan agar tidak mengganggu wilayah sekitarnya, seperti pengaturan sistem irigasi, serta meminimalisasi konflik penggunaan air
- ⇒ Mempertahankan dan mengoptimalkan fungsi lahan sawah dengan mengendalikan alih fungsi lahan untuk aktivitas lainnya
- ⇒ Menjaga sistem persawahan secara terpadu dengan mengatur penggunaan bahan pestisida dan kimia yang dapat mengakibatkan pencemaran di perairan wilayah pesisir

Kebijakan pengembangan kawasan pertanian lahan basah / padi sawah di kabupaten Bekasi adalah :

- ⇒ Mempertahankan luas areal pertanian khususnya sawah irigasi teknis, yang diperlukan sebagai dukungan terhadap kebijakan swasembada pangan Jawa Barat.
- ⇒ Intensifikasi kegiatan persawahan melalui peningkatan mekanisme dan sistem pertanian
- ⇒ Ekstensifikasi areal persawahan, yaitu meningkatkan produktivitas lahan tidur, baik melalui pompanisasi maupun pembuatan cekdam/bendungan baru
- ⇒ Pengembangan prasarana pengairan untuk mendukung pengembangan tanaman padi sawah
- ⇒ Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang relatif subur
- ⇒ Penyelesaian tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya pada suatu kawasan/lokasi
- ⇒ Usaha penanggulangan banjir pada lahan potensi pengembangan lahan basah
- ⇒ Meningkatkan dukungan pengembangan usaha bagi petani baik menyangkut keterampilan, modal, dan pemasaran.

Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.7**.



pengembangan kawasan lindung hanya mencakup 5,63 % dari luas wilayah, sementara kawasan budidaya pertanian 70,45 % dan kawasan budidaya non-pertanian 23,93 %. Secara rinci luasan dan persentase tiap jenis pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Indramayu dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4
Rencana Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Indramayu 2004

No.	JENIS PEMANFAATAN	LUAS (HA)	%
KAWASAN LINDUNG			
1.	Sempadan Pantai	1.167,5	0,58
2.	Sempadan Sungai	9.505,0	4,75
3.	Sempadan Waduk/Danau/Situ	110,0	0,05
4.	Hutan Bakau	475,0	0,24
Jumlah		11.257,5	5,63
KAWASAN BUDIDAYA PERTANIAN			
1.	Hutan Produksi	13.500,0	6,75
2.	Tanaman Pangan Lahan Basah (Sawah)	118.513,0	59,23
3.	Perkebunan	2.850,0	1,42
4.	Perikanan Darat/Tambak	6.100,0	3,05
Jumlah		140.963,0	70,45
KAWASAN BUDIDAYA NON-PERTANIAN			
1.	Permukiman	43.223,5	21,60
2.	Kawasan Industri Terbatas	1.000,0	0,50
3.	Zona Pengembangan Industri	3.500,0	1,75
4.	Peruntukan Lahan Industri	155,0	0,08
Jumlah		47.878,5	23,93
TOTAL		200.099,0	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Indramayu 1994-2004

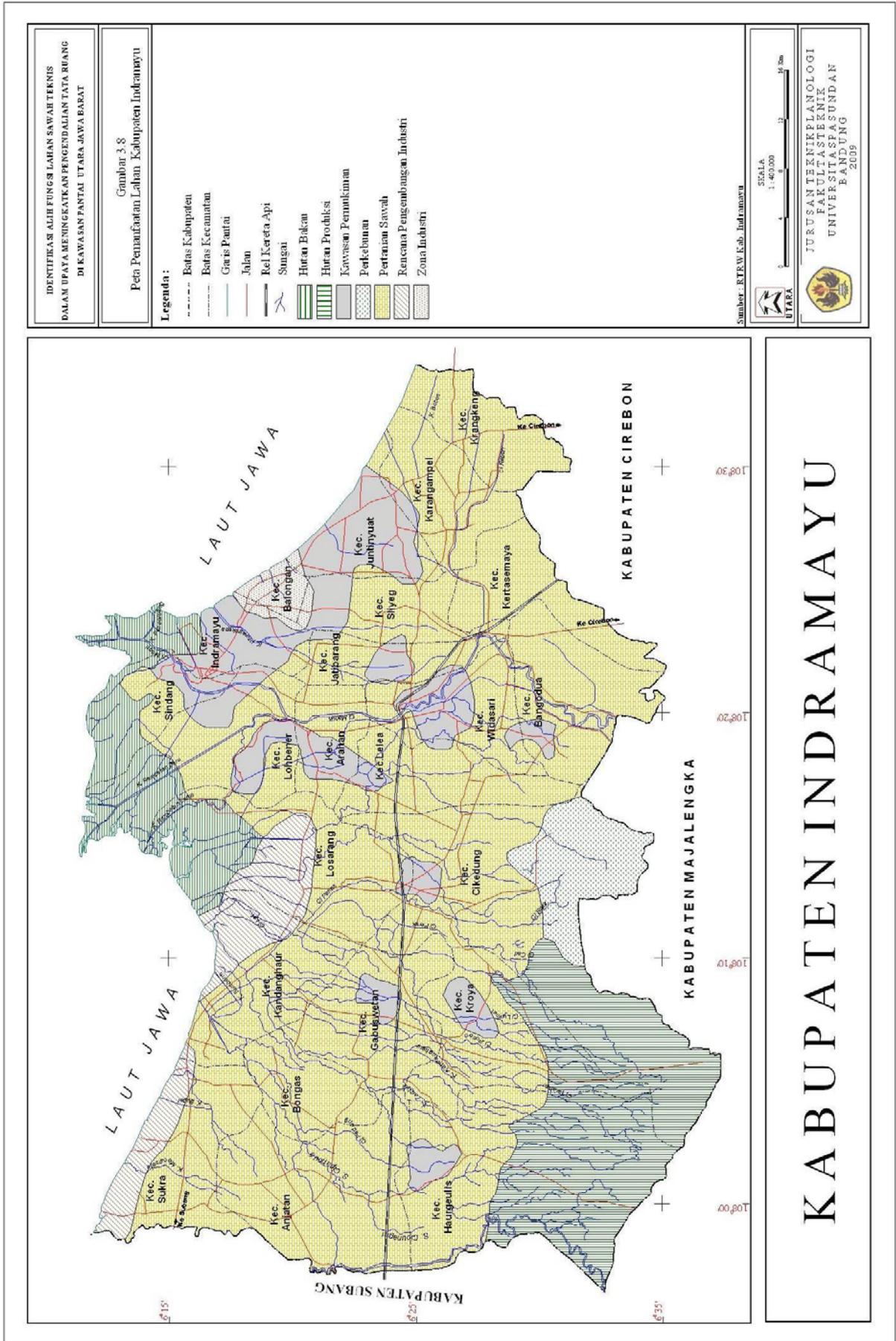
Dalam pengembangan kawasan budidaya pertanian, kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah) merupakan jenis pemanfaatan ruang yang paling dominan, yakni seluas 118.513 Ha atau 59,23 % dari luas wilayah. Hal ini didasarkan pada potensi wilayah kabupaten Indramayu sebagai lumbung padi utama di Jawa Barat.

Mengingat peranannya ini, keberadaan areal sawah yang ada diarahkan untuk tetap dipertahankan, khususnya areal sawah yang telah memiliki irigasi teknis. Ditinjau dari lokasinya, pengembangan kawasan pertanian padi sawah secara intensifikasi dan ekstensifikasi akan diarahkan di kecamatan Indramayu, Balongan, Jintinyuat, Krangkeng, Karangampel, Sliyeg, Jatibarang, Lohbener, Losarang, Lelea, Wodasari, Bangodua, Kandanghaur, Gabuswetan, Sukra, Bongas, dan Anjatan.

Kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan yang dilakukan adalah :

- ⇒ Mempertahankan luas areal pertanian yang ada, yaitu 118.513 Ha, khususnya areal sawah yang telah memiliki irigasi teknis dan areal sawah kering yang bakal mendapat pasokan air dari waduk Jatigede
- ⇒ Perluasan areal persawahan, yaitu meningkatkan produktivitas lahan tidur, baik melalui pompanisasi maupun pembuatan cekdam bendungan baru
- ⇒ Pengembangan prasarana pengairan untuk mendukung pengembangan tanaman padi sawah
- ⇒ Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang relatif subur

Untuk Lebih Jelas Dapat dilihat pada **Gambar 3.8.**



Dalam RTRW Kabupaten Cirebon diarahkan rencana pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Secara keseluruhan, pengembangan kawasan lindung hanya mencakup 30 % dari luas wilayah, sementara kawasan budidaya 70 %.

Ditinjau dari lokasinya, pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan di kecamatan-kecamatan : Gegesik, Susukan, Arajawinangun, Kapetakan, Cirebon Utara, Weru, Cirebon Barat, Plumbon, Sumber, Astanajapura, Karangsembung, Babakan, dan Losari. Untuk Lebih Jelas Dapat dilihat pada tabel 3.5 dan gambar 3.9.

Tabel 3.5
Rencana Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Cirebon Tahun 2013

NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	%
1.	Kawasan Lindung	29.711	30
	Kawasan Lindung Mutlak	12.088	
	Kawasan Lindung Sementara	17.623	
	• Sempadan Pantai	540,00	
	• Sekitar Mata Air	704	
	• Sempadan Sungai	4.200	
	• Hutan Rakyat (Pertanian Lahan Kering)	12.179	
2.	Kawasan Budidaya	69.325	70
	Pertanian	50.000	
	• Padi/Sawah	40.000	
	• Tebu dan Tambak	10.000	
	Non Pertanian	19.325	
	• Lahan Terbangun	18.647	
	• Lahan Tidak Terbangun	678	
	JUMLAH	99.036	100

Sumber : RTRW Kabupaten Cirebon

F. Kebijakan Tata Ruang Kota Cirebon

Dalam RTRW Kota Cirebon 2001-2010 diarahkan rencana struktur ruang kota yang membagi habis wilayah kota menjadi 9 (sembilan) zona, yaitu : (1) Zona Pemerintahan; (2) Zona Pusat Bisnis; (3) Zona Pelabuhan; (4) Zona Pendidikan OR, Rekreasi; (5) Zona Pelayanan Kesehatan; (6) Zona Keraton; (7) Zona Industri; (8) Zona Permukiman; (9) Zona Agrobisnis.

Dari rencana struktur ini jelas bahwa di wilayah Kota Cirebon tidak diarahkan lagi adanya kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah. Zona IX pada dasarnya lebih diarahkan pada pengembangan agrobisnis, bukan pada

pengembangan padi sawah. Pada rencana tata ruang terdahulu pun (RIK/RUTRK 1984-2004) tidak ada arahan pengembangan kawasan pertanian lahan basah secara eksplisit. Untuk lebih jelasnya luas dan persentase pemanfaatan ruang di Kota Cirebon dapat dilihat pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6
Rencana Pemanfaatan Ruang
Kota Cirebon Tahun 2004

No.	GUNA LAHAN	LUAS (HA)	%
1.	Perumahan	1.211,62	20,94
2.	Pendidikan	158,44	2,74
3.	Kesehatan	41,73	0,72
4.	Peribadatan	21,07	0,36
5.	Rekreasi/Hiburan	3,40	0,06
6.	Olah Raga/Daerah Terbuka	61,63	1,06
7.	Kuburan	326,03	5,64
8.	Pelabuhan/Pergudangan	476,20	8,23
9.	Industri	351,22	6,03
10.	Perdagangan	204,63	3,54
11.	Jasa	84,97	1,47
12.	Perkantoran	118,87	1,47
13.	Wisata Pantai/Keraton	60,00	1,04
14.	Jalur Hijau	420,00	7,26
15.	Konservasi	307,64	5,32
16.	Transportasi	1.154,25	19,95
17.	Mix Farming	784,00	14,17
	JUMLAH	5.785,70	100,00

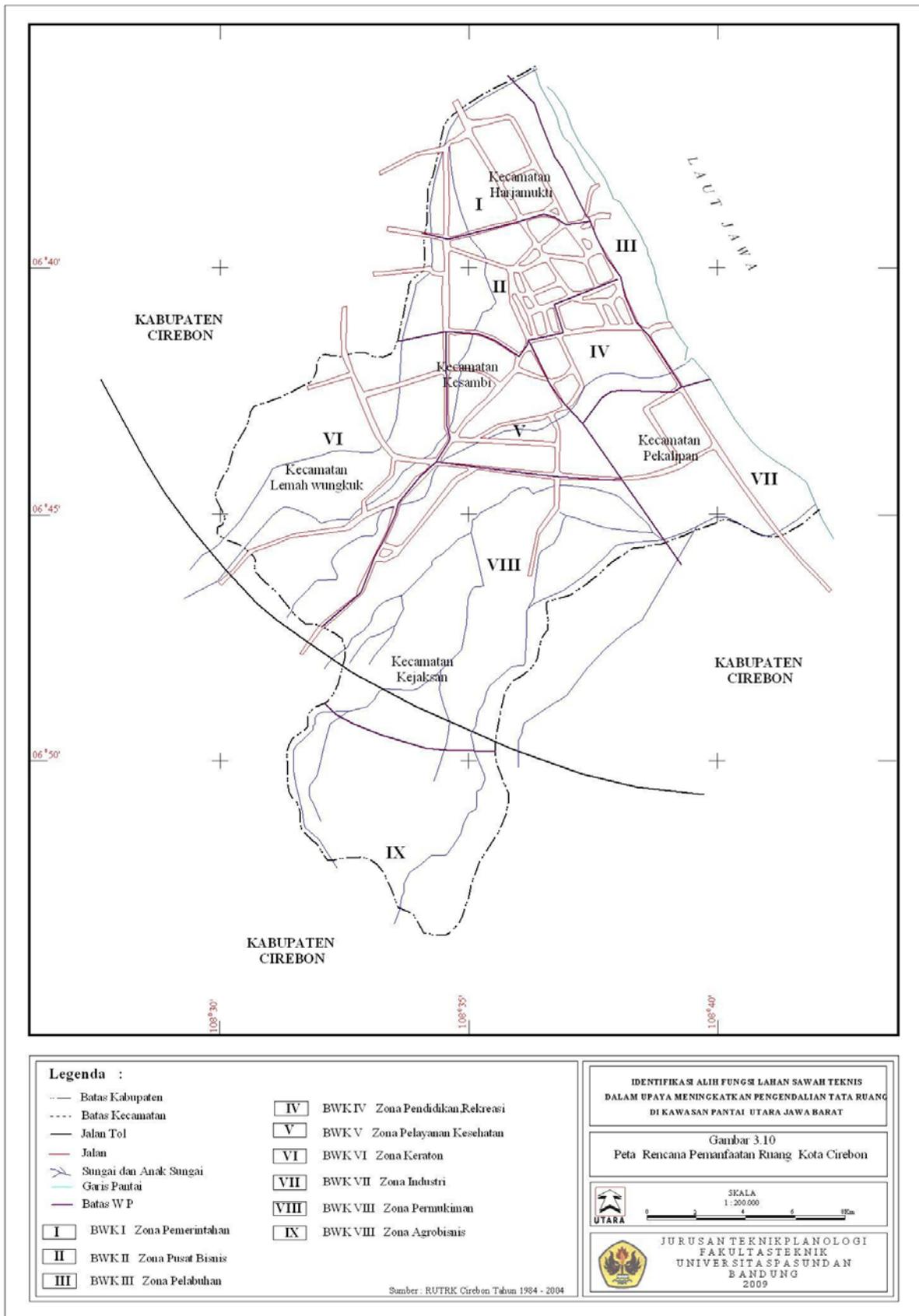
Sumber : RUTRK/RIK Cirebon 1984-2004

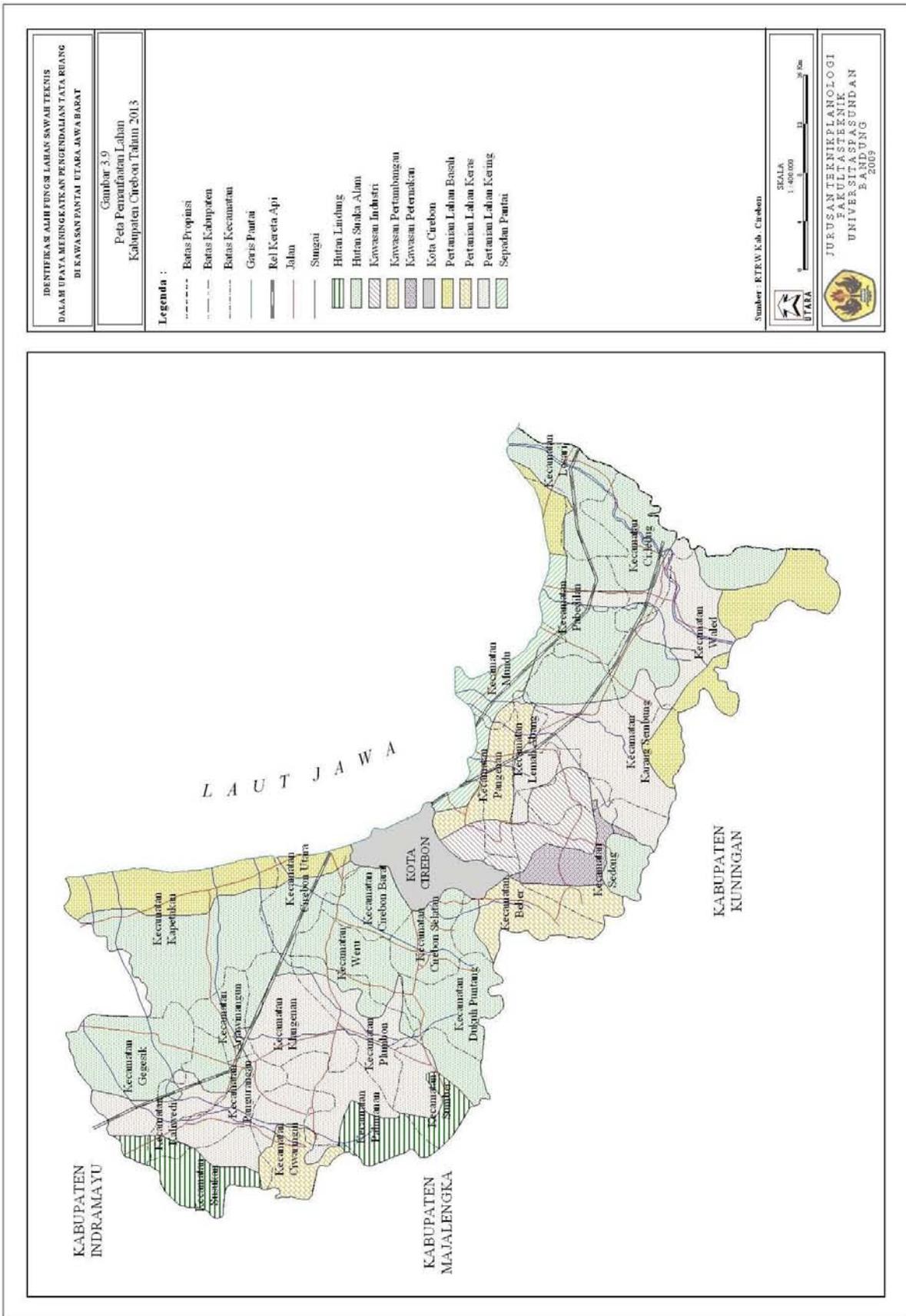
Dari kebijakan – kebijakan yang ada dari masing – masing Kabupaten dan kota di kawasan Pantura, maka dapat dilihat bahwa Kawasan Pantura dikonsentrasikan pada rencana pemanfaatan ruang kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat Matriks kebijakan pada **Tabel 3.7**. Untuk Lebih Jelas Dapat dilihat pada **Gambar 3.10**.

Tabel 3.7
Matriks Kebijakan

Kebijakan Propinsi Jawa Barat

		Kebijakan Pengembangan Kawasan Andalan		
Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Lahan Sawah	Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek)	Cirebon Indramayu, Majalengka, Kuningan (Ciyumajakuning)	Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka)
		<p>3. Mengembangkan waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka penyediaan air baku serta konservasi sumber air.</p> <p>4. Mengembangkan jaringan irigasi yang diprioritaskan di wilayah utara dan selatan Jawa Barat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan fungsi lahan di kawasan pertanian lahan basah, terutama lahan sawah beririgasi teknis. • Meningkatkan produktivitas lahan sawah melalui upaya intensifikasi. • Mengembangkan infrastruktur sumberdaya air untuk menjamin ketersediaan air dan jaringan irigasi. 	<p>Kawasan ini diarahkan untuk mempertahankan sektor industri, perdagangan dan jasa, berorientasi ekspor dan ramah lingkungan</p>
Kebijakan Tata Ruang Kabupaten dan Kota di Kawasan Pantura				
Kab. Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan sektor-sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa serta pertanian. 			
Kab. Karawang	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pusat pengembangan industri • Sebagai pusat pengembangan pertanian 			
Kab. Subang	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan luas areal pertanian khususnya sawah irigasi teknis, yang diperlukan sebagai dukungan terhadap kebijaksanaan swasembada pangan Jawa Barat. • Intensifikasi kegiatan persawahan melalui peningkatan mekanisme dan sistem pertanian • Ekstensifikasi areal persawahan, yaitu meningkatkan produktivitas lahan tidur, baik melalui pompanisasi maupun pembuatan cekdam/bendungan baru • Pengembangan prasarana pengairan untuk mendukung pengembangan tanaman padi sawah • Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang relatif subur • Penyelesaian tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya pada suatu kawasan/lokasi • Usaha penanggulangan banjir pada lahan potensi pengembangan lahan basah • Meningkatkan dukungan pengembangan usaha bagi petani baik menyangkut keterampilan, modal, dan pemasaran. 			
Kab. Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan luas areal pertanian yang ada, yaitu 118.513 Ha, khususnya areal sawah yang telah memiliki irigasi teknis dan areal sawah kering yang bakal mendapat pasokan air dari waduk Jatigede • Perluasan areal persawahan, yaitu meningkatkan produktivitas lahan tidur, baik melalui pompanisasi maupun pembuatan cekdam bendungan baru • Pengembangan prasarana pengairan untuk mendukung pengembangan tanaman padi sawah • Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang relatif subur 			
Kab. Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan dan meningkatkan produktifitas pertanian dengan tidak mengurangi areal pertanian sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) • Pengendalian kegiatan lain yang dapat menimbulkan perubahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya 			
Kota. Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Cirebon diarahkan untuk menjadi kawasan agribisnis yang didukung sektor industri, perdagangan dan jasa, perikanan laut dan darat, serta meningkatkan fungsi pelabuhan. • Kota Cirebon diarahkan untuk memperhatikan rencana struktur ruang kota yang membagi habis wilayah kota menjadi 9 (sembilan) zona, yaitu : (1) Zona Pemerintahan; (2) Zona Pusat Bisnis; (3) Zona Pelabuhan; (4) Zona Pendidikan OR, Rekreasi; (5) Zona Pelayanan Kesehatan; (6) Zona Keraton; (7) Zona Industri; (8) Zona Permukiman; (9) Zona Agribisnis. 			



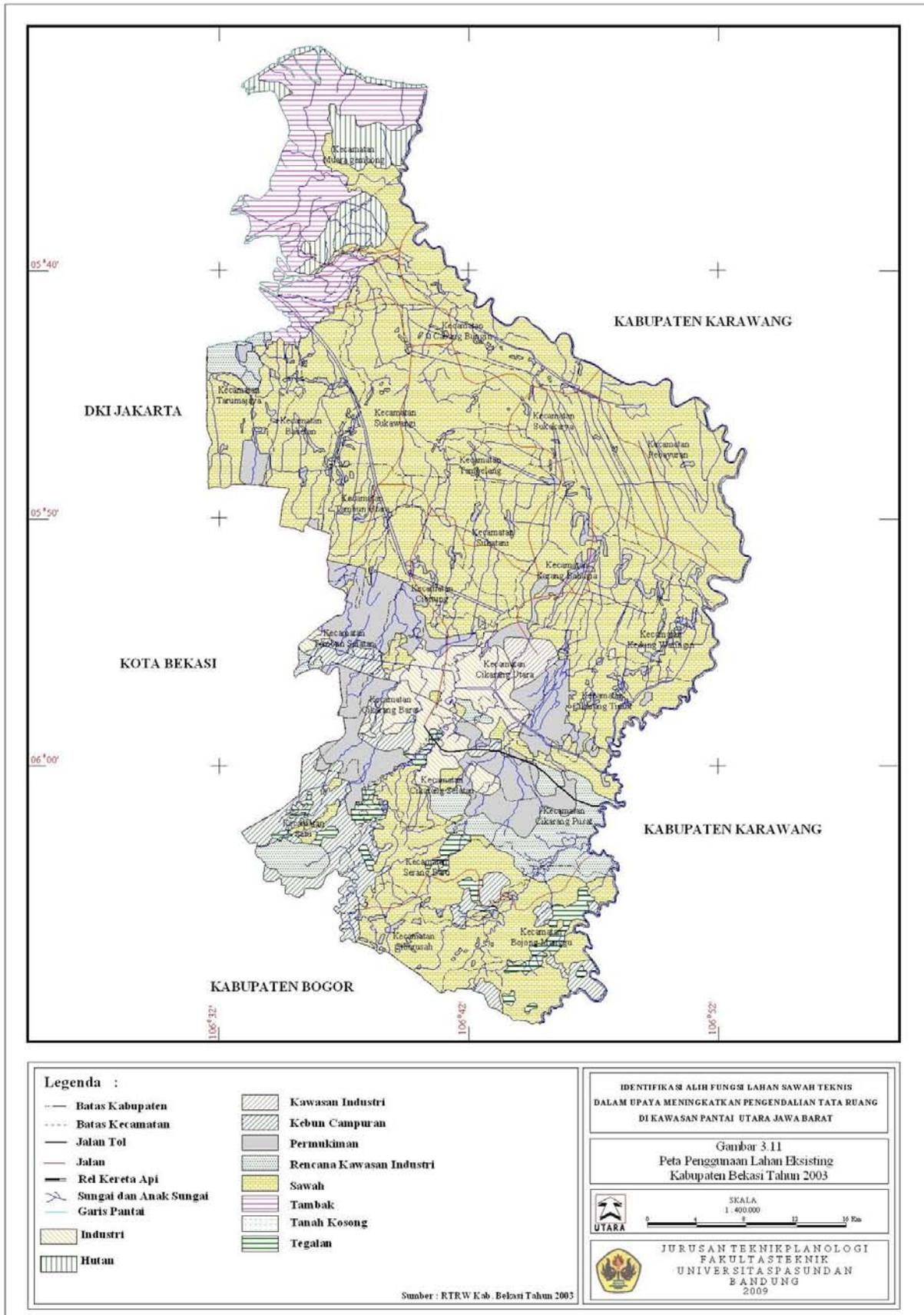


sebagai berikut : sawah irigasi teknis sekitar 37.493 Ha (29,43%), sawah tadah hujan sekitar 8.286 Ha (6,50%), tegalan sekitar 11.785 Ha (9,25%), Untuk lahan pekarangan atau terbangun mencapai 28.206 Ha (22,14%), penggunaan luas lahan terbesar di Kabupaten bekasi secara keseluruhan adalah jumlah lahan kering sebesar 71.501 Ha (56,13%), sedangkan lahan basah/sawah mencapai 55.887 Ha (43,87).untuk dapat melihat lebih jelasnya pemanfaatan lahan di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada **Tabel 3.8** dan **Gambar 3.11**.

Tabel 3.8
Pemanfaatan Lahan Kabupaten Bekasi
Tahun 2003

Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	
	Ha	%
I. LAHAN KERING		
Tanah Pekarangan,bangunan dan halaman	28,206	22.14
Tegal,Kebun,ladang,huma	11,785	9.25
Hutan negara	10,887	8.55
Padang Rumput	0	0
Rawa-rawa	93	0.07
Tambak	10,879	8.54
Kolam,empang	1,054	0.83
tanah tidak diusahakan	1,021	0.80
Hutan rakyat,tanaman kayu-kayuan	2,035	1.60
Pekebunan	0	0.00
Lainnya	5,541	4.35
Jumlah Lahan Kering	71,501	56.13
II. LAHAN SAWAH/BASAH		
Irigasi Teknis	37,493	29.43
Irigasi Setengah Teknis	6,570	5.16
Irigasi Sederhana	3,538	2.78
Tadah hujan	8,286	6.50
Non PU		
Jumlah Lahan Sawah	55,887	43.87
Jumlah Total	127,388	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi 2003



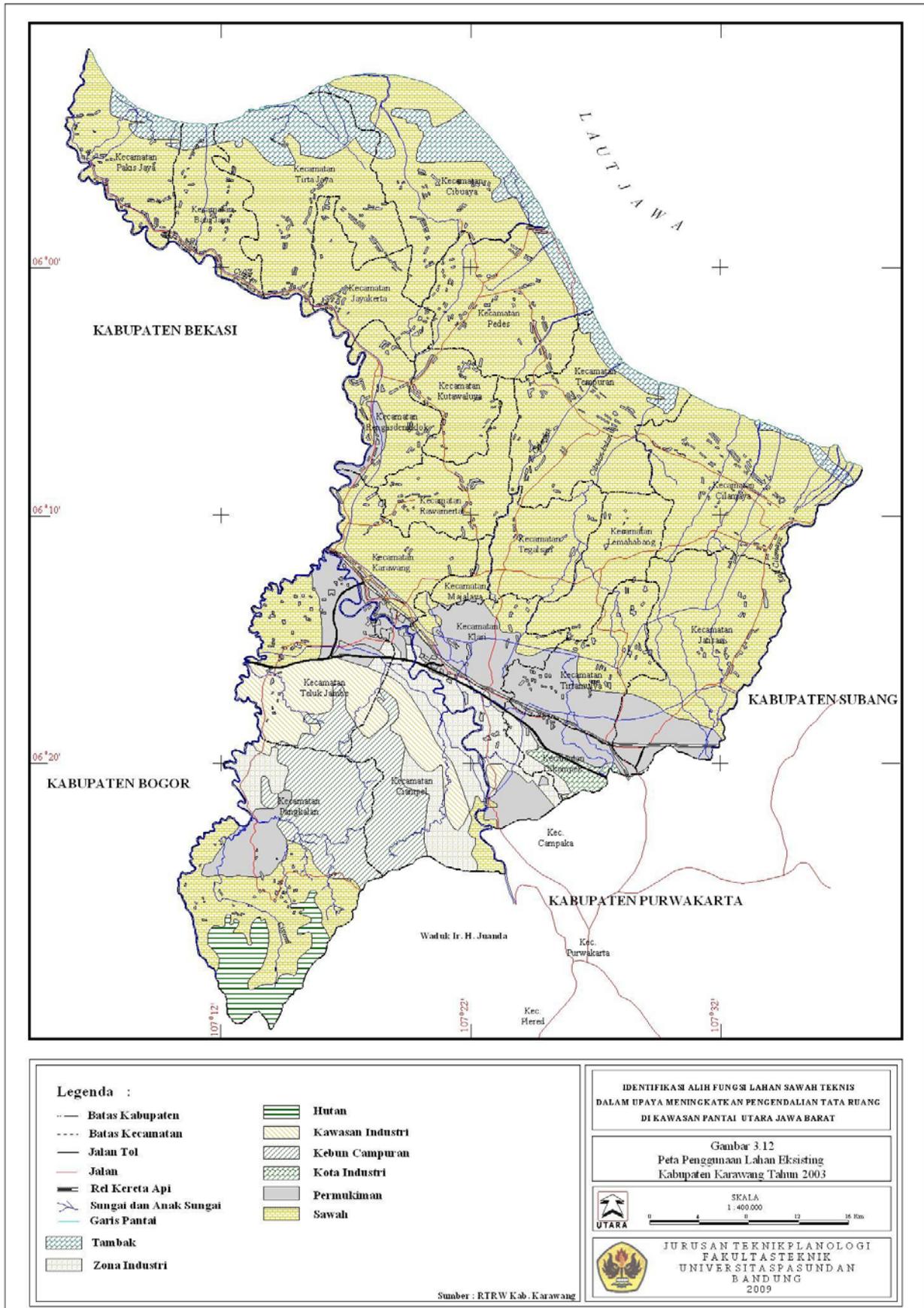
yang mencapai luas 91.491 Ha (52,18%) pada tahun 2003. Oleh karena itu Karawang dikenal sebagai lumbung padinya Jawa Barat.

Adapun penggunaan lainnya yang mendominasi di Kabupaten Karawang adalah lahan Kering yang mencapai 83.836 Ha (47,82%), dimana Lahan Pekarangan dan Bangunan 30.790 Ha (17,56%), Hutan Negara 11.132 Ha (6,35 %), Lahan Tambak 11.044 Ha (6,30%) dari luas Kabupaten Karawang. Sedangkan untuk penggunaan lahan lainnya relatif lebih kecil dengan angka di bawah 3,92%. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 3.9** dan **Gambar 3.12**.

Tabel 3.9
Penggunaan Lahan Di Kabupaten Karawang
Tahun 2003

Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	
	Ha	%
I. LAHAN KERING		
Tanah Pekarangan, bangunan dan halaman	30,790	17.56
Tegal, Kebun, ladang, huma	7,674	4.38
Hutan negara	11,132	6.35
Padang Rumput		
Rawa-rawa	18	0.01
Tambak	11,044	6.30
Kolam, empang	602	0.34
tanah tidak diusahakan	421	0.24
Hutan rakyat, tanaman kayu-kayuan	188	0.11
Pekebunan	2,263	1.29
Lainnya	19,704	11.24
Jumlah Lahan Kering	83,836	47.82
II. LAHAN SAWAH/BASAH		
Irigasi Teknis	79,492	45.34
Irigasi Setengah Teknis	4,944	2.82
Irigasi Sederhana	3,888	2.22
Tadah hujan	3,167	1.81
Non PU		
Jumlah Lahan Sawah	91,491	52.18
Jumlah Total	175,327	100.00

Sumber : BPS, Karawang Dalam Angka Tahun 2003



dimanfaatkan oleh pekarangan atau lahan terbangun mencapai 27.567 Ha (13,44 Ha) dan kebun/regalan mencapai 26.135 Ha (12,74%), sedangkan luas lahan sawah teknis di Kabupaten Subang mencapai 59.632 Ha (29,06 %) dari luas Kabupaten Subang.

Penggunaan lahan untuk pesawahan dan tambak pada umumnya berada di Kabupaten Subang sebelah Utara, sedangkan perkebunan sebagian berada di bagian Tengah dan Selatan dan kawasan hutan berada di bagian Selatan., Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 3.10**.

Tabel 3.10
Pemanfaatan Lahan Kabupaten Subang
Tahun 2003

Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	
	Ha	%
I. LAHAN KERING		
Tanah Pekarangan, bangunan dan halaman	27,567	13.44
Tegal, Kebun, ladang, huma	26,135	12.74
Hutan negara	29,562	14.41
Padangrumput	0	0
Rawa-rawa	0	0.00
Tambak	4,366	2.13
Kolam, empang	1,124	0.55
tanah tidak diusahakan	380	0.19
Hutan rakyat, tanaman kayu-kayuan	9,278	4.52
Pekebunan	21,434	10.45
Lainnya	267	0.13
Jumlah Lahan Kering	120,113	58.54
II. LAHAN SAWAH/BASAH		
Irigasi Teknis	59,632	29.06
Irigasi Setengah Teknis	7,423	3.62
Irigasi Sederhana	5,359	2.61
Tadah hujan	7,372	3.59
Non PU	5,277	2.57
Jumlah Lahan Sawah	85,063	41.46
Jumlah Total	205,176	100.00

Sumber : BPS, Kabupaten Subang Dalam Angka, Tahun 2003

D. Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu yang memiliki luas wilayah 204.011 Ha. Karena keadaan fisik wilayah didukung dengan tersedianya sarana pengairan/irigasi, pada

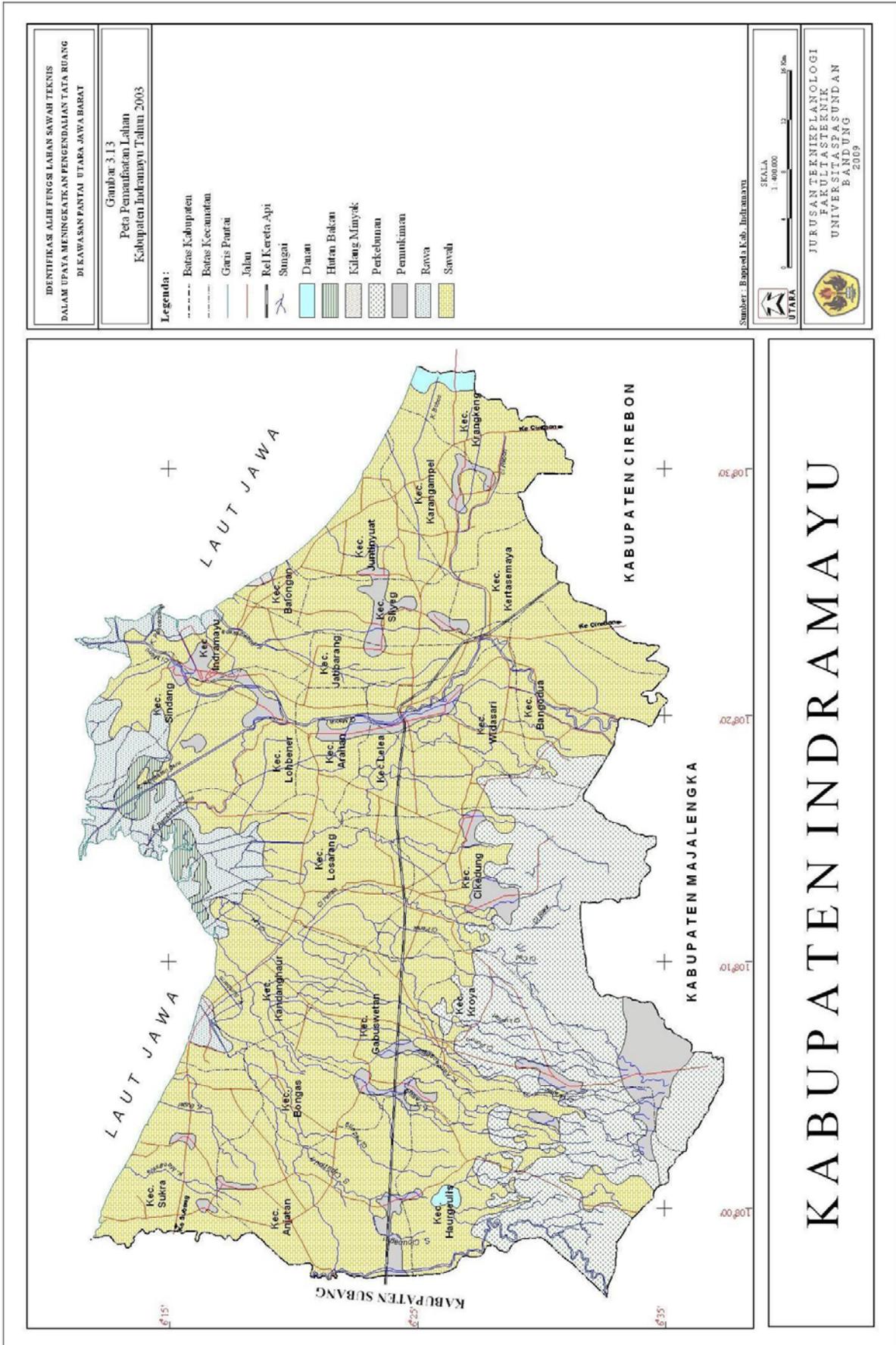
tahun 2003 penggunaan lahannya sebagian besar terdiri dari areal sawah/lahan basah yang mencapai luas 109.665 Ha (53,75%) dan lahan kering mencapai 94.346 Ha (46,25%).

Dimana penggunaan lahan sawah teknis di Kabupaten Indramayu pada tahun 2003 mencapai 65.743 Ha (32,23 %), sedangkan luas lahan pekarangan atau lahan terbangun mencapai 26.488 Ha (12,98 %) dari luas Kabupaten Indramayu seluruhnya. untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 3.11** dan **Gambar 3.13**.

Tabel 3.11
Pemanfaatan Lahan Kabupaten Indramayu Tahun 2003

Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	
	Ha	%
I. LAHAN KERING		
Tanah Pekarangan,bangunan dan halaman	26,488	12.98
Tegal,Kebun,ladang,huma	8,472	4.15
Hutan negara	35,585	17.44
Padang Rumput	982	0.48
Rawa-rawa	380	0.19
Tambak	6,668	3.27
Kolam,empang	47	0.02
tanah tidak diusahakan	3	0.00
Hutan rakyat,tanaman kayu-kayuan	313	0.15
Pekebunan	7,562	3.71
Lainnya	7,846	3.85
Jumlah Lahan Kering	94,346	46.25
II. LAHAN SAWAH/BASAH		
Irigasi Teknis	65,743	32.23
Irigasi Setengah Teknis	19,229	9.43
Irigasi Sederhana	3,905	1.91
Tadah hujan	20,772	10.18
Non PU	16	0.01
Jumlah Lahan Sawah	109,665	53.75
Jumlah Total	204,011	100.00

Sumber : BPS,Kabupaten Indramayu Dalam Angka Tahun 2003



Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Cirebon tahun 2003 dibagi kedalam dua klasifikasi yaitu lahan kering yang mencapai 41.177 Ha (42,03%) dan lahan sawah atau basah yang mencapai 56.788 Ha (57,97 %), dimana luas lahan pekarangan atau lahan terbangun di Kabupaten Cirebon mencapai 22.341 Ha (22,81%) sedangkan luas lahan sawah irigasi teknis di kabupaten Cirebon mencapai 33.581 Ha (34,28%), pemanfaatan lahan lainnya seperti tegalan atau kebun seluas 7.032 (7,18 %), dan hutan negara seluas 4.074 Ha (4,16 %). Untuk Lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 3.12**.

Tabel 3.12
Pemanfaatan Lahan Kabupaten Cirebon
Tahun 2003

Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	
	Ha	%
I. LAHAN KERING		
Tanah Pekarangan,bangunan dan halaman	22,341	22.81
Tegal,Kebun,ladang,huma	7,032	7.18
Hutan negara	4,074	4.16
Padang Rumput	249	0.25
Rawa-rawa	0	0.00
Tambak	3,389	3.46
Kolam,empang	1,048	1.07
tanah tidak diusahakan	80	0.08
Hutan rakyat,tanaman kayu-kayuan	847	0.86
Pekebunan	171	0.17
Lainnya	1,946	1.99
Jumlah Lahan Kering	41,177	42.03
II. LAHAN SAWAH/BASAH		
Irigasi Teknis	33,581	34.28
Irigasi Setengah Teknis	9,525	9.72
Irigasi Sederhana	4,522	4.62
Tadah hujan	5,970	6.09
Non PU	3,190	3.26
Jumlah Lahan Sawah	56,788	57.97
Jumlah Total	97,965	100.00

Sumber : BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2003

F. Kota Cirebon

Kota Cirebon yang memiliki luas wilayah 5.785,70 Ha. Karena keadaan fisik wilayah didukung dengan tersedianya pelabuhan 476.20 Ha atau sekitar 8,23

%, penggunaan lahannya sebagian besar adalah permukiman yang mencapai luas 2.512 Ha atau sekitar 43,42 %,

Adapun penggunaan lainnya yang mendominasi di Kota Cirebon adalah : Lahan hutan rakyat yang mencapai sekitar 58 Ha atau sekitar 1,0 %, lahan tegalan dan kebun mencapai 314 Ha (5,43 %). untuk lebih jelas dapat lihat pada **Tabel 3.13** dan **Gambar 3.14** peta penggunaan lahan Kota Cirebon.

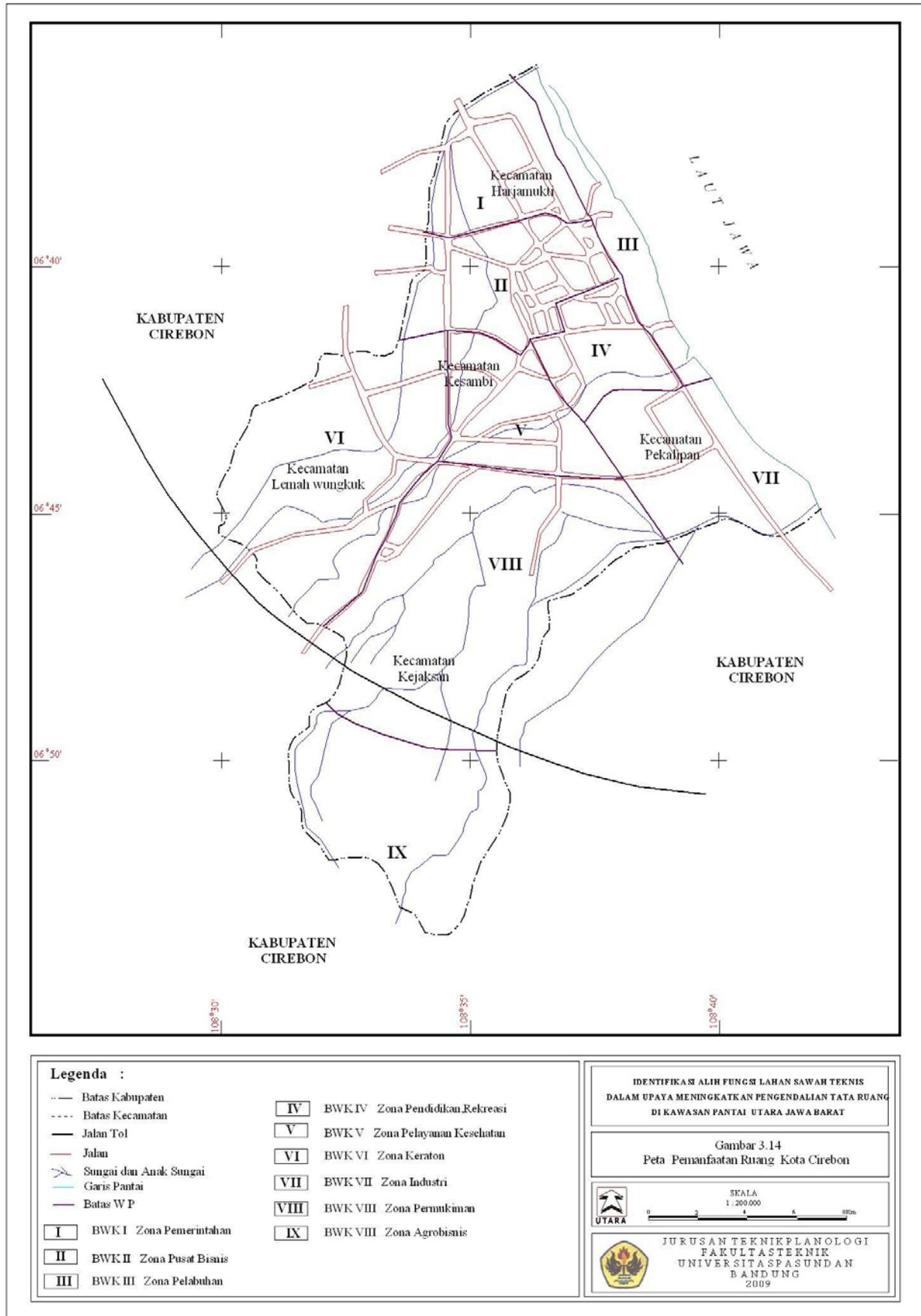
Tabel 3.13
Pemanfaatan Lahan Kota Cirebon
Tahun 2003

Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan	
	Ha	%
Tanah Pekarangan, bangunan dan halaman	2,512	43.42
Tegal, Kebun, ladang, huma	314	5.43
Hutan negara	0	0.00
Padang Rumput	0	0.00
Rawa-rawa	0	0.00
Tambak	0	0.00
Kolam, empang	32	0.55
tanah tidak diusahakan	0	0.00
Hutan rakyat, tanaman kayu-kayuan	58	1.00
Pekebunan	0	0.00
Lainnya	2,870	49.60
Jumlah Total	5,786	100.00

Sumber : BPS, Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2003

3.4 Pola Pemanfaatan Lahan di Kawasan Pantura

Pemanfaatan lahan di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat (Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon) dapat di bedakan menjadi 2 (dua) pengklasifikasian besar yaitu lahan sawah dan lahan kering yang di bedakan menurut jenis pengairan dan status penggunaannya. Luas lahan yang digunakan seluruhnya mencapai 815.653 Ha.



kering pada tahun 1999 daerah pantura Jawa Barat mencapai 412.444 Ha atau sekitar 50,57 % ,dimana luas lahan pekarangan atau terbangun mencapai 140.969 Ha (17,28 %),luas pemanfaatan lahan terbesar lainnya adalah hutan negara seluas 90.603 Ha (11,11 %) dan tegalan/huma/ladang/kebun yang mencapai 61.199 Ha (7,50 %).dari luas pemanfaatan lahan di daerah pantai utara Jawa Barat. Untuk lebih jelas pemanfaatan lahan tahun 1999 di daerah pantai utara Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14
Luas Lahan Rinci Menurut Jenis Penggunaan
Di Kabupaten/Kota Kawasan Pantura Tahun 1999

Pemanfaatan Lahan	Kabupaten/Kota					
	Bekasi	Karawang	Subang	Indramayu	Cirebon	Kota Cirebon
	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
I. LAHAN KERING						
Tanah Pekarangan,bangunan dan halaman	30,195	38,312	24,916	23,547	21,633	2,366
Tegal,Kebun,ladang,huma	10,756	9,333	24,459	9,022	7,303	326
Hutan negara	1,612	14,250	35,289	35,585	3,867	0
Padang Rumput	0	263	0	994	380	0
Rawa-rawa	83	13	0	380	0	0
Tambak	8,957	10,913	4,983	6,613	2,430	0
Kolam,empang	838	611	581	47	2,511	38
tanah tidak diusahakan	732	432	330	5	0	0
Hutan rakyat,tanaman kayu-kayuan	796	2,230	9,369	320	830	62
Pekebunan	0	199	20,940	7,562	232	0
Lainnya	17,192	5,268	245	7,562	1,738	2,994
Jumlah Lahan Kering	71,161	81,824	121,112	91,637	40,924	5,786
II. LAHAN BASAH/SAWAH						
Irigasi Teknis	43,170	80,580	59,074	79,980	34,663	0
Irigasi Setengah Teknis	2,357	4,996	7,775	12,536	8,894	0
Irigasi Sederhana	3,212	4,172	2,983	5,899	4,064	0
Tadah hujan	7,488	3,755	8,558	8,896	5,261	0
Non PU	0	0	5,674	5,063	4,159	0
Jumlah Lahan Sawah	56,227	93,503	84,064	112,374	57,041	0
Jumlah Luas Kabupaten	127,388	175,327	205,176	204,011	97,965	5,786

Sumber : BPS Propinsi Jawa Barat Tahun 1999

Luas lahan basah/sawah di pantai utara Jawa Barat pada tahun 2003 mengalami penurunan seluas 4.315 Ha atau menjadi 398.894 Ha, dimana luas lahan sawah teknis mencapai 275.941 Ha (33,83 %) atau mengalami penyusutan sebesar 21.526 (-1,45 %/tahun), penurunan luas lahan sawah teknis ini sebagian besar di pengaruhi oleh adanya penambahan luas lahan tegalan/kebun/huma yang mencapai 61.412 Ha, dan lahan tambak mencapai 36.346 Ha terutama di

Kabupaten Karawang dan Bekasi. Untuk melihat lebih jelas pola pemanfaatan lahan di kabupaten / kota kawasan pantura Jawa Barat tahun 2003 dapat di lihat pada **Tabel 3.15**.

Tabel 3.15
Luas Lahan Rinci Menurut Jenis Penggunaan
Di Kabupaten/Kota Kawasan Pantura Tahun 2003

Pemanfaatan Lahan	Kabupaten					
	Bekasi	Karawang	Subang	Indramayu	Cirebon	Kota Cirebon
	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
I. LAHAN KERING						
Tanah Pekarangan,bangunan dan halaman	28,206	30,790	27,567	26,488	22,341	2,512
Tegal,Kebun,ladang,huma	11,785	7,674	26,135	8,472	7,032	314
Hutan negara	10,887	11,132	29,562	35,585	4,074	0
Padang Rumput	0	0	0	982	249	0
Rawa-rawa	93	18	0	380	0	0
Tambak	10,879	11,044	4,366	6,668	3,389	0
Kolam,empang	1,054	602	1,124	47	1,048	32
tanah tidak diusahakan	1,021	421	380	3	80	0
Hutan rakyat,tanaman kayu-kayuan	2,035	188	9,278	313	847	58
Pekebunan	0	2,263	21,434	7,562	171	0
Lainnya	5,541	19,704	267	7,846	1,946	2,870
Jumlah Lahan Kering	71,501	83,836	120,113	94,346	41,177	5,786
II. LAHAN BASAH/SAWAH						
Irigasi Teknis	37,493	79,492	59,632	65,743	33,581	0
Irigasi Setengah Teknis	6,570	4,944	7,423	19,229	9,525	0
Irigasi Sederhana	3,538	3,888	5,359	3,905	4,522	0
Tadah hujan	8,286	3,167	7,372	20,772	5,970	0
Non PU			5,277	16	3,190	0
Jumlah Lahan Sawah	55,887	91,491	85,063	109,665	56,788	0
Jumlah Total	127,388	175,327	205,176	204,011	97,965	5,786

Sumber : BPS Propinsi Jawa Barat Tahun 2003

Pola penggunaan lahan di daerah pantai utara Jawa barat terutama dipengaruhi oleh keadaan tanah, persediaan air dataran rendah dan letak ketinggian dari permukaan laut. Di wilayah dataran sekitar sungai Ciherang, Cikao, Cilamaya, Cipunagara, Ciasem, Cimanuk yang memungkinkan terdapat pengairan teknis, penggunaan lahannya adalah persawahan dua musim, sedangkan di wilayah perbukitan yang relatif kekurangan air berbeda pola penggunaan lahannya dengan daerah dataran rendah. Berdasarkan pengaruh keadaan tanah dan air tersebut daerah pantai utara Jawa Barat dibagi dalam beberapa macam pola penggunaan lahan utama yaitu:

A. Sawah Dua Musim

Penggunaan lahan sawah dua setahun merupakan lahan yang dapat ditanami padi dua kali setahun, kelompok pengguna lahan ini dapat dijumpai pada daerah datar sepanjang pantai utara Jawa Barat yang menyebar dari Karawang ke arah timur sampai ke perbatasan Jawa Tengah. Pada umumnya sawah yang berada di dataran rendah belakang pantai tersebut dapat ditanami sepanjang tahun tak tergantung curah hujan, karena didukung sumber air dari sistem pengairan teknis dengan suplai yang cukup dan teratur dari beberapa sungai utama, diantaranya pengairan Citarum Timur dari Sungai Citarum, Sungai Cimanuk dan beberapa sungai lainnya yang debitnya cukup.

B. Sawah Satu Musim

Pola penggunaan sawah satu kali setahun ini dijumpai pada daerah datar, berombak, bergelombang bahkan pada wilayah berbukit dengan adanya sistem terasering dan pengairan yang teratur. Kelompok penggunaan lahan ini terdapat di daerah sebelah atas/hulu dengan pola penggunaan sawah dua musim atau pada wilayah-wilayah perbukitan yang penyebarannya terpencar-pencar, tergantung adanya sumber air.

Di samping itu sumber air pola sawah satu kali setahun ini juga tergantung pada curah hujan. Pola tanam adalah padi, palawija/sayuran atau bera. Tanaman padi pada umumnya ditanam pada musim penghujan setelah itu lahan diberakan atau ditanam palawija/sayuran seperti jagung, ketela pohon, kedelai, ketela rambat, cabe, kol, seledri dan lain sebagainya. Umumnya tindakan pemupukan pada semua jenis tanaman ini sudah dilakukan.

C. Tegalan

Tegalan disini adalah usaha tani lahan kering dengan tanaman semusim. Pada umumnya pola penggunaan tegalan dimasukkan pada daerah-daerah yang tidak mendapat pengairan secara teratur atau sumber air tergantung curah hujan.

D. Kebun Campuran

Tipe penggunaan ini umumnya dicirikan oleh adanya tanaman keras seperti kelapa, bambu dan lain sebagainya, atau berupa tanaman buah-buahan seperti mangga, nangka, pisang, melinjo, pepaya dan lain-lain. Tanaman ini

ditanam secara bersama-sama dengan pola pertanaman yang kurang teratur. Penyebarannya cukup merata di seluruh pantai utara Jawa Barat, umumnya menempati daerah-daerah dekat pemukiman/pekarangan penduduk setempat.

E. Rumput/Semak

Tipe penggunaan lahan ini terdapat di daerah-daerah yang kurang produktif lagi bagi lahan pertanian dan dengan dicirikan banyaknya pohon perdu dan rumput-rumputan seperti keliara, alang-alang atau tanaman kayu-kayuan yang berdiameter kurang dari 5 cm.

F. Belukar

Belukar merupakan pertumbuhan tahap pertama kearah pembentukan hutan kembali. Pada umumnya belukar demikian dicirikan oleh vegetasi yang rapat, yang terdiri dari kayu-kayuan muda berdiameter 5-30 cm, sedikit bercampur dengan semak dan rumput-rumputan. Semakin lama kayu-kayuan tersebut menjadi dominan, sedangkan vegetasi semak dan rumput-rumputan menjadi berkurang.

3.5 Perkembangan Guna Lahan Sawah Irigasi Teknis Di Kawasan Pantura

A. Kabupaten Bekasi

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bekasi terdapat 3 (tiga) kecamatan yang termasuk dalam Kawasan Pantura , yaitu Kecamatan Babelan, Tarumajaya,dan Kecamatan Muaragembong. Di kawasan pantura Kabupaten Bekasi berdasarkan data BPS mengalami penyusutan luas lahan sawah irigasi teknis pada kurun waktu tahun 1999 – 2003 sebesar -160,75 Ha/ tahun, atau sekitar -2,61 % / tahun, penyusutan luas lahan terbesar terjadi di Kecamatan Tarumajaya sebesar -0,2127 %/ tahun atau sebesar -8,00 Ha/ tahun, sedangkan pada Kecamatan Muaragembong tidak terdapat lahan sawah teknik, hanya lahan sawah setengah teknis dan sawah tadah hujan, sehingga pada analsis tersebut tidak diperhitungkan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.16
Luas Lahan Sawah Teknis Kecamatan-Kecamatan
Di Wilayah Pantura Kabupaten Bekasi (Ha)

No	Kecamatan	Tahun					Perkembangan	
		1999	2000	2001	2002	2003	%/tahun	Ha/tahun
1	Babelan	3.770	3.770	3.752	3.741	3.738	-0,212	-8,00
2	Tarumajaya	2.598	2.299	2.102	2.000	1.987	-6,395	-152,75
3	Muaragembong	tda	tda	tda	tda	tda	tda	tda
Sub Total		6.368	6.069	5.854	5.741	5.725	-2,611	-160,75

Sumber : BPS, Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 1999-2003

Tabel diatas dapat memperlihatkan perkembangan luas lahan sawah teknis pada kurun waktu 1999-2003 di Kabupaten Bekasi, dimana pada tahun 1999-2000 luas lahan sawah relatif menurun sebesar 3.419 ha. Mengingat peranan Kabupaten Bekasi merupakan penyangga dari DKI Jakarta, dapat dipastikan bahwa lahan tersebut berasal lahan pertanian, dan sebagian di antaranya adalah lahan sawah yang selama ini tergolong sangat produktif. Izin lokasi perumahan yang telah diterbitkan di Jawa Barat sejak 1983-1995 mencakup luas 115.947 ha, yang sebagian besar (81.203 ha) di antaranya berada di wilayah Botabek. Dari luasan tersebut baru 13.275 ha atau sekitar 16,3 % yang sudah terbangun.

B. Kabupaten Karawang

Lahan sawah beririgasi di Kabupaten Karawang berdasarkan data BPS pada tahun 1999 mencakup areal seluas 80.580 Ha, sedangkan pada tahun 2003 luas lahan sawah beririgasi tersebut adalah seluas 69.367 Ha. Ini berarti selama kurang lebih lima tahun, luas lahan sawah beririgasi di seluruh Kabupaten Karawang berkurang sebesar 11.213 Ha atau sekitar -2.803,3 Ha / tahun (-3,73 % pertahun).

Penurunan luas lahan sawah teknis terbesar terjadi antara tahun 2001 sampai dengan 2002 yaitu sebesar 1.764 Ha, sedangkan kecamatan yang mengalami penyusutan luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Rengasdengklok seluas -1.968,8 Ha/ tahun atau sekitar -38,97 % / tahun.

Di Kabupaten pantura Kabupaten Karawang banyak juga kecamatan yang tidak mengalami penyusutan luas lahan sawah teknis, kecamatan yang tidak mengalami penyusutan adalah Kecamatan Tempuran, Kecamatan Telaga sari, Kecamatan Batujaya, dan Kecamatan Tirtamulya.

Penurunan luas lahan di Kabupaten Karawang dikarenakan adanya perkembangan pembangunan dan perubahan struktural dalam perekonomian (dari pertanian ke non pertanian) dan demografis (dari pedesaan ke perkotaan), perkembangan kawasan terbangun berkembang dengan pesat ini terkait erat dengan pembangunan kawasan industri dan pemukiman skala besar.

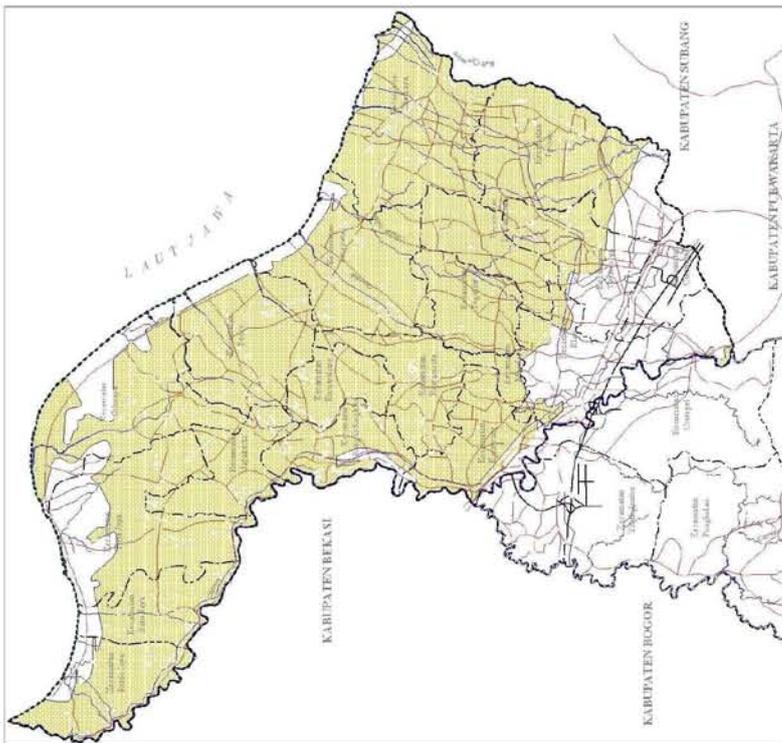
Pada tabel dan gambar berikut akan memperlihatkan perkembangan lahan sawah teknis dan lokasi sebaran lahan sawah setiap kecamatan di kawasan pantura Kabupaten Karawang pada tahun 1999 dan tahun 2002.

Tabel 3.17
Luas Lahan Sawah Teknis Kecamatan-Kecamatan
Di Wilayah Pantura Kabupaten Karawang (Ha)

No	Kecamatan	Tahun					Perkembangan	
		1999	2000	2001	2002	2003	%/tahun	Ha/tahun
1	Tempuran	6.502	6.502	6.502	6.502	6.502	0,00	0,0
2	Pedes	7.508	7.508	7.500	7.550	7.693	0,64	46,3
3	Klari	3.258	3.217	3.217	3.217	3.217	-0,63	-10,3
4	Cibuaya	3.371	3.371	3.371	3.833	3.833	3,43	115,5
5	Pakisjaya	5.005	1.791	1.872	1.936	1.872	-32,08	-783,3
6	Majalaya	2.798	2.412	2.412	2.395	1.564	-15,75	-308,5
7	Karawang	4.441	4.441	4.441	2.885	2.885	-8,76	-389
8	Jatisari	8.370	8.370	8.370	8.500	3.281	-14,96	-1.272,3
9	Cilamaya	7.310	7.310	7.310	7.280	6.781	-1,82	-132,3
10	Cikampek	1.050	1.050	1.050	990	949	-2,46	-25,3
11	Lemahabang	3.793	3.793	3.793	3.963	3.788	0,02	-1,3
12	Telagasari	3.925	3.925	3.925	3.925	3.925	0,00	0,0
13	Rawamerta	4.604	4.604	4.604	4.602	4.802	1,08	49,5
14	Rengasdengklok	9.700	5.328	5.328	1.825	1.825	-38,97	-1.968,8
15	Batujaya	4.384	4.384	4.384	4.832	4.384	0,24	0,0
16	Tirtamulya	2.689	2.689	2.689	2.896	2.689	0,14	0,0
17	Kutawaluya	0	4.372	4.320	5.362	4.372	1,12	1.093
18	Tirtajaya	1.872	5.005	5.005	5.836	5.005	84,27	783,3
Sub Total		80.580	80.072	80.093	78.329	69.367	-3,73	-2.242,60

Sumber : BPS, Kabupaten Karawang Dalam Angka Tahun 1999-2003

Tabel diatas dapat memperlihatkan penurunan luas lahan sawah teknis pada kurun waktu 1999-2003 di Kabupaten Karawang, dimana pada tahun 1999-2000 luas lahan sawah teknis menurun, penurunan luas lahan sawah teknis di Kabupaten Karawang pada tahun 1999 sampai dengan 2003 sebesar 11.213 Ha atau sekitar -2.803,3 Ha / tahun (-3,73% pertahun). Dengan adanya perkembangan pembangunan tersebut di Kabupaten Karawang yang kemudian akan memacu peningkatan harga lahan secara cepat, yang pada gilirannya justru menjadi pendorong bagi pemilik lahan pertanian untuk menjual atau melepaskan pemilikan lahannya untuk penggunaan non pertanian.



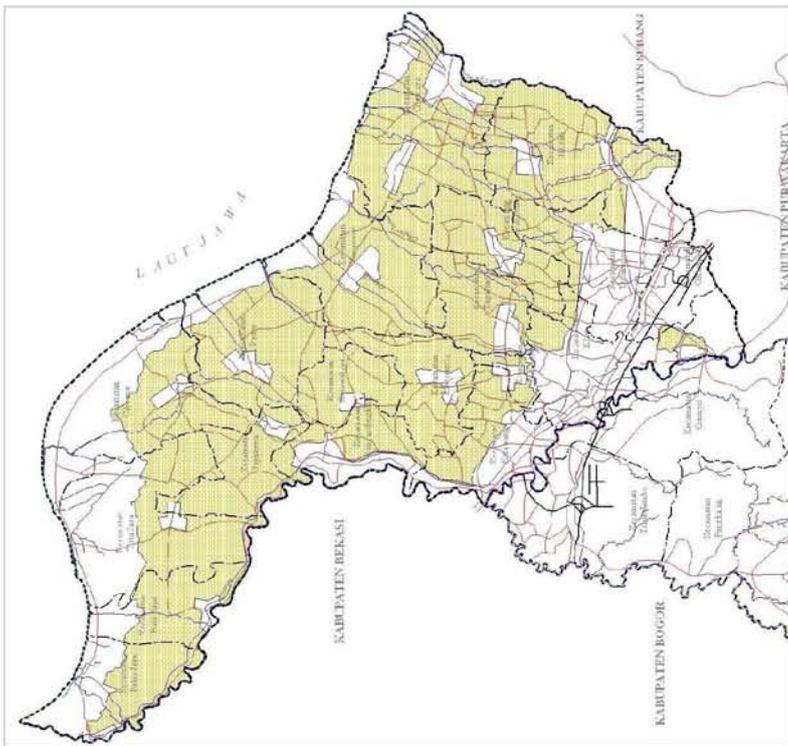
TAHUN 1999

- Legenda :**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Desa Tambahan
 - Batas Pantai
 - Jalan Tol
 - Jalan
 - Sungai dan Anak Sungai

Sawah, Teknis



Sumber : Perencanaan Wilayah dan Kota, Semarang Tahun 1999
 dan Pengamatan dan Foto Udara Tahun 1999



TAHUN 2002

IDENTIFIKASI LEBIH FUNGSI LAMASAMBUHUTERIN
 DALAM UPAYA MELINDUNGKAN PENGENDALIAN UTARA DAN
 BELAKANG PASTAI UTARA JAWA BARAT

Gambar 3.16
 Peta Lahan Sawah Teknis di Kawasan Paman
 Kabupaten Karanganyar Tahun 1999-2002

UTARA

JURUSAN TEKNIK SILVANOLOGI
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS PAPARAN
 BANDUNG
 2009

C. Kabupaten Subang

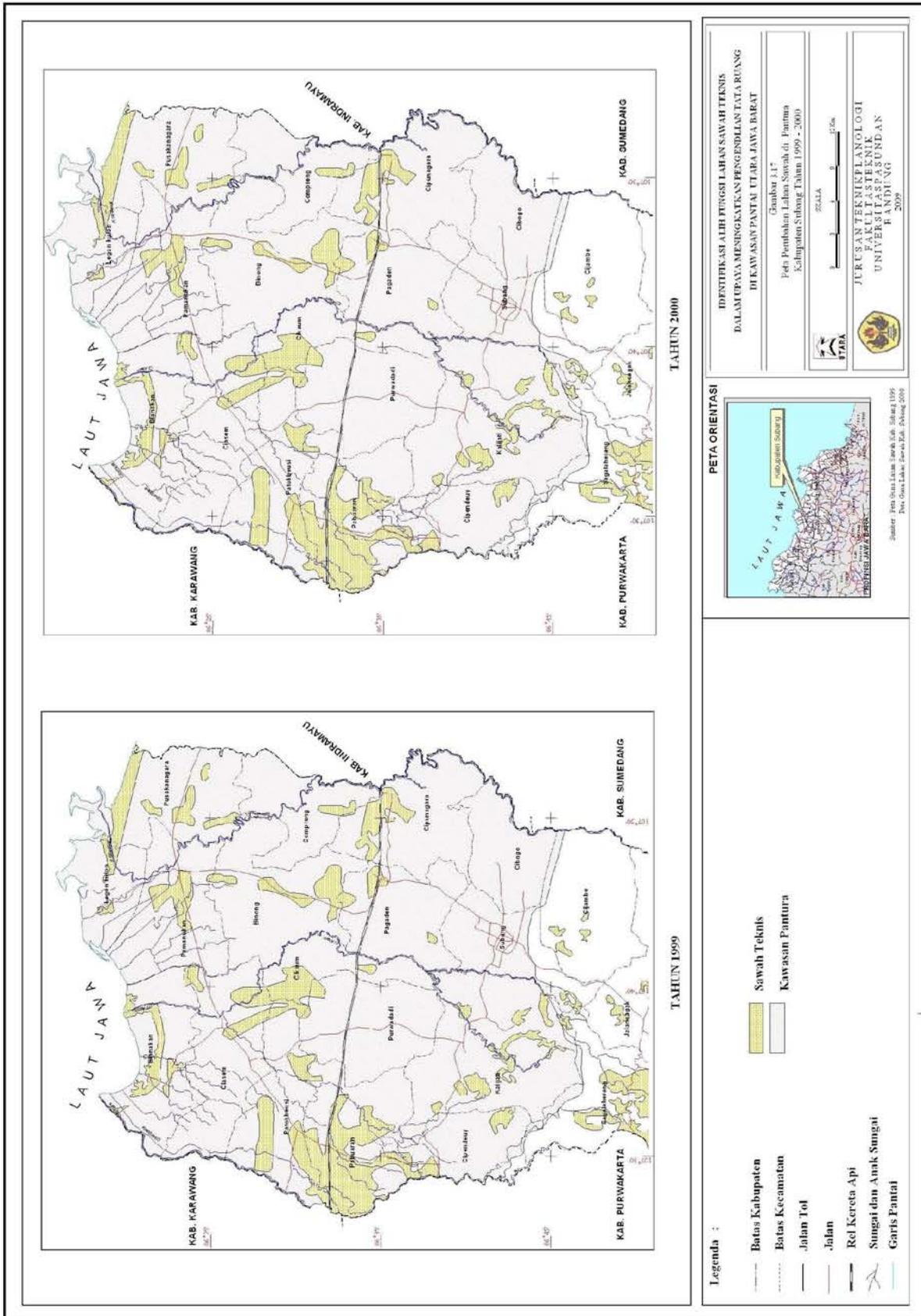
Kabupaten Subang pada tahun 1999 mencapai 54.189 Ha, pada tahun 2003, luas lahan sawah tersebut berubah menjadi 54.306 Ha. Hal ini berarti, di Kabupaten Subang, jika melihat titik awal dan titik akhir masa penelitian, maka luas lahan sawah secara keseluruhan di wilayah tersebut bertambah seluas 117 Ha. Akan tetapi berdasarkan perhitungan secara menyeluruh luas lahan sawah irigasi teknis di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut, pada tahun 1999 – 2002 luas lahan sawah teknis meningkat sebesar 1.327 Ha, akan tetapi pada tahun 2002 – 2003 luas lahan sawah teknis kembali mengalami penurunan sehingga pada tahun 2002 luas lahan sawah teknis di Kabupaten Subang menjadi 54.306 Ha, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Luas Lahan Sawah Teknis Kecamatan-Kecamatan
Di Wilayah Pantura Kabupaten Subang (Ha)

No	Kecamatan	Tahun					Perkembangan	
		1999	2000	2001	2002	2003	%/tahun	Ha/tahun
1	Blanakan	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0,00	0,0
2	Legon Kulon	4.139	2.722	2.722	2.722	2.722	-8,56	-354,3
3	Pusakanagara	5.506	6.600	6.600	6.600	6.600	4,97	273,5
4	Pamanukan	4.563	4.890	4.890	4.890	4.890	1,79	81,8
5	Ciasem	6.811	6.374	6.374	6.374	6.374	-1,60	-109,3
6	Binong	7.323	8.466	8.466	8.466	8.466	3,90	285,8
7	Comprenng	4.814	4.814	4.814	4.814	4.814	0,00	0,0
8	pabuaran	1.681	1.681	1.681	3.404	1.681	12,97	0,0
9	Purwadadi	5.04	565	565	620	565	3,24	15,3
10	Cikaum	2.193	13,81	1.381	1.381	1.381	-9,26	-203
11	Cipunagara	2.142	2.300	2.300	1.491	2.300	6,62	39,5
12	Pagaden	3.089	3.089	3.089	3.330	3.089	0,14	0,0
13	Patokbeusi	6.124	6.124	6.124	6.124	6.124	0,00	0,0
Total Luas		54.189	54.306	54.306	55.516	54.306	0,07	29,3

Sumber : BPS, Kabupaten Subang Dalam Angka Tahun 1999-2003

Tabel diatas dapat memperlihatkan penurunan luas lahan sawah teknis pada kurun waktu 1999-2003 di Kabupaten Subang, dimana pada tahun 1999-2002 luas lahan sawah teknik meningkat sebesar 1.327 Ha akan tetapi pada tahun 2002-2003 luas lahan sawah teknis mengalami penurunan yang sangat besar seluas 1.210 Ha, untuk melihat lebih jelas sebaran lahan sawah dapat dilihat pada gambar berikut.



D. Kabupaten Indramayu

Di Kabupaten Indramayu terdapat 17 kecamatan yang masuk ke dalam wilayah studi (kawasan pantura), berdasarkan hasil analisis luas lahan sawah irigasi teknis di kawasan pantura Kabupaten Indramayu mengalami penyusutan dalam kurun waktu tahun 5 (lima) tahun 1999-2003 yaitu sebesar 9.470 Ha atau sekitar 2.335 Ha / tahun (3,77 % pertahun). Sedangkan kecamatan yang mengalami penyusutan luas lahan sawah terbesar adalah Kecamatan Krangkeng seluas 627 Ha/ tahun atau sekitar 19,43% / tahun, peningkatan lahan sawah teknis terjadi di Kecamatan Lelea sebesar 320,5 Ha / tahun atau sebesar 8,75% / tahun.

Tabel 3.19

**Luas Lahan Sawah Teknis Kecamatan-Kecamatan
Di Wilayah Pantura Kabupaten Indramayu (Ha)**

No	Kecamatan	Tahun					Perkembangan	
		1999	2000	2001	2002	2003	%/tahun	Ha/tahun
1	Sukra	7.239	7.231	7.239	6.550	6.550	-2,38	-172,3
2	Anjatan	6.270	6.262	6.270	5.898	5.898	-1,48	-93
3	Balongan	309	301	309	121	121	-15,19	-47
4	Krangkeng	3.672	3.664	3.672	3.120	1.164	-19,43	-627
5	Bongas	4.246	4.238	4.246	3.930	3.930	-1,86	-79
6	Kandang Haur	6.500	6.492	6.500	5.297	5.297	-4,63	-300,8
7	Losarang	3.416	3.408	3.416	643	3.410	-87,29	-1,5
8	Lohbener	3.335	3.327	3.335	1.936	1.939	-10,45	-349
9	Sindang	tda	tda	tda	tda	tda	tda	tda
10	Indramayu	1.095	1.087	1.095	610	610	-11,07	-121,3
11	Jatibarang	2.599	2.591	2.599	2.130	2.130	-4,51	-117,3
12	Sliyeg	4.807	4.799	4.807	4.732	4.732	-0,39	-18,8
13	Juntinyuat	3.572	3.564	3.572	1.768	1.768	-12,63	-451
14	Karangampel	4.139	4.131	4.139	4.132	4.132	-0,04	-1.8
15	Widasari	4.918	4.910	4.918	4.240	4.240	-3,45	-169,5
16	Lelea	3.380	3.372	3.380	3.850	4.662	8,75	320,5
17	Gabus wetan	3.673	3.665	3.673	5.088	3.117	-0,05	-139
Total Luas		63.170	63.042	63.170	54.045	53.700	-3,77	-2.335,5

Sumber : BPS, Kabupaten Indramayu Dalam Angka Tahun 1999-2003

Tabel diatas dapat memperlihatkan penurunan luas lahan sawah teknis pada kurun waktu 1999-2003 di Kabupaten Indramayu , dimana pada tahun 1999-2002 luas lahan sawah teknik mengalami penurunan sebesar 9.125 Ha sedangkan

pada tahun 2002-2003 luas lahan sawah teknis mengalami penurunan kembali seluas 345 Ha. untuk melihat lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.19 berikut.

E. Kabupaten Cirebon

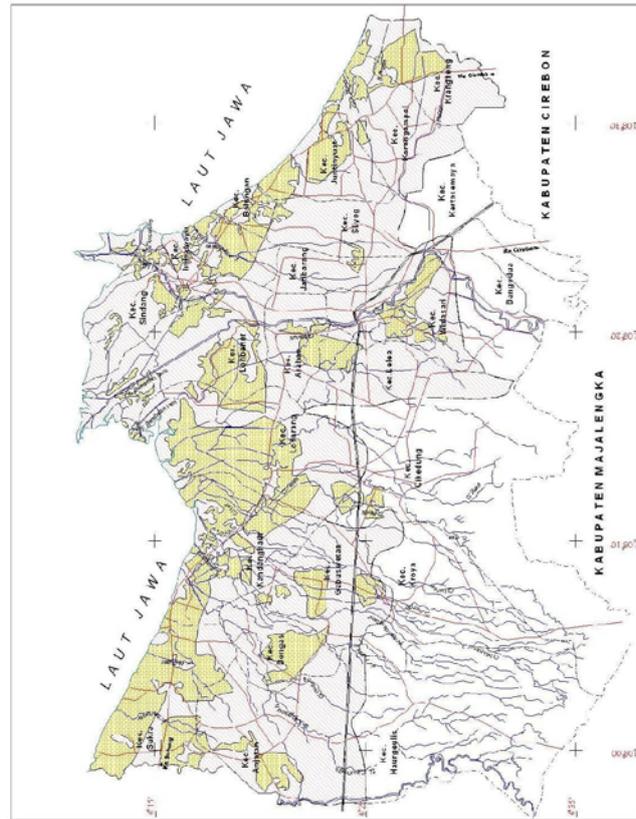
Di Kabupaten Cirebon yang termasuk kedalam kawasan pantura adalah sebanyak 18 kecamatan, Dalam 5 (lima) tahun terakhir 1999-2003 luas lahan sawah teknis di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan luas sebesar 1.892 Ha atau sekitar 363,5 Ha /Tahun (-0,64%/tahun), kecamatan yang mengalami penurunan yang besar adalah kecamatan Gegecik yang mencapai 532 Ha atau 9,31 %/tahun sedangkan kecamatan Losari mencapai 4.255 Ha atau sebesar 22.97 %/tahun, Untuk lebih jelas melihat perkembangan lahan sawah di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.20

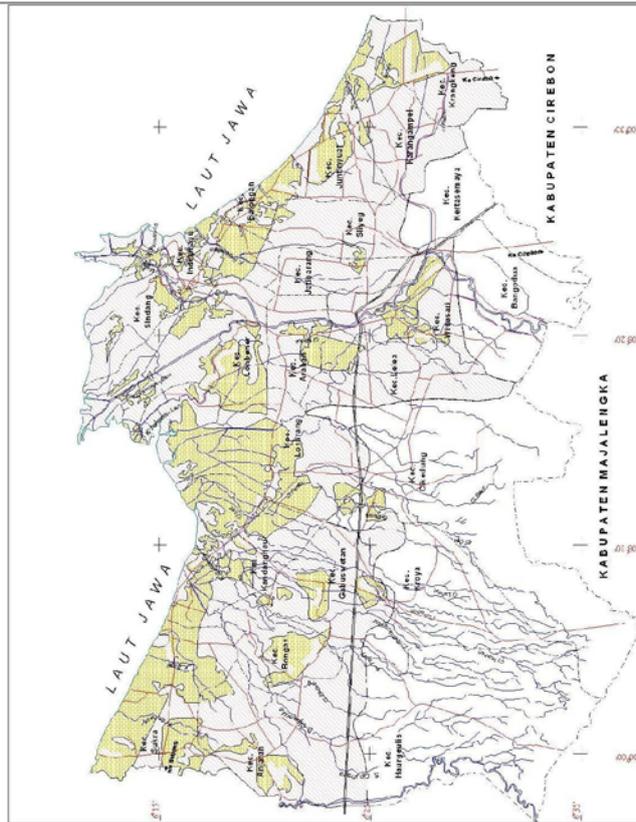
**Luas Lahan Sawah Teknis Kecamatan-Kecamatan
Di Wilayah Pantura Kabupaten Cirebon (Ha)**

No	Kecamatan	Tahun					Perkembangan	
		1999	2000	2001	2002	2003	%/tahun	Ha/tahun
1	Kapetakan	2.769	2.769	2.769	2.769	2.597	-1,55	-43,0
2	Gegecik	5.738	5.738	5.738	3.868	3.610	-9,81	-532
3	Susukan	2.686	2.686	2.686	2.686	2.428	-2,40	-64,5
4	Ciwaringin	1.424	1.424	1.424	1.424	1.252	-3,02	-43
5	Arjawinangun	2.340	2.340	2.340	1.033	861	-18,13	-369,8
6	Klangenan	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391	0,00	0,0
7	Cirebon Utara	614	614	614	614	614	0,00	0,0
8	Cirebon Barat	463	463	463	411	411	-2,81	-13
9	Weru	468	468	468	468	468	0,00	0,0
10	Plumbon	tda	1.376	1.371	1.371	1.199	-3,23	299,8
11	Palimanan	1.160	1.160	1.155	1.153	981	-3,88	-44,8
12	Cirebonselatan	tda	461	560	543	543	4,61	135,8
13	Mundu	563	563	515	515	515	-2,13	-12,0
14	Astanajapura	928	928	928	787	787	-3,80	-35,3
15	Babakan	2.887	2.887	2.847	2.872	2.700	-1,62	-46,8
16	Losari	2.279	2.279	1.683	577	577	-22,97	-425,5
17	Ciledug	tda	2.055	2.082	2.079	1.907	-1,78	476,8
18	Karang sembung	tda	1.620	863	1.587	1.415	6,58	353,8
Total Luas		26.710	32.222	30.897	27.148	25.256	-0,64	-363,5

Sumber : BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 1999-2003



TAHUN 2002



TAHUN 2003

Legenda :

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Jalan Tol
-  Jalan
-  Rel Kereta Api
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Garis Pantai
-  Sawah Teknis
-  Kawasan Pantura

PETA ORIENTASI



Sumber : Peta Rupa Bumi RI, 1:500,000 1992
Peta Umum Jawa Barat, 1:500,000 2003

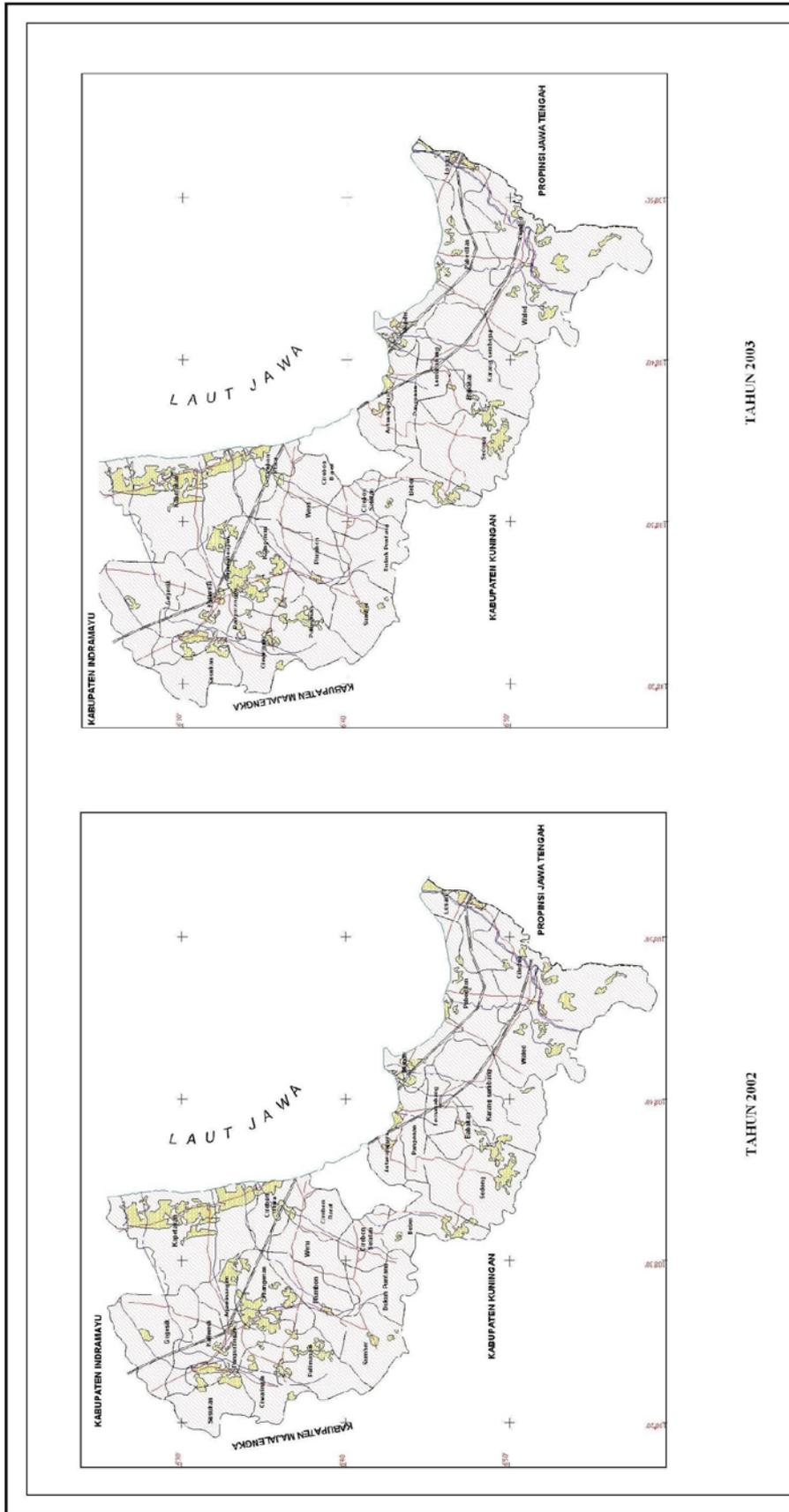
**IDENTIFIKASI ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH TEKNIS
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGELOMPOKAN TATA RUANG
DI KAWASAN PANTAI UTARA JAWA BARAT**

Gambar 3.18
Peta Lahan Sawah di Pantura
Kabupaten Indramayu Tahun 2002 - 2003

UTARA

SKALA 1:5000

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PONDAN
BANDUNG
2009



TAHUN 2002

TAHUN 2003

**IDENTIFIKASI ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH TEKNIS
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGELOMPOKAN TATA RUANG
DI KAWASAN PANTAI UTARA JAWA BARAT**

Gambar 3.19
Peta Lahan Sawah di Pantai
Kabupaten Cirebon Tahun 2000 - 2003

SEKOLAH
0 1 2 3 4 5
Kilometer

**JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SUNDAN
P. JAWA BARAT
2003**



Legenda :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Tol
- Jalan
- Rel Kereta Api
- Sungai dan Anak Sungai
- Garis Pantai
- Sawah Teknis
- Kawasan Pantura

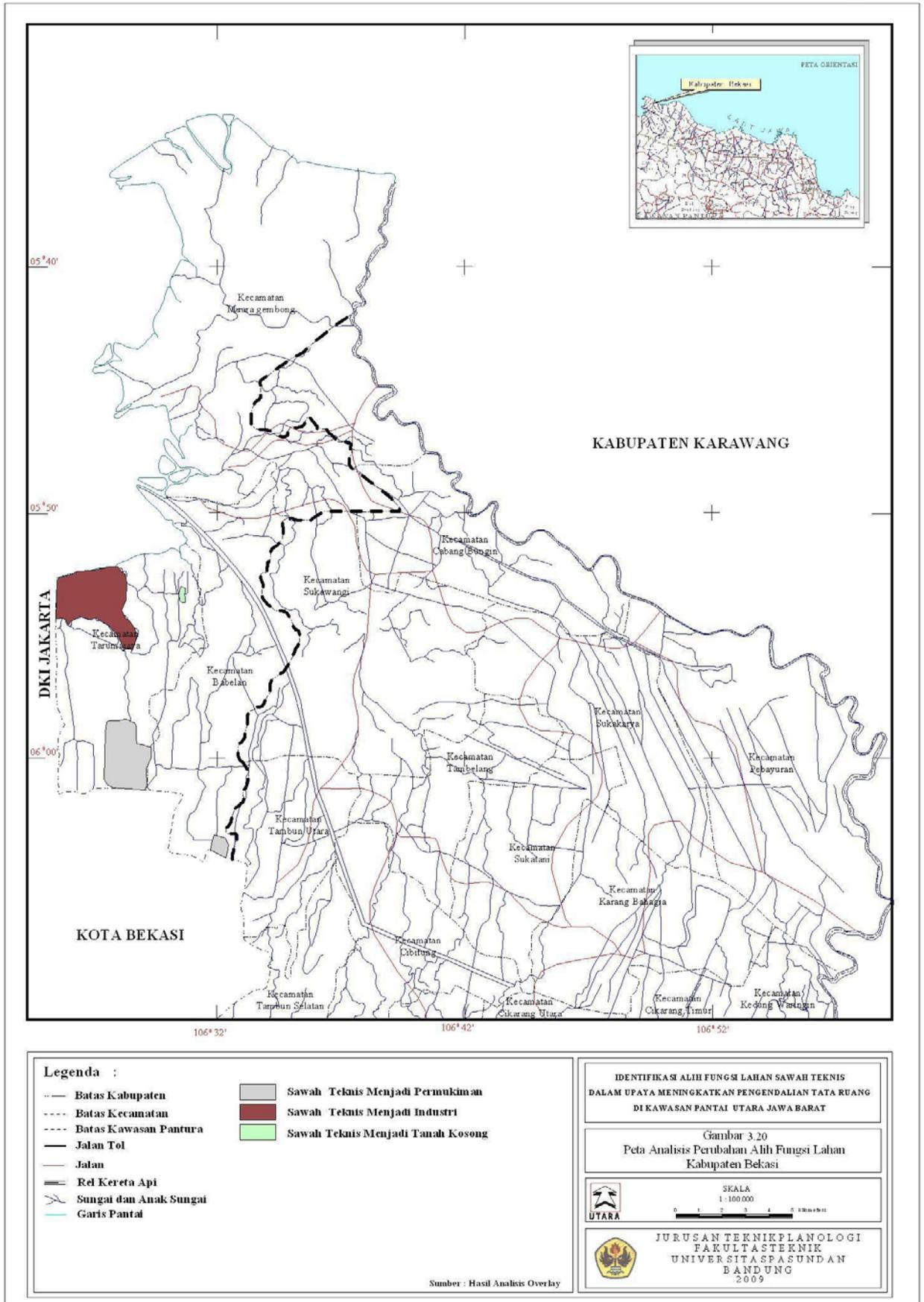
A. Kabupaten Bekasi

Berdasarkan penggunaan lahan tahun 1999 - 2002, maka dapat terlihat perubahan penggunaan lahan sawah teknis di Kawasan pantura Kabupaten Bekasi. Perubahan lahan sawah teknis terjadi pada 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan, dari hasil overlay peta dapat terlihat perubahan dari fungsi awal yang diperuntukan sawah teknis menjadi permukiman seluas 696,91 Ha (33%) dari luas total perubahan, Kecamatan yang mengalami perubahan lahan sawah teknis menjadi permukiman terbesar terjadi di Kecamatan Tarumajaya seluas 597,77 Ha dan pada kecamatan Babelan seluas 99,14 Ha. Sedangkan untuk perubahan sawah teknis menjadi industri di Kawasan pantura Kabupaten Bekasi hasil overlay menunjukkan telah terjadi perubahan seluas 1.215,03 Ha (59,22%) dari luas total perubahan, yang berlokasi di Kecamatan Tarumajaya, dan untuk perubahan lahan lainnya adalah menjadi tanah kosong seluas 139,75 Ha (6,81%). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.21
Perubahan Lahan Sawah Teknis Tiap
Kecamatan Di Kabupaten Bekasi (dalam Ha)

No.	Kecamatan	Sawah Teknis Menjadi			Luas Perkecamatan
		Permukiman	Industri	Tanah Kosong	
1	Tarumajaya	597,77	1.215,03	139,75	1.952,55
2	Babelan	99,14	-	-	99,14
3	Muaragembong	-	-	-	-
Luas Perubahan		696,91	1.215,03	139,75	2.051,69
Persentase		33,97	59,22	6,81	100,00

Sumber : Hasil Analisis dan Overlay Peta



Perubahan penggunaan lahan sawah teknis di Kawasan pantura Kabupaten Kabupaten Karawang berdasarkan hasil analisis dan overlay peta penggunaan lahan tahun 1999-2002 dapat terlihat perubahan lahan sawah teknis menjadi pemanfaatan lahan lainnya seperti permukiman, industri, hutan bakau dan tambak, luas lahan sawah teknis yang mengalami penyusutan adalah sebesar 26.529,71 Ha, dimana perubahan pemanfaatan lahan sawah teknis adalah sebagai berikut :

- **Industri**

Berdasarkan overlay peta penggunaan lahan kawasan pantura Kabupaten Karawang, terlihat bahwa pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang seluas 1.667,40 Ha (6,29%) dari seluruh luas perubahan , dimana industri tersebut terletak di Kecamatan Cikampek seluas 768,50 Ha, dan Kecamatan Rengasdengklok seluas 898,90 Ha.

- **Permukiman**

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Karawang salah satu faktor penyebab berkurangnya luas lahan sawah teknis, dimana kebutuhan akan perkembangan non pertanian khususnya permukiman di kawasan pantura Kabupaten Karawang telah mengalami penambahan luasan sebesar 1.3278,85 Ha (50,05 %) dari seluruh luas perubahan, Kecamatan yang mengalami perubahan dari sawah teknis menjadi permukiman yang terbesar terletak di Kecamatan Klari sebesar 5.535,75 Ha, disusul dengan Kecamatan Rengasdengklok sebesar 823,80 Ha.

- **Tambak**

Selain terjadi perubahan lahan sawah menjadi industri dan permukiman di kawasan pantura Kabupaten Karawang juga terjadi perubahan lahan sawah teknis menjadi lahan tambak yang mencapai luasan 4.116,20 Ha, perubahan lahan sawah teknis menjadi tambak yang mengalami penyusutan luasan terbesar terjadi di Kecamatan Pedes sebesar 1.497,28 Ha.

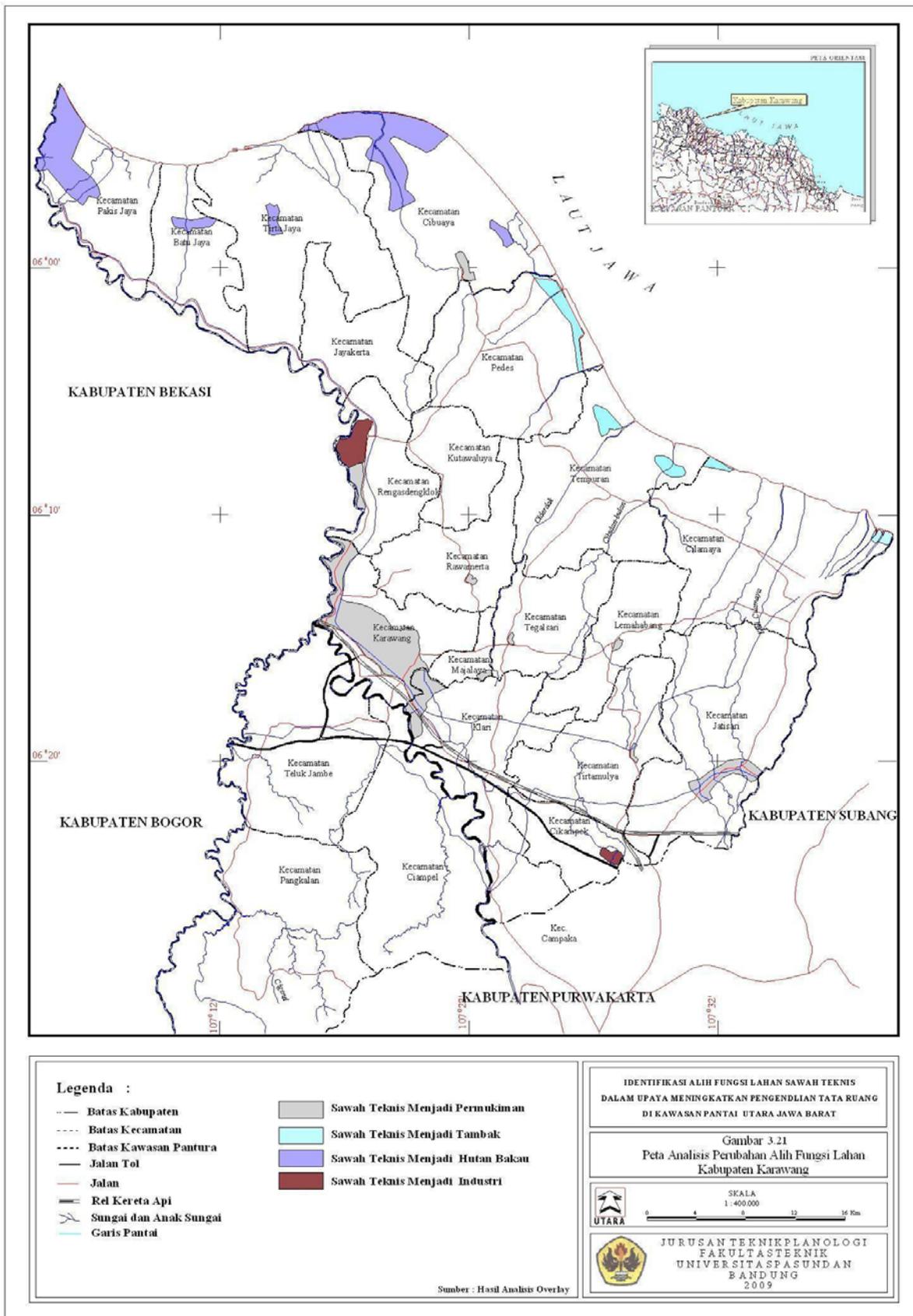
- **Hutan Bakau**

Hutan Bakau di kawasan pantura Kabupaten Karawang juga termasuk kedalam salah satu penyebab penyusutan lahan sawah teknis, luas perubahan lahan sawah teknis menjadi hutan bakau berdasarkan hasil analisis overlay peta penggunaan lahan kawasan pantura Kabupaten Karawang mencapai 2.267,50

Ha (11,30 %) dari luas seluruh perubahan, dimana kecamatan yang mengalami perubahan sawah teknis menjadi hutan bakau terbesar adalah Kecamatan Pakisjaya mencapai 1.161,23 Ha, untuk melihat lebih jelas perubahan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22
Perubahan Lahan Sawah Teknis Tiap
Kecamatan Di Kabupaten Karawang (dalam Ha)

No.	Kecamatan	Sawah Berubah Menjadi				Luas Perkecamatan
		Indutri	Permukiman	Hutan Bakau	Tambak	
1	Tempuran	-	-	-	872,50	872,50
2	Pedes	-	-	-	1.027,28	1.027,28
3	Klari	-	5.535,75	-	-	5.535,75
4	Cibuaya	-	-	168,63	-	168,63
5	Pakisjaya	-	81,20	1.161,23	-	1.242,43
6	Majalaya	-	203,40	-	-	203,40
7	Karawang	-	4.345	-	-	4.345
8	Jatisari	-	2.137	-	-	2.137
9	Cilamaya	-	-	-	946,42	946,42
10	Cikampek	768,50	-	-	-	768,50
11	Lemahabang	-	20,00	-	-	20,00
12	Telagasari	-	30,00	-	-	30,00
13	Rawamerta	-	35,40	-	-	35,40
14	Rengasdengklok	898,90	823,80	-	-	1.722,70
15	Batujaya	-	-	165,63	-	165,63
16	Tirtamulya	-	67,30	-	-	67,30
17	Tirtajaya	-	-	772	-	772
Luas		1.667,40	13.278,85	2.267,50	2.846,20	20.059,94
Prosentase		8,31	66,20	11,30	14,19	100,00



C. Kabupaten Subang

Perubahan Lahan sawah teknis menjadi pemanfaatan lahan lainnya di Kabupaten Subang tahun 1999 – 2000 terlihat penyusutan luas lahan sawah teknis yang berubah menjadi pemanfaatan lahan lainnya, penyusutan luas lahan sawah teknis mencapai 603,97 Ha, luasan perubahan tersebut terbagi kedalam :

- **Permukiman**

Perubahan lahan sawah teknis menjadi permukiman di Kabupaten Subang berdasarkan overlay peta mencapai seluas 379,64 ha (62,86 %), perubahan lahan sawah teknis menjadi permukiman terjadi di 5 (lima) kecamatan, dimana kecamatan yang mengalami penyusutan terluas adalah Kecamatan Legon Kulon yang mencapai 135,60 Ha, sedangkan kecamatan yang mengalami penyusutan lahan sawah terendah adalah Kecamatan Pabuaran mencapai 33,50 Ha.

- **Industri**

Perubahan lahan sawah teknis menjadi industri di Kabupaten Subang hanya terjadi di Kecamatan Pabuaran sebesar 22,23 Ha (3,68 %) dari seluruh luas perubahan yang terjadi di kawasan pantura Kabupaten Subang.

- **Tambak**

:Pemanfaatan lahan tambak di kawasan pantura Kabupaten Subang terlihat dari overlay peta penggunaan lahan Kabupaten Subang mengalami penambahan luasan sebesar 124,01 Ha (20,53%) dari luas seluruh perubahan, penyusutan lahan sawah teknis yang berubah menjadi tambak terjadi di Kecamatan Pamanukan seluas 87,00 Ha, dan Kecamatan Legonkulon sebesar 37,01 Ha.

- **Hutan Bakau dan Pemanfaatan Lahan lainnya**

Perubahan lahan sawah menjadi Hutan bakau dan pemanfaatan lahan lainnya di kawasan pantura Kabupaten subang perlu menjadi pertimbangan dalam menganalisis perubahan lahan sawah teknis karena penyusutan luas lahan sawah teknis menjadi hutan bakau mencapai 38,74 Ha (6,41%) dan Pemanfaatan lahan lainnya mencapai 39,35 Ha (6,51%) dari seluruh jumlah luas perubahan yang terjadi.

Perubahan lahan sawah teknis menjadi hutan bakau terjadi di Kecamatan legon Kulon seluas, sedangkan pemanfaatan lainnya (Hutan Produksi) yang terletak di Kecamatan Binong dari seluruh jumlah luas perubahan yang terjadi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Perubahan Lahan Sawah Teknis Tiap
Kecamatan Di Kabupaten Subang (dalam Ha)

No.	Kecamatan	Sawah Teknis Berubah Menjadi					Luas
		Permukiman	Industri	Tambak	Hutan Bakau	Lainnya	Perkecamatan
1	Legon Kulon	135,60	-	37,01	38,74	-	211,35
2	Pamanukan	80,00	-	87,00	-	-	167,00
3	Binong	93,04	-	-	-	39,35	132,39
4	Comprenng	37,50	-	-	-	-	37,50
5	Pabuaran	33,50	22,23	-	-	-	55,73
Jumlah		379,64	22,23	124,01	38,74	39,35	603,97
Persentase		62,86	3,68	20,53	6,41	6,51	100,00

Sumber : Hasil Analisis dan Overlay Peta

Untuk melihat lebih jelas perubahan lahan sawah teknis menjadi pemanfaatan lainnya dapat dilihat pada gambar 3.22



Legenda :

--- Batas Kabupaten	■ Sawah Telnis Menjadi Permukiman
--- Batas Kecamatan	■ Sawah Telnis Menjadi Hutan Bakau
— Jalan Tol	■ Sawah Telnis Menjadi Tambak
— Jalan	■ Sawah Telnis Menjadi Industri
— Rel Kereta Api	■ Sawah Telnis Menjadi Lainnya
— Sungai dan Anak Sungai	
— Garis Pantai	

Sumber : Hasil Analisis Overlay

IDENTIFIKASI ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH TEKNIS
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGELOMPOKAN TATA RUANG
DI KAWASAN PANTAI UTARA JAWA BARAT

Gambar 3.22
Peta Analisis Perubahan Alih Fungsi Lahan
Kabupaten Subang

SKALA
1 : 400.000

UTARA

JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2009

D. Kabupateng Indramayu

Perubahan lahan sawah teknis di kawasan pantura Kabupaten Indramayu tahun 2002-2003 dapat terlihat, dimana lahan sawah teknis berubah pemanfaatannya menjadi permukiman dan industri, luas penyusutan lahan sawah teknis di kawasan pantura Kabupaten Indramayu sebesar 1.806,51 Ha, yang terbagi kedalam :

- **Permukiman**

Perubahan lahan sawah teknis menjadi permukiman berdasarkan overlay peta mencapai 1.421,82 Ha (78,71%) dari seluruh luas perubahan , yang terbagi kedalam 7 (tujuh) kecamatan, dimana kecamatan yang mengalami penyusutan terbesar luas lahan sawah teknis menjadi permukiman adalah kecamatan Juntinyuat seluas 312,91 Ha, kecamatan yang mengalami penyusutan terendah adalah Kecamatan Sliyeg 86 Ha.

- **Industri**

Hasil overlay peta penggunaan lahan Kabupaten Indramayu tahun 2002 – 2003, luas lahan industri yang menggantikan lahan sawah teknis bertambah sebesar 384,69 Ha (21,29%) dari seluruh luas perubahan, yang terjadi pada 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sukra sebesar 180,48 Ha, Kecamatan Kandang Haur Sebesar 130,10 Ha dan Kecamatan Balongan sebesar 74,11 Ha.. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.24 dan gambar berikut.

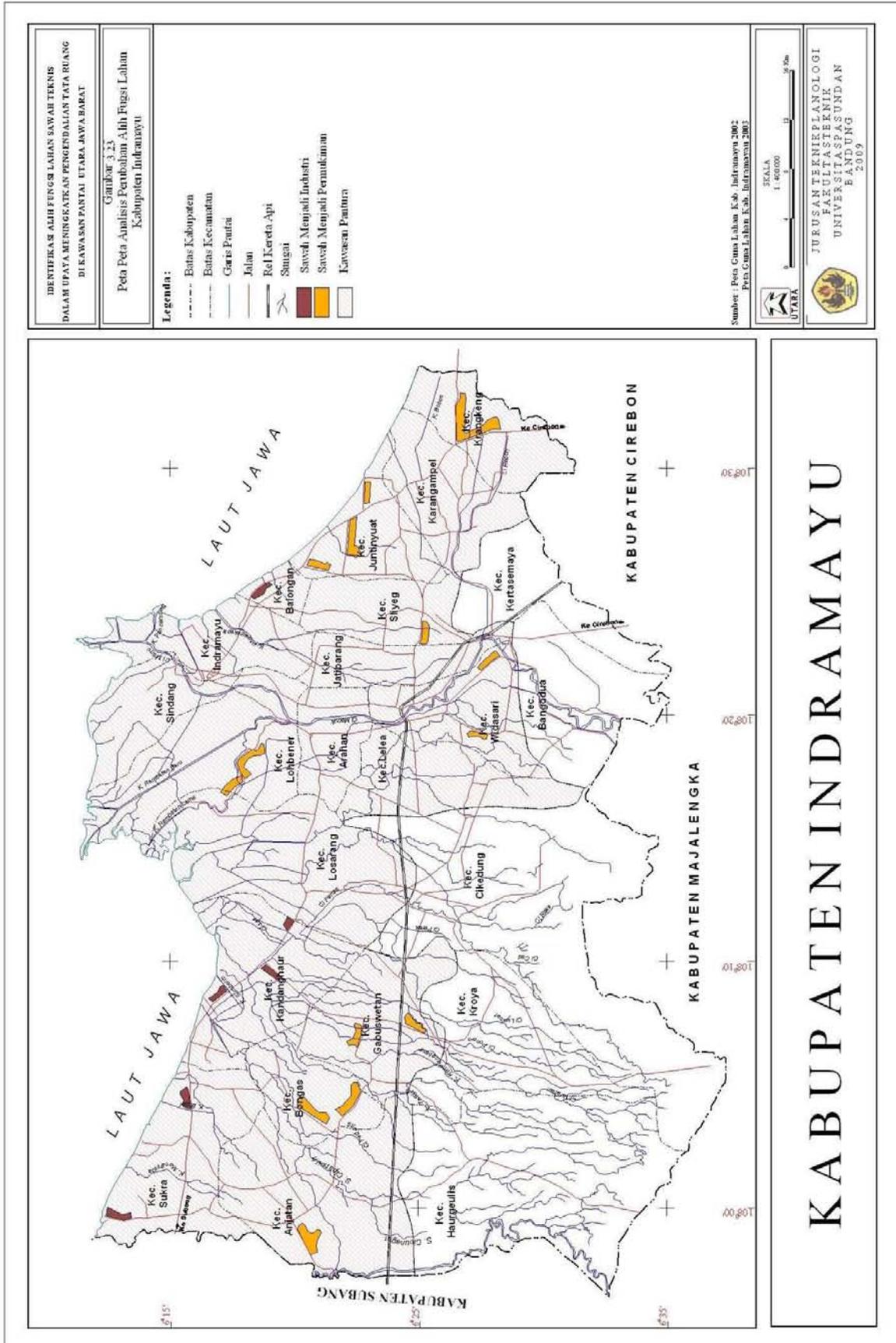
Tabel 3.24
Perubahan Lahan Sawah Teknis Tiap
Kecamatan Di Kabupaten Indramayu

No	Kecamatan	Lahan Sawah Berubah Menjadi		Luas Perkecamatan
		Permukiman	Industri	
1	Sukra	-	180,48	180,48
2	Anjatan	165,53	-	165,53
3	Balongan	-	74,11	74,11
4	Krangkeng	241,31	-	241,31
5	Bongas	211,54	-	211,54
6	Kandang Haur	-	130,10	130,10
7	Lohbener	172,17	-	172,17
8	Sliyeg	86,00	-	86,00
9	Juntinyuat	312,91	-	312,91
10	Widasari	95,21	-	95,21
11	Gabus wetan	137,15	-	137,15
Jumlah		1.421,82	384,69	1.806,51
Prosentase (%)		78,71	21,29	100,00

Sumber : Hasil Analisis dan Overlay Peta

Berdasarkan data tabel dan gambar perubahan diatas, perubahan lahan sawah teknis lebih dominan menjadi permukiman yang mencapai 78,71% dari total perubahan yang terjadi di kawasan pantura Kabupaten Indramayu, dan tidak di pengaruhi oleh adanya pembangunan industri, hasil pengamatan di lapangan bahwa pertambahan lahan permukiman disebabkan banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib di kota, selain dari itu banyaknya banyak pula para petani menjaul lahan sawahnya kepada investor baik itu perorangan maupun kelompok untuk di jadikan perumahan.

Sedangkan perubahan lahan sawah menjadi industri yang mencapai 21,29 % dari total perubahan yang terjadi di kawasan pantura Kabupaten Indramayu, walaupun tidak berpengaruh terlalu besar terhadap perubahan lahan sawah teknis, tetapi tetap lahan sawah teknis di kawasan pantura Indramayu akan terkena dampak dari pengembangan industri tersebut, dan apabila pemerintah setempat tidak memperhatikan dalam pengendalian pengembangan di Kawasan pantura khususnya.



E. Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon penyusutan lahan sawah teknis menjadi lahan lain mencapai 173,02 Ha, yang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan. Adapun perubahan lahan sawah teknis menjadi, perkebunan, permukiman, tambak dan pemanfaatan lahan lainnya, adapun luasan dan lokasi yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut

- **Perkebunan**

Perubahan lahan sawah teknis menjadi perkebunan di Kabupaten Cirebon sangat besar pengaruhnya terhadap penyusutan lahan sawah teknis, perubahan lahan sawah teknis menjadi perkebunan mencapai 77,65 Ha (44,88 %), yang tersebar di 6 (enam) kecamatan , dimana kecamatan yang mengalami penyusutan lahan sawah terbesar adalah di Kecamatan Arjawinangun yang mencapai 38,71 Ha, dan kecamatan yang mengalami penyusutan lahan sawah terkecil menjadi perkebunan adalah Kecamatan Cirebon Barat yang hanya mencapai 1,0 Ha.

- **Permukiman**

Sedangkan perubahan lahan sawah teknis menjadi permukiman hanya mencapai 55,60 Ha (32,13 5%) dari total perubahan yang terjadi di kawasan pantura Kabupaten Cirebon, perubahan lahan sawah teknis hanya terjadi di 4 (empat) kecamatan yang termasuk kedalam kawasan pantura Kabupaten Cirebon, dimana kecamatan yang mengalami penyusutan lahan sawah terbesar yang menjadi permukiman adalah di Kecamatan Arjawinangun yang mencapai 55,60Ha, disusul dengan Kecamatan Losari seluas 12,33 Ha, Kecamatan Astanajapura sebesar 2,61 Ha dan Kecamatan losari yang hanya mencapai 0,58 Ha

- **Tambak dan Pemanfaatan Lahan Lainnya**

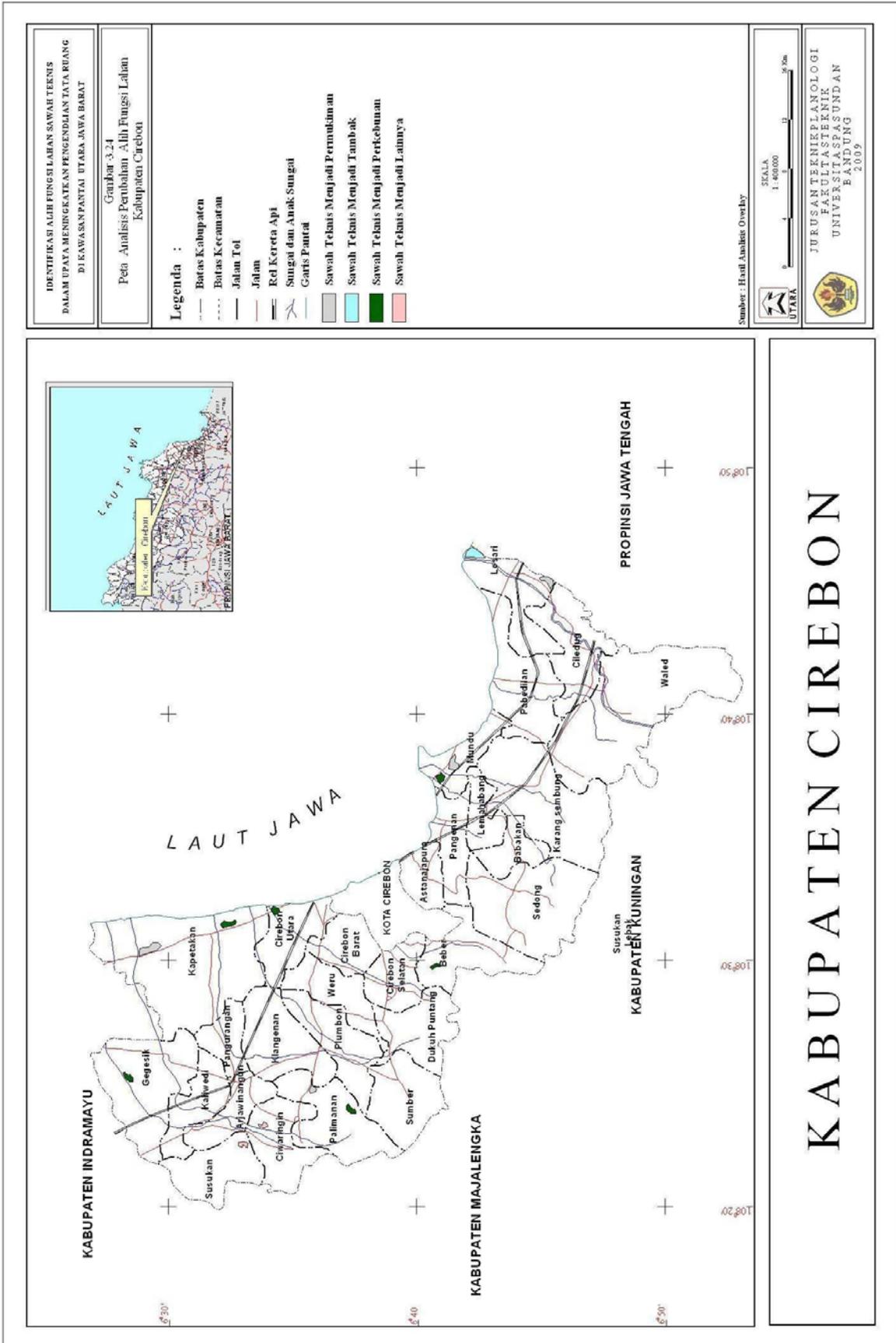
Pemanfaatan lahan tambak dan pemanfaatan lainnya (suaka alam) adalah salah satu kegiatan yang mempengaruhi penyusutan lahan sawah di kawasan pantura Kabupaten Cirebon, dimana penyusutan lahan menjadi tambak yang terletak di Losari mencapai 31,88 Ha (17,85%), dan untuk pemanfaatan lainnya (suaka alam) mencapai 8,89 Ha (5,14 %) yang berlokasi di Kecamatan Susukan dan kecamatan Ciwaringin. Untuk lebih jelas melihat

perubahan penyusutan lahan sawah di kawasan pantura Kabupaten Cirebon dapat di lihat pada **Tabel 3.25**.

Tabel 3.25
Perubahan Lahan Sawah Teknis Tiap
Kecamatan Di Kabupaten Cirebon (dalam Ha)

No	Kecamatan	Sawah Teknis Berubah Menjadi				Luas Perkecamatan
		Perkebunan	Permukiman	Tambak	Lainnya	
1	Gegesik	6,55	-	-	-	6,55
2	Mundu	38,71	40,08	-	-	78,79
3	Palimanan	8,89	0,58	-	-	9,47
4	Beber	5,40	-	-	-	5,40
5	Kapetakan	17,56	2,61	-	-	20,17
6	Cirebon Utara	1,00	-	-	-	0,55
7	Susukan	-	-	-	4,06	4,06
8	Ciwaringin	-	-	-	4,83	4,83
9	Losari	-	12,33	31,88	-	43,21
Luas		77,65	55,60	30,88	8,89	173,02
Prosentase (%)		44,88	32,13	17,85	5,14	100,00

Sumber : Hasil Analisis dan Overlay Peta



E. Kawasan Pantura

Selama 5 (lima) tahun terakhir antara kurun waktu 1999-2003 berdasarkan data BPS, secara keseluruhan di wilayah Pantura telah terjadi penyusutan sawah irigasi teknis dengan laju sebesar -1,96 %/tahun atau seluas -4.532,60 Ha/tahun. Penyusutan lahan sawah irigasi teknis yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Indramayu dengan laju sebesar -3,77 %/tahun, melebihi laju yang dimiliki oleh Wilayah Pantura. Sementara itu untuk laju terendah terdapat di Kabupaten Subang (0,07 %/tahun) dengan penyusutan lahan sawah irigasi teknis kurang dari 100 Ha/tahun.

Sehingga dapat diidentifikasi perubahan lahan sawah teknis di kawasan pantura yang terbesar adalah menjadi permukiman seluas 15.832,82 Ha (50,80%), industri seluas 3.289,35 Ha (10,55 %), tambak seluas 4.271,09 Ha (13,70 %), kebun seluas 77,65 Ha (0,25 %), hutan bakau seluas 7.506,01 Ha (24,08 %) penggunaan lahan lainnya seluas 48,24 Ha (0,15 %). Untuk dapat melihat lebih jelas perubahan lahan sawah teknis menjadi pemanfaatan lahan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.26
Perubahan Alih Fungsi Lahan Sawah Teknis
Di Kabupaten/ Kota Kawasan Pantura Jawa Barat (dalam Ha)

Kabupaten	Sawah Teknis Berubah Menjadi							Luas Perkecamatan
	Permukiman	Industri	Tambak	Kebun	Tanah Kosong	Hutan Bakau	Lainnya	
Bekasi	696,91	1.215,03	-	-	139,75	-	-	2.051,69
Karawang	13.278,85	1.667,40	2.846,20	-	-	2.267,50	-	20.059,94
Subang	379,64	22,23	124,01	-	-	38,74	39,35	603,97
Indramayu	1.421,82	384,69	-	-	-	-	-	1.806,51
Cirebon	55,60	-	30,88	77,65	-	-	8,89	173,02
Jumlah	15.832,82	3.289,35	3.001,09	77,65	139,75	2.306,24	48,24	24.695,13
Persentase	64,11	13,32	12,15	0,31	0,57	9,34	0,20	100,00

Sumber : Hasil Analisis dan Overlay Peta Gunalahan Kabupaten/ Kota Kawasan Pantura

Tabel tersebut diatas memperlihatkan bahwa perubahan lahan sawah teknis di kawasan pantura mencapai 24.695,13 Ha yang sebagian besar (64,11 %) beralih menjadi permukiman, dan 13,32 % lahan sawah beralih ke guna lahan industri .

3.7.1 Karakteristik Demografi Kabupaten/Kota Di Kawasan Pantura Jawa Barat

Salah satu faktor dalam pembangunan nasional selain sumber daya alam dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah jumlah penduduk atau sumber daya manusia. Dalam pembangunan yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang secara kuantitas mencukupi dan secara kualitas dapat diandalkan dan siap guna.

Jika dalam suatu wilayah tersedia sumber daya manusia yang cukup baik secara kuantitas dan maupun secara kualitas, maka dengan dukungan modal pembangunan yang lain, segala perencanaan pembangunan diberbagai sektor pada tiap-tiap wilayah akan dapat terlaksana dengan baik.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan dengan harapan terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Wilayah studi yang dikaji pada Kawasan Pantura Jawa Barat yaitu lima kabupaten dan satu kota yang terdiri dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.

A. Kabupaten Bekasi

Dilihat dari jumlah penduduknya Kabupaten Bekasi termasuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk terendah dikarenakan Kabupaten Bekasi hanya tiga kecamatan yang masuk ke dalam Kawasan Pantura Jawa Barat.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi selama lima tahun dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 30 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 3.27**.

Tabel 3.27
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi
Yang Termasuk Pada Kawasan Pantura Jawa Barat
Tahun 1999-2003 (Jiwa)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER TAHUN				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Muaragembong	31.556	26.679	31.309	33.052	33.852
2	Babelan	101.403	114.723	99.728	119.533	134.144
3	Tarumajaya	53.620	57.902	52.745	62.845	76.001
Jumlah Penduduk		186.579	199.304	183.782	215.430	243.997

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

B. Kabupaten Karawang

Penduduk merupakan salah satu model dalam pelaksanaan pembangunan. Karena itu penduduk itu sendiri merupakan objek dan subjek dari pembangunan.

Dilihat dari jumlah penduduknya Kabupaten Karawang termasuk yang mempunyai jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan kabupaten/kota yang terdapat di Kawasan Pantura Jawa Barat. Pada tahun 2002 jumlah penduduk di Kabupaten Karawang mencapai 1.586.325 jiwa, pada tahun tersebut merupakan jumlah penduduk terbesar yang terdapat di Kabupaten Karawang, dilihat antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 1999 sebesar 1.491.240 jiwa, dengan demikian berarti terjadi pertumbuhan penduduk sampai tahun 2002 sebesar 6,37 %, tetapi dari tahun 2002 ke tahun 2003 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar -10 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.28.

Tabel 3.28
Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang
Yang Termasuk Pada Kawasan Pantura Jawa Barat
Tahun 1999-2003 (Jiwa)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER TAHUN				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Pakisjaya	31.555	33.184	33.213	34.469	35.635
2	Telagasari	57.514	56.732	56.809	59.153	59.979
3	Batujaya	56.102	59.422	67.375	61.894	72.159
4	Lemahabang	56.904	58.618	58.686	61.166	59.059
5	Cilamaya	131.645	130.912	131.054	136.860	134.590
6	Tirtamulya	42.969	45.727	45.781	47.625	46.115
7	Jatisari	141.166	157.342	157.575	164.007	64.991
8	Klari	112.566	155.847	156.065	162.305	167.197
9	Karawang	197.864	182.617	182.850	190.265	197.479

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER TAHUN				
		1999	2000	2001	2002	2003
10	Cikampek	123.965	157.043	157.207	163.666	137.038
11	Majalaya	20.751	20.919	20.953	21.795	21.805
12	Rawamerta	48.210	47.653	47.717	49.793	49.516
13	Tirtajaya	61.117	67.303	59.494	70.013	63.358
14	Cibuaya	47.222	47.010	47.055	48.957	46.728
15	Rengasdengklok	119.211	87.775	87.882	91.412	96.494
16	Pedes	90.855	89.289	89.406	93.002	46.728
17	Kutawaluya	79.917	50.800	50.875	53.045	52.720
18	Tempuran	71.707	73.457	73.543	76.898	71.920
Jumlah Penduduk		1.491.240	1.521.650	1.523.540	1.586.325	1.423.511

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

C. Kabupaten Subang

Dilihat dari jumlah penduduknya Kabupaten Subang termasuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk sedang di bandingkan dengan kabupaten/kota yang masuk ke dalam Kawasan Pantura Jawa Barat.

Jumlah penduduk di Kabupaten Subang selama lima tahun dari tahun 1999 yang jumlah penduduknya sebesar 781.249 jiwa sampai dengan tahun 2003 yang jumlah penduduknya sebesar 840.929, mengalami kenaikan sebesar 8 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.29.

Tabel 3.29
Jumlah Penduduk Kabupaten Subang
Yang Termasuk Pada Kawasan Pantura Jawa Barat
Tahun 1999-2003 (Jiwa)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER TAHUN				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Blanakan	50.761	51.155	56.922	57.109	57.258
2	Legonkulon	36.182	36.227	38.104	38.271	38.914
3	Pusakanagara	59.384	59.372	62.290	62.412	62.835
4	Pamanukan	80.972	81.073	83.420	83.562	84.038
5	Ciasem	89.728	90.009	98.798	99.109	99.313
6	Binong	77.561	77.711	76.940	77.800	77.968
7	Compreng	42.813	43.357	42.717	43.380	43.974
8	Pabuaran	57.884	57.946	66.727	68.235	68.875
9	Purwadadi	49.986	50.863	53.462	53.454	53.528
10	Cikaum	44.897	45.071	46.001	46.508	46.595
11	Cipunagara	55.345	55.642	56.772	57.678	58.593
12	Pagaden	74.218	74.325	78.049	78.087	78.208

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER TAHUN				
		1999	2000	2001	2002	2003
13	Patokbeusi	61.518	61.586	70.589	70.720	70.830
Jumlah Penduduk		781.249	784.337	830.791	836.325	840.929

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

D. Kabupaten Indramayu

Dilihat dari jumlah penduduknya Kabupaten Indramayu termasuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk sedang di bandingkan dengan kabupaten/kota yang masuk ke dalam Kawasan Pantura Jawa Barat.

Jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu selama lima tahun dari tahun 1999 yang jumlah penduduknya sebesar 1.077.166 jiwa sampai dengan tahun 2003 yang jumlah penduduknya sebesar 1.073.606, mengalami penurunan sebesar -0,33 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.30.

Tabel 3.30
Jumlah Penduduk Kabupaten Indramayu
Yang Termasuk Pada Kawasan Pantura Jawa Barat
Tahun 1999-2003 (Jiwa)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER TAHUN				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Sukra	86.966	86.606	86.843	87.389	91.969
2	Jatibarang	68.378	68.441	68.376	68.858	69.470
3	Anjatan	86.438	85.147	88.143	88.500	89.415
4	Juntiyuat	81.193	81.161	81.411	81.915	84.889
5	Bongas	43.635	43.354	43.533	43.801	44.740
6	Karangampel	100.924	103.028	103.306	104.044	106.235
7	Kandanghaur	80.170	80.205	80.423	80.925	83.213
8	Gabuswetan	51.472	51.945	52.357	52.758	57.043
9	Losarang	51.545	51.644	51.677	52.002	55.021
10	Lohbener	82.340	83.027	52.351	52.698	52.713
11	Indramayu	97.584	103.243	104.126	104.842	107.617
12	Lelea	46.488	46.050	46.214	46.690	47.166
13	Widasari	52.502	52.987	53.070	53.414	54.413
14	Sliyeg	69.103	66.929	67.192	67.610	69.194
15	Sindang	78.428	80.284	57.527	57.848	60.502
Jumlah Penduduk		1.077.166	1.084.051	1.036.549	1.043.294	1.073.600

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

E. Kabupaten Cirebon

Dilihat dari jumlah penduduknya Kabupaten Cirebon termasuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk tinggi di bandingkan dengan kabupaten/kota yang masuk ke dalam Kawasan Pantura Jawa Barat.

Jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon selama lima tahun dari tahun 1999 yang jumlah penduduknya sebesar 1.545.423 jiwa sampai dengan tahun 2003 yang jumlah penduduknya sebesar 1.289.156, mengalami penurunan sebesar -16,58 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.31.

Tabel 3.31
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon
Yang Termasuk Pada Kawasan Pantura Jawa Barat
Tahun 1999-2003 (Jiwa)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER TAHUN				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Susukan	59.251	60.963	63.407	63.362	63.699
2	Gegesik	99.362	61.746	62.075	62.402	67.003
3	Kapetakan	94.603	101.134	101.548	101.844	93.267
4	Arjawinangun	85.711	51.629	51.221	51.181	59.798
5	Klangenan	82.832	84.919	85.032	85.805	86.346
6	Ciwaringin	58.401	62.682	65.060	65.583	55.004
7	Palimanan	83.911	85.203	85.561	88.081	78.536
8	Plumbon	123.699	131.105	132.257	133.126	68.838
9	Weru	119.906	126.646	127.340	125.394	101.225
10	Cirebon Utara	66.138	74.130	74.407	74.901	75.527
11	Cirebon Barat	78.664	86.899	87.601	84.088	84.399
12	Astanajapura	121.672	92.414	93.610	94.288	91.625
13	Karang Sembung	71.442	72.207	72.637	74.602	61.654
14	Babakan	118.792	120.444	121.898	122.893	67.201
15	Losari	84.932	53.675	51.454	51.891	53.076
16	Cirebon Selatan	51.470	55.706	56.379	56.809	48.804
17	Mundu	52.435	55.127	55.301	55.253	58.116
18	Ciledug	92.202	91.071	93.362	95.013	75.038
Jumlah Penduduk		1.545.423	1.467.700	1.480.150	1.486.516	1.289.156

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

F. Kota Cirebon

Dilihat dari jumlah penduduknya Kota Cirebon termasuk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk rendah di bandingkan dengan kabupaten/kota yang masuk ke dalam Kawasan Pantura Jawa Barat.

Jumlah penduduk di Kota Cirebon selama lima tahun dari tahun 1999 yang jumlah penduduknya sebesar 252.268 jiwa sampai dengan tahun 2003 yang jumlah penduduknya sebesar 265.445, mengalami kenaikan sebesar 5.22 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.32.

Tabel 3.32
Jumlah Penduduk Kota Cirebon
Yang Termasuk Pada Kawasan Pantura Jawa Barat
Tahun 1999-2003 (Jiwa)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER TAHUN				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Kejaksan	38.954	41.260	38.429	40.710	41.119
2	Kesambi	62.015	63.617	62.277	62.481	62.225
3	Pekalipan	33.775	31.929	31.115	31.481	31.651
4	Lemahwukuk	45.361	50.096	44.574	45.802	46.232
5	Harjamukti	72.163	85.361	72.968	76.423	84.218
Jumlah Penduduk		252.268	272.263	249.363	256.897	265.445

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

G. Kawasan Pantura

Penduduk yang terdapat di Kawasan Pantura dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (1999 – 2003) sebanyak 5.136.638 jiwa. Kabupaten yang termasuk kedalam Kawasan Pantura yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu Kabupaten Karawang sebanyak 1.423.511 jiwa atau 27,71 % dari total keseluruhan pada tahun 2003 dan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah yaitu Kabupaten Bekasi sebanyak 243.997 jiwa atau 4,75 % pada tahun 2003.

Untuk mengetahui jumlah penduduk masing-masing kabupaten yang terdapat di Kawasan Pantura Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel 3.33

Tabel 3.33
Jumlah Penduduk Di Kawasan Pantura Tahun 1999 – 2003 (Jiwa)

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PENDUDUK PER TAHUN				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Kabupaten Bekasi	186.579	199.304	183.782	215.430	243.997
2	Kabupaten Karawang	1.491.240	1.521.650	1.523.540	1.586.325	1.423.511
3	Kabupaten Indramayu	1.077.166	1.084.051	1.036.549	1.043.294	1.073.600
4	Kabupaten Subang	781.249	784.337	830.791	836.325	840.929
5	Kabupaten Cirebon	1.545.423	1.467.700	1.480.150	1.486.516	1.289.156
6	Kota Cirebon	252.268	272.263	249.363	256.897	265.445
Jumlah Penduduk Pantura		5.333.925	5.329.305	5.304.175	5.424.787	5.136.638

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

3.7.2 Karakteristik Tenaga Kerja

Dalam teori demografi tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu penduduk yang dapat memproduksi barang dan jasa biasanya merupakan penduduk yang berumur 15-64 tahun. Akan tetapi dalam pengembangan konsep penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, sedang untuk penduduk usia antara 15-64 tahun didefinisikan sebagai penduduk usia produktif. Sehingga faktor tenaga kerja dapat diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yaitu penduduk berusia 10 tahun atau lebih.

Saat ini ketenagakerjaan merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh kota serta kabupaten seiring dengan jumlah penduduk yang dari tahun ke tahunnya bertambah sementara perkembangan sektor ekonomi belum mampu mengimbangi. Bagaimanapun penduduk merupakan asset dalam pembangunan, karena itu perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja yang diarahkan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia harus ditingkatkan kemampuan produktifitasnya, erat kaitannya dengan pemanfaatan kemampuan sumber daya manusia itu sendiri. Karenanya, pengembangan tenaga kerja merupakan usaha untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan penduduk agar dapat lebih efektif melakukan pekerjaannya.

Angkatan kerja adalah sebagian penduduk dalam usia kerja (tenaga kerja) yang mempunyai pekerjaan atau yang tidak memiliki pekerjaan tetapi baik secara aktif ataupun pasif sedang mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja dalam suatu daerah pada suatu waktu tertentu tergantung dari jumlah penduduk usia kerja.

Perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka cenderung akan semakin besar pula jumlah angkatan kerja.

Sedangkan di Kawasan Pantura sendiri terdapat beragam jenis kegiatan, yang tiap-tiap wilayahnya memiliki sektor usaha yang berbeda. Kawasan Pantura merupakan daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian.

Tenaga kerja tidak hanya dapat diketahui menurut usia serta angkatan kerja, tetapi dapat diketahui dari jenis lapangan usahanya. Jenis lapangan usaha terdiri dari 9 sektor dapat dilihat pada tabel 3.34.

Tabel 3.34
Jenis Lapangan Usaha

Sektor Usaha	
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan Dan Perikanan
2.	Pertambangan Dan Penggalian
3.	Industri Pengolahan
4.	Listrik, Gas Dan Air Bersih
5.	Bangunan
6.	Perdagangan, Hotel Dan Restoran
7.	Pengangkutan Dan Komunikasi
8.	Keuangan Dan Persewaan
9.	Jasa – Jasa

Sumber : Data BPS

A. Kabupaten Bekasi

Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terdapat di Kabupaten Bekasi pada tahun 1999, sektor Industri pengolahan yang memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan delapan sektor yang terdapat pada lapangan usaha sebesar 27.883 jiwa dan pada tahun 2002 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 49.703 jiwa mengalami kenaikan sebesar 78,2 %, sedangkan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 mengalami penurunan sebesar -28,9 %.

Untuk jumlah tenaga kerja keseluruhan (sembilan sektor) pada tahun 1999 sebesar 104.169 jiwa sampai dengan tahun 2003 sebesar 155.113 jiwa mengalami kenaikan sebesar 48,9 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 3.35
Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Yang Termasuk Dalam Kawasan Pantura Menurut Lapangan Usaha Tahun 1999 – 2003 (Jiwa)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	13.646	16.072	18.396	21.914	25.831
2	Pertambangan dan Penggalian	8.042	8.735	10.760	11.284	12.374
3	Industri Pengolahan	27.883	30.470	37.282	49.703	35.311
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.074	1.240	1.767	1.891	2.188
5	Bangunan	3.551	3.989	3.866	4.229	6.830
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14.408	15.917	17.023	19.228	30.227
7	Pengangkutan dan Komunikasi	12.245	13.757	14.409	17.517	19.244
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2.444	2.589	2.812	3.309	3.963

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		1999	2000	2001	2002	2003
9	Jasa-jasa	20.877	21.205	21.198	21.708	19.163
Total Tenaga Kerja		104.169	113.974	127.512	150.785	155.133

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 1999-2003

B. Kabupaten Karawang

Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terdapat di Kabupaten Karawang pada tahun 1999, sektor pertanian yang memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan delapan sektor yang terdapat pada lapangan usaha sebesar 150.093 jiwa dan pada tahun 2003 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 183.172 jiwa mengalami kenaikan sebesar 22 %.

Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja keseluruhan (sembilan sektor) pada tahun 1999 sebesar 441.752 jiwa sampai dengan tahun 2003 sebesar 543.982 jiwa mengalami kenaikan sebesar 23,4 %.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 3.36
Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Karawang Yang Termasuk Dalam
Kawasan Pantura Menurut Lapangan Usaha
Tahun 1999 – 2003 (Jiwa)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	150.093	152.680	163.824	170.477	183.172
2	Pertambangan dan Penggalian	1.241	1.362	1.472	1.572	1.795
3	Industri Pengolahan	83.068	92.190	98.024	106.784	117.881
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.787	19.449	2.106	2.337	2.674
5	Bangunan	13.267	14.064	14.588	15.228	17.022
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	119.618	122.697	126.377	131.352	135.486
7	Pengangkutan dan Komunikasi	28.122	29.761	30.757	33.605	35.456
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.655	2.430	2.611	3.116	3.421
9	Jasa-jasa	42.903	43.592	44.104	45.917	47.075
Total Tenaga Kerja		441.752	478.224	483.864	510.388	543.982

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 1999-2003

C. Kabupaten Subang

Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terdapat di Kabupaten Subang pada tahun 1999 sektor pertanian yang memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan delapan sektor yang terdapat pada lapangan usaha sebesar

193.005 jiwa dan pada tahun 2003 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 207.670 jiwa mengalami kenaikan sebesar 7,6%.

Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja keseluruhan (sembilan sektor) pada tahun 1999 sebesar 345.262 jiwa sampai dengan tahun 2003 sebesar 359.139 jiwa mengalami kenaikan sebesar 4 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.37.

Tabel 3.37
Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Subang Yang Termasuk Dalam
Kawasan Pantura Menurut Lapangan Usaha
Tahun 1999 – 2003 (Jiwa)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	193.005	179.119	193.257	176.149	207.670
2	Pertambangan dan Penggalian	1.968	722	509	1.263	639
3	Industri Pengolahan	15.307	17.022	22.650	26.911	18.786
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	383	970	255	547	665
5	Bangunan	12.683	12.033	13.999	16.738	13.973
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	73.478	77.617	63.371	66.139	68.827
7	Pengangkutan dan Komunikasi	18.803	21.331	16.034	27.617	24.847
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.530	1.197	2.546	2.079	1.842
9	Jasa-jasa	28.104	21.565	23.917	26.453	21.891
Total Tenaga Kerja		345.262	331.576	336.539	343.896	359.139

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 1999-2003

D. Kabupaten Indramayu

Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terdapat di Kabupaten Indramayu pada tahun 1999 sektor pertanian yang memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan delapan sektor yang terdapat pada lapangan usaha sebesar 222.948 jiwa dan pada tahun 2003 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 254.017 jiwa mengalami kenaikan sebesar 14 %.

Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja keseluruhan (sembilan sektor) pada tahun 1999 sebesar 420.396 jiwa sampai dengan tahun 2003 sebesar 481.822 jiwa mengalami kenaikan sebesar 15 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.38.

Tabel 3.38
Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Yang Termasuk Dalam
Kawasan Pantura Menurut Lapangan Usaha Tahun 1999 – 2003 (Jiwa)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	222.948	237.255	251.344	252.661	254.017
2	Pertambangan dan Penggalian	6.585	6.945	7.082	7.314	7.405
3	Industri Pengolahan	31.562	31.697	31.815	32.468	32.979
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	284	301	350	352	370

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		1999	2000	2001	2002	2003
5	Bangunan	8.569	8.252	9.363	9.129	9.256
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	83.508	86.344	89.925	90.513	91.487
7	Pengangkutan dan Komunikasi	31.348	35.756	38.875	41.435	42.224
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	689	875	920	1.025	1.112
9	Jasa-jasa	34.904	36.755	38.025	40.631	42.974
Total Tenaga Kerja		420.396	444.180	467.699	475.528	481.822

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 1999-2003

E. Kabupaten Cirebon

Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terdapat di Kabupaten Cirebon pada tahun 1999 sektor pertanian yang memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan delapan sektor yang terdapat pada lapangan usaha sebesar 178.098 jiwa dan pada tahun 2003 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 180.242 jiwa mengalami kenaikan sebesar 1,2%. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja keseluruhan (sembilan sektor) pada tahun 1999 sebesar 435.188 jiwa sampai dengan tahun 2003 sebesar 461.498 jiwa mengalami kenaikan sebesar 6 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.39.

Tabel 3.39
Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon Yang Termasuk Dalam Kawasan Pantura Menurut Lapangan Usaha Tahun 1999 – 2003 (Jiwa)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	178.098	178.274	178.518	179.838	180.242
2	Pertambangan dan Penggalian	2.165	2.454	2.547	2.627	2.671
3	Industri Pengolahan	52.813	53.148	52.617	52.743	52.966
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	258	336	345	351	361
5	Bangunan	19.353	19.891	20.919	21.185	21.629
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	107.552	112.541	111.051	115.887	120.533
7	Pengangkutan dan Komunikasi	30.299	30.337	30.591	30.051	31.499
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	995	1.077	1.221	1.195	1.226
9	Jasa-jasa	43.654	44.631	49.257	49.485	50.371
Total Tenaga Kerja		435.188	442.689	447.068	453.363	461.498

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 1999-2003

F. Kota Cirebon

Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terdapat di Kota Cirebon pada tahun 1999 sektor perdagangan yang memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan delapan sektor yang terdapat pada lapangan usaha sebesar

37.726 jiwa dan pada tahun 2002 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 41.263 jiwa mengalami kenaikan sebesar 9 %.

Sedangkan untuk jumlah tenaga kerja keseluruhan (sembilan sektor) pada tahun 1999 sebesar 85.474 jiwa sampai dengan tahun 2003 sebesar 107.885 jiwa mengalami kenaikan sebesar 26,3 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.40.

Tabel 3.40
Jumlah Tenaga Kerja Kota Cirebon Yang Termasuk Dalam
Kawasan Pantura Menurut Lapangan Usaha
Tahun 1999 – 2003 (Jiwa)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		1999	2000	2001	2002	2003
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.884	1.825	1.924	2.136	3.467
2	Pertambangan dan Penggalian	199	214	205	226	385
3	Industri Pengolahan	6.591	7.862	9.084	9.342	9.834
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	692	724	795	849	968
5	Bangunan	9.084	9.275	9.836	10.350	9.293
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	37.726	39.026	40.328	41.263	38.068
7	Pengangkutan dan Komunikasi	8.827	9.445	10.723	12.815	14.869
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2.258	2.792	3.150	2.693	4.974
9	Jasa-jasa	18.213	18.836	19.384	21.793	26.027
Total Tenaga Kerja		85.474	89.999	95.429	101.467	107.885

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka Tahun 1999-2003

G. Kawasan Pantura

Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terdapat di Kawasan Pantura Jawa Barat sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki tenaga kerja dibandingkan dengan delapan sektor yang terdapat pada lapangan usaha. Pada tahun 1999 sektor pertanian yang memiliki jumlah tenaga kerja sebesar 759.674 jiwa dan pada tahun 2003 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 854.399 jiwa mengalami kenaikan sebesar 12,5 %. Sedangkan jumlah tenaga kerja terendah pada sektor listrik, gas dan air bersih, yang jumlah tenaga kerja pada tahun 1999 sebesar 4.478 jiwa dan pada tahun 2003 sebesar 7.227 jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 61 %.

Untuk jumlah tenaga kerja keseluruhan (sembilan sektor) pada tahun 1999 sebesar 1.832.241 jiwa sampai dengan tahun 2003 sebesar 2.104.459 jiwa, yang mengalami kenaikan sebesar 14,8 %. Jumlah tenaga kerja di Kawasan Pantura dapat dilihat pada tabel 3.41.

Tabel 3.41
Jumlah Tenaga Kerja Per Lapangan Usaha Di Kawasan Pantura
Tahun 1999 - 2003 (Jiwa)

LAPANGAN USAHA	KAWASAN PANTURA				
	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	759.674	765.226	807.263	803.175	854.399
2. Pertambangan dan Penggalian	20.199	20.431	22.576	24.287	26.269
3. Industri Pengolahan	217.224	232.390	251.472	277.951	267.758
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4.478	5.519	5.617	6.327	7.227
5. Bangunan	66.508	67.504	72.572	76.859	78.003
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	436.290	454.142	448.076	464.382	484.627
7. Pengangkutan dan Komunikasi	129.644	140.387	141.389	163.040	162.138
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	9.570	10.960	13.260	13.417	16.538
9. Jasa-jasa	188.654	186.584	195.885	205.987	207.500
TOTAL KAWASAN PANTURA	1.832.241	1.883.142	1.958.110	2.035.427	2.104.459

Sumber : Data BPS,

3.7.3 Karakteristik Perekonomian Per Kabupaten/Kota

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai yang mencerminkan kemampuan suatu daerah atau wilayah tertentu dalam menghasilkan produk dari daerahnya. Tinggi rendahnya Produk Domestik Regional Bruto ini dapat membantu memberikan gambaran umum kondisi perekonomian daerah beserta produk unggulan yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang.

PDRB per kapita suatu wilayah menunjukkan kemampuan wilayah tersebut menghasilkan pendapatan tiap penduduk pada tahun yang bersangkutan, tetapi pendapatan tersebut belum tentu semuanya merupakan pendapatan yang diterima oleh seluruh penduduk mengingat belum mencerminkan adanya distribusi pendapatan. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil bagi antara pendapatan regional dengan penduduk pertengahan tahun. Mengenai PDRB kabupaten/kota yang terdapat dalam Kawasan Pantura dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

A. Kabupaten Bekasi

Pertumbuhan ekonomi dilihat pada nilai PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Bekasi, sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki nilai PDRB terbesar dibandingkan dengan delapan sektor lainnya yang pada tahun 1999 nilai PDRB sebesar Rp 70.876,85 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 113.617,66 juta, yang mengalami kenaikan selama lima tahun sebesar 60,3%. Sedangkan yang terendah yaitu sektor pertambangan pada tahun 2000 nilai PDRB sebesar Rp 2.189,55 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 2.529,52 mengalami kenaikan sebesar 15,5%.

Untuk total nilai PDRB keseluruhan yaitu pada tahun 1999 sebesar Rp 188.942,52 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 356.357,67 juta yang mengalami kenaikan sebesar 88,6%. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.42.

Tabel 3.42
PDRB Kabupaten Bekasi Yang Termasuk Dalam Kawasan Pantura
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 1999 - 2003 (Juta)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	44.242,66	52.201,81	51.990,82	52.726,82	52.749,33
2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	2.189,55	2.234,02	2.373,20	2.529,52
3. Industri Pengolahan	31.362,91	69.961,11	73.133,57	78.921,90	81.181,33
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4.410,43	17.272,34	17.825,79	18.562,37	19.521,64
5. Bangunan	11.206,30	17.466,80	17.872,42	18.290,65	18.991,89
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	70.876,85	98.131,01	101.338,59	105.169,23	113.617,66
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9.249,71	16.078,43	17.152,07	18.303,84	19.544,98
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	10.570,44	9.789,28	10.415,65	10.973,98	11.630,06
9. Jasa-jasa	25.023,24	29.301,87	31.495,23	33.898,89	36.591,26
TOTAL PDRB	188.942,54	312.392,20	323.458,16	339.220,88	356.357,67

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

B. Kabupaten Karawang

Pertumbuhan ekonomi dilihat pada nilai PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Karawang, sektor industri merupakan sektor yang memiliki nilai PDRB terbesar dibandingkan dengan delapan sektor lainnya yang pada tahun 1999 nilai PDRB sebesar Rp 608.658,75 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 930.167,25 juta, yang mengalami kenaikan selama lima tahun sebesar 52,8%. Sedangkan yang terendah yaitu sektor pertambangan pada tahun 1999 nilai PDRB sebesar Rp 7.941 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 17.754,75 juta, yang

mengalami kenaikan sebesar 123,5%. Untuk total nilai PDRB keseluruhan yaitu pada tahun 1999 sebesar Rp 1.858.512 miliar dan pada tahun 2003 sebesar Rp 2.482.263,75 miliar yang mengalami kenaikan sebesar 33,5%. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.43.

Tabel 3.43
PDRB Kabupaten Karawang Yang Termasuk Dalam Kawasan Pantura
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 1999 - 2003 (Juta)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	318.639,00	351.981,59	402.849,75	379.578,75	363.339,75
2. Pertambangan dan Penggalian	7.941,00	7.609,50	10.084,75	13.496,25	17.754,75
3. Industri Pengolahan	608.658,75	747.507,75	797.895,75	860.928,75	930.167,25
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	60.803,25	69.216,75	74.938,35	87.558,00	78.917,25
5. Bangunan	54.644,25	57.862,80	61.409,25	64.599,00	67.377,00
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	488.249,25	522.144,37	532.276,50	595.131,00	636.446,25
7. Pengangkutan dan Komunikasi	122.916,75	127.865,06	137.301,62	146.097,75	152.276,25
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	21.348,00	33.569,93	37.409,25	39.145,50	40.754,25
9. Jasa-jasa	175.311,75	177.733,01	180.110,79	187.436,25	195.231,00
TOTAL PDRB	1.858.512,00	2.095.490,75	2.234.276,00	2.373.971,25	2.482.263,75

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

C. Kabupaten Subang

Pertumbuhan ekonomi dilihat pada nilai PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Subang, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki nilai PDRB terbesar dibandingkan dengan delapan sektor lainnya yang pada tahun 1999 nilai PDRB sebesar Rp 480.214 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 516.133,38 juta, yang mengalami kenaikan selama lima tahun sebesar 7,5%. Sedangkan yang terendah yaitu sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 1999 nilai PDRB sebesar Rp 7.056 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 12.044,4 juta, yang mengalami kenaikan sebesar 70,7%.

Untuk total nilai PDRB keseluruhan yaitu pada tahun 1999 sebesar Rp1.042.199 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 1.258.043 juta yang mengalami kenaikan sebesar 20,7%. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.44.

Tabel 3.44
PDRB Kabupaten Subang Yang Termasuk Dalam Kawasan Pantura
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 1999 - 2003 (Juta)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	480.214,00	497.391,00	492.400,00	507.750,14	516.133,38
2. Pertambangan dan Penggalian	9.503,00	9.302,00	8.535,00	44.924,88	54.002,44
3. Industri Pengolahan	39.252,00	40.319,00	40.901,00	41.646,43	42.296,23
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	7.056,00	8.844,00	9.609,00	10.753,70	12.044,40
5. Bangunan	38.160,00	39.040,00	42.973,00	44.136,86	45.902,51
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	316.008,00	333.354,00	347.197,00	376.946,07	401.628,41
7. Pengangkutan dan Komunikasi	28.517,00	28.729,00	35.236,00	37.260,30	40.120,16
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	13.792,00	15.932,00	17.130,00	14.625,71	15.637,59
9. Jasa-jasa	103.877,00	109.101,00	128.203,00	114.694,34	123.514,41
TOTAL PDRB	1.042.199,00	1.088.224,00	1.128.830,00	1.199.018,92	1.258.043,00

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

D. Kabupaten Indramayu

Pertumbuhan ekonomi dilihat pada nilai PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Indramayu, sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki nilai PDRB terbesar dibandingkan dengan delapan sektor lainnya yang pada tahun 1999 nilai PDRB sebesar Rp 1.982.988,28 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 2.008.538,02 juta, yang mengalami kenaikan selama lima tahun sebesar 1,3 %. Sedangkan yang terendah yaitu sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 1999 nilai PDRB sebesar Rp 21.038,88 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 24.153,67 juta, yang mengalami kenaikan sebesar 14,8 %.

Untuk total nilai PDRB keseluruhan yaitu pada tahun 1999 sebesar Rp 3.180.496,68 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 3.418.538,31 juta yang

mengalami kenaikan sebesar 7,5%. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.45.

Tabel 3.45
PDRB Kabupaten Indramayu Yang Termasuk Dalam Kawasan Pantura
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 1999 - 2003 (Juta)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	486.433,25	497.190,49	514.414,86	515.419,42	513.635,65
2. Pertambangan dan Penggalian	1.982.988,28	1.899.796,28	1.935.099,39	2.005.453,23	2.008.538,02
3. Industri Pengolahan	70.484,56	70.844,05	66.864,70	71.364,97	75.183,41
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	21.038,88	22.097,98	22.482,17	23.257,17	24.153,67
5. Bangunan	24.121,16	24.649,39	26.779,60	36.217,99	37.004,09
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	309.822,15	326.280,30	346.858,31	371.872,46	404.515,68
7. Pengangkutan dan Komunikasi	90.717,37	99.091,26	102.967,69	110.190,53	122.892,13
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	39.926,97	48.055,39	49.943,70	51.064,16	55.455,51
9. Jasa-jasa	141.648,48	144.420,01	148.730,22	151.944,37	161.923,82
TOTAL PDRB	3.180.496,68	3.146.027,63	3.228.135,52	3.351.081,61	3.418.538,31

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

E. Kabupaten Cirebon

Pertumbuhan ekonomi dilihat pada nilai PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Cirebon, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki nilai PDRB terbesar dibandingkan dengan delapan sektor lainnya yang pada tahun 1999 nilai PDRB sebesar Rp 297.321,92 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 449.789,06 juta, yang mengalami kenaikan selama lima tahun sebesar 51,3%. Sedangkan yang terendah yaitu sektor pertambangan pada tahun 1999 nilai PDRB sebesar Rp 5.208,55 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 6.284,91 juta, yang mengalami kenaikan sebesar 20,7%.

Untuk total nilai PDRB keseluruhan yaitu pada tahun 1999 sebesar Rp 1.272.521,25 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 1.611.004,88 juta yang mengalami kenaikan sebesar 26,6%. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.46.

Tabel 3.46
PDRB Kabupaten Cirebon Yang Termasuk Dalam Kawasan Pantura
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 1999 - 2003 (Juta)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	297.321,92	314.353,29	451.877,16	459.272,19	449.789,06
2. Pertambangan dan Penggalian	5.208,55	5.450,40	5.699,06	5.952,67	6.284,91
3. Industri Pengolahan	166.628,16	173.588,31	180.435,26	192.740,95	202.231,76
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	32.575,13	34.690,15	37.802,68	40.900,91	43.462,59
5. Bangunan	104.189,73	107.805,28	109.555,04	114.912,28	122.455,27
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	272.772,74	279.716,06	287.606,31	301.288,13	315.784,60
7. Pengangkutan dan Komunikasi	105.520,87	112.453,77	116.416,82	122.622,76	130.206,64
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	88.329,72	92.432,90	96.207,64	100.802,21	106.567,43
9. Jasa-jasa	195.196,67	200.804,44	208.379,89	217.501,99	228.626,62
TOTAL PDRB	1.272.521,25	1.326.209,61	1.499.080,31	1.561.317,81	1.611.004,88

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

F. Kota Cirebon

Pertumbuhan ekonomi dilihat pada nilai PDRB atas dasar harga konstan pada Kabupaten Cirebon, sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang memiliki nilai PDRB terbesar dibandingkan dengan delapan sektor lainnya yang pada tahun 1999 nilai PDRB sebesar Rp 395.258,87 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 471.500,86 juta, yang mengalami kenaikan selama lima tahun sebesar 19,3%. Sedangkan yang terendah yaitu sektor pertambangan tidak memiliki nilai, dikarenakan di Kota Cirebon tidak memiliki wilayah penambangan.

Untuk total nilai PDRB keseluruhan yaitu pada tahun 1999 sebesar Rp 1.240.699,36 juta dan pada tahun 2003 sebesar Rp 1.593.418,97 juta yang mengalami kenaikan sebesar 28,4%. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.47.

Tabel 3.47
PDRB Kota Cirebon Yang Termasuk Dalam Kawasan Pantura
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 1999 - 2003 (Juta)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	4.378,80	4.588,71	4.575,68	4.681,89	5.007,45
2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Industri Pengolahan	384.272,50	402.081,02	478.597,04	502.431,17	521.220,70
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	26.574,22	30.431,46	33.697,67	34.608,06	37.197,34
5. Bangunan	50.788,78	54.213,05	55.877,39	58.268,94	61.944,76
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	395.258,87	420.785,78	435.743,95	455.247,46	471.500,86
7. Pengangkutan dan Komunikasi	207.472,16	218.890,82	265.590,22	271.572,59	287.441,25
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	66.605,32	32.926,20	75.171,28	79.186,26	83.388,92
9. Jasa-jasa	105.348,71	105.455,76	113.087,93	120.101,73	125.717,69
TOTAL PDRB	1.240.699,36	1.269.372,80	1.462.341,16	1.526.098,10	1.593.418,97

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

G. Karakteristik Perekonomian Di Kawasan Pantura

Pertumbuhan ekonomi dilihat pada nilai PDRB atas dasar harga konstan Kawasan Pantura, yang rata-rata tiap tahunnya mengalami kenaikan. Secara sektoral peranan sektor pertanian, pertambangan, industri dan perdagangan masih merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap total PDRB atas dasar harga konstan, dilihat dari akhir tahun 2003 masing-masing sektor memiliki nilai PDRB sebesar 17,78 %, pada sektor pertanian, sektor pertambangan sebesar 19,54 % dikarenakan terdapat eksplorasi minyak dan gas milik negara yang terdapat di Kabupaten Indramayu, sedangkan pada sektor industri sebesar 17,32 %, dan sektor tertinggi yaitu pada sektor perdagangan sebesar 21,92 % pada tahun 2003.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam PDRB Kawasan Pantura Jawa Barat :

1. PDRB tahun 1999-2003 pada umumnya mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada

tiap-tiap sektor usaha akibat adanya krisis ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Peranan sektor pertanian pada tahun 2002-2003 mengalami penurunan, sedangkan sektor industri mengalami peningkatan yang merata dimulai pada tahun 1999 sampai 2003. Hal ini mengindikasikan adanya transformasi struktur perekonomian.
3. Pada tahun 1999-2003 nilai PDRB sangat dipengaruhi oleh sektor ini, terjadinya peningkatan peranan sektor perdagangan yang sangat tinggi, dikarenakan sektor ini memiliki perputaran ekonomi yang sangat cepat
4. Nilai PDRB pada sektor pertambangan dan penggalian didominasi oleh Kabupaten Indramayu yang hampir 96 % disumbang dari kabupaten tersebut.

Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.48.

Tabel 3.48
PDRB Kawasan Pantura Atas Dasar Harga Konstan 1993
Menurut Lapangan Usaha Tahun 1999 - 2003 (Juta)

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.631.229,63	1.717.706,89	1.918.108,27	1.919.429,22	1.900.654,62
2. Pertambangan dan Penggalian	2.005.640,83	1.924.347,73	1.961.652,22	2.072.200,23	2.089.109,64
3. Industri Pengolahan	1.282.658,88	1.580.817,26	1.637.827,33	1.748.034,17	1.852.280,69
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	152.457,91	182.552,68	196.355,66	215.640,21	215.296,88
5. Bangunan	283.110,22	301.037,32	314.466,70	336.425,71	353.675,51
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.852.987,86	1.980.411,51	2.051.020,66	2.205.654,36	2.343.493,46
7. Pengangkutan dan Komunikasi	564.393,86	603.108,34	674.664,42	706.047,77	752.481,41
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	240.572,45	232.705,69	286.277,53	295.797,82	313.433,76
9. Jasa-jasa	746.405,85	766.816,09	810.007,06	825.577,57	871.604,80
TOTAL PDRB	8.759.457,49	9.289.503,52	9.850.379,84	10.324.807,05	10.692.030,78

Sumber : Data BPS, Kabupaten Dalam Angka 1999-2003

3.8 Gambaran Aspek Pengendalian di Kawasan Pantura

3.8.1 Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pantura

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya

tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan unsur pemerintah yang mempunyai fungsi pengawasan, dunia usaha, para pakar, organisasi profesi dan *NGO* (organisasi non pemerintah).

Objek pengendalian yang dilakukan oleh tingkat propinsi mulai dari program, proyek, perijinan yang menjadi kewenangan propinsi dan kebijakan yang terkait dengan penataan ruang. Subyek pengendalian meliputi komponen yang berkaitan dengan struktur ruang seperti penetapan sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, kawasan andalan dan kawasan lindung, serta pemanfaatan ruang yang meliputi kawasan lindung 45% dan kawasan budidaya lahan sawah. Keseluruhan proses ini harus melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Dari arahan kebijaksanaan tata ruang nasional (RTRWN PP 47/1997), tampak jelas bahwa wilayah Pantura Jabar (Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon) mempunyai peranan ganda. Yaitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan sektor industri sebagai sektor unggulan dan sebagai sentra produksi tanaman pangan (padi) untuk menunjang keberlanjutan swasembada pangan.

Namun pada perkembangannya, ternyata sektor pertanian cenderung tergeser oleh sektor industri. Kebutuhan akan tersedianya tanah (lahan) untuk keperluan kegiatan sektor industri telah menyebabkan konversi lahan pertanian sawah ke penggunaan kegiatan industri, dan diikuti dengan adanya kegiatan untuk sektor pemukiman skala besar.

Dari data yang ada (hasil sensus pertanian BPS) dalam kurun waktu 1983-1995, khusus untuk lahan pertanian sawah beririgasi teknis di wilayah Pantura

Jabar, menunjukkan konversi seluas 16.690 hektare (5.560 ha per tahun). Sebagian besar lahan sawah itu berubah menjadi perumahan (32 perumahan) dan industri (48 persen).

Dengan adanya konversi lahan sawah yang terjadi di wilayah Pantura Jabar, terdapat pula kecenderungan penyusutan luas panen dari 11,61 persen (1984) terhadap produksi padi nasional menjadi 10,52 persen (1994). Dampaknya, pada 1988-1994 terjadi penyusutan luas panen sebesar 74.987 hektare atau rata-rata sekitar 12.500 hektare per tahun. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab penurunan produksi padi nasional secara keseluruhan pada kurun 1988-1994 sebesar 240.158 ton.

Perubahan yang terjadi di Kawasan Pantura ini diakibatkan oleh adanya kebijakan dan peraturan dari pemerintah seperti Keppres No 53/1989 tentang Kawasan Industri dan Kebijakan Deregulasi Pakto-23 (1993) tentang Kemudahan Proses Izin Lokasi yang telah menyebabkan kenaikan yang sangat pesat dalam permohonan izin lokasi untuk industri dan perumahan.

Sedangkan kebijakan pemerintah lainya tentang pencegahan atau pengendalian konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yaitu Keppres No 33/1990 yang intinya menyebutkan pembangunan kawasan industri tidak boleh menggunakan kawasan pertanian lahan sawah beririgasi teknis dan lahan yang dicadangkan untuk usaha tani. Namun, dalam implementasinya, kebijakan itu tidak berjalan. Penerapan penegakan kebijakan atau peraturan yang lemah menyebabkan kecenderungan konversi lahan pertanian di masa depan akan terus berjalan. Selain itu perubahan alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan Pantura saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adanya faktor pendukung internal dan eksternal. Faktor-faktor eksternal yang terkait dengan dinamika pertumbuhan wilayah yang pesat baik ditinjau dari aspek fisik spasial, sosial, ekonomi maupun kelembagaan. Perubahan yang terjadi tentunya harus diatur dalam suatu peraturan, berdasarkan manajemen pengendalian penggunaan lahan atau perlunya pengaturan dari sistem mekanisme pengendalian perubahan alih fungsi lahan di Kawasan Pantura. Kecenderungan dan pola spasial alih fungsi lahan sawah yang telah terjadi selama ini di Kawasan Pantura Jawa Barat secara makro-spasial dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang terkait dengan

dinamika pertumbuhan wilayah yang pesat baik ditinjau dari aspek fisik /penggunaan lahan, potensi ekonomi maupun kelembagaan

A. Permasalahan Eksternal

Adanya kecenderungan alih fungsi lahan sawah selama ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijaksanaan pemerintah yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan/atau pertanahan :

- **Privatisasi Pembangunan Kawasan Industri**
Kebijaksanaan privatisasi pembangunan kawasan industri yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 53/1989 telah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan kawasan industri dan memilih lokasinya sesuai dengan mekanisme pasar. Sejak diterbitkannya keppres tersebut telah berdiri 131 perusahaan kawasan industri dengan luas areal 46.133 ha, yang ditinjau dari sebarannya sebagian besar (77,4 %) berlokasi di Pulau Jawa, dengan areal seluas 36.920 ha. Di Pulau Jawa, konsentrasi terbesar kawasan industri terdapat di Jawa Barat (65 buah), dengan luas areal izin lokasi sebesar 25.277 ha, yang sebagian besar terdapat di Kawasan Pantura.
- **Pembangunan Permukiman Skala Besar dan Kota Baru**
Implementasi dari kebijaksanaan ini dapat dilihat dari indikator izin lokasi yang telah dikeluarkan. Ditinjau dari sebarannya, sebagian besar dari permukiman skala besar atau kota baru berada di Pulau Jawa, terutama di Jabotabek dan wilayah Pantura. Mengingat peranan wilayah tersebut merupakan penyangga DKI Jakarta, dapat dipastikan bahwa lahan tersebut berasal dari lahan pertanian, dan sebagian di antaranya adalah lahan sawah produktif. Izin lokasi perumahan yang telah diterbitkan di Jawa Barat sejak 1983-1995 mencakup luas 115.947 ha, yang sebagian besar (81.203 ha) di antaranya berada di wilayah Botabek. Dari luasan tersebut baru 13.275 ha atau sekitar 16,3 % yang sudah terbangun.
- **Deregulasi Investasi dan Perizinan (Pakto-23/1993)**
Di bidang pertanahan, dalam rangka pelaksanaan Pakto-23 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1993, yang pada

intinya memberikan berbagai kemudahan dalam perizinan lokasi. Dengan adanya penyederhanaan atau kemudahan dalam pemrosesan perizinan, maka setelah Pakto-23 tersebut terjadi lonjakan yang sangat besar dalam permohonan izin lokasi untuk kawasan industri, permukiman skala besar maupun kawasan pariwisata. Di Jawa Barat sebagian besar izin lokasi perumahan baru (66 %) yang mencakup 81.203 ha berada di wilayah Botabek yang menjadi penyangga Jakarta.

B. Permasalahan Internal

- Fisik / Penggunaan Lahan di Kawasan Pantura

Berdasarkan kecenderungan luas lahan sawah irigasi teknis di kawasan pantura mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 5 (lima) tahun (1999-2003) yaitu sebesar -4,40% pertahun atau sekitar 10,158 Ha / tahun. Hal ini dikarenakan kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak terkontrol di Kabupaten / Kota Kawasan Pantura Jawa Barat. Sehingga akan terjadi pergeseran lahan dari pertanian ke non pertanian yang menyebabkan perubahan lahan yang cukup signifikan.

- Sektor Perekonomian dan Tenaga Kerja

Secara keseluruhan pada kurun waktu 5 tahun 1999 – 2003, perubahan alih fungsi lahan sawah teknis di Kawasan Pantura mempengaruhi terhadap laju perekonomian dan jumlah tenaga kerja, pada kurun waktu tersebut PDRB mengalami penurunan sebesar 16,8% sedangkan untuk sosial ekonominya sebesar 24,5%.

Sedangkan dalam kebijakan penataan ruang di Kawasan Pantura dimana kawasan tersebut diperuntukan sebagai lahan persawahan, namun pada kenyataannya di kawasan tersebut telah terjadi perubahan luas lahan sawah teknis, hal ini dikarenakan Kawasan Pantura mempunyai peranan ganda, Yaitu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra produksi tanaman pangan (padi) untuk menopang keberlanjutan swasembada pangan. Namun pada perkembangannya, ternyata sektor pertanian cenderung tergeser oleh pembangunan permukiman di Kawasan Pantura.

Kebutuhan akan tersedianya tanah (lahan) untuk keperluan kegiatan permukiman telah menyebabkan konversi lahan pertanian sawah ke penggunaan kegiatan pembangunan permukiman, yang diikuti pula oleh kebutuhan ruang untuk kegiatan lain.

Sumber daya manusia merupakan suatu potensi untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan. Dengan kurangnya SDM maka untuk kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidupnya menjadi sulit. Hal ini terjadi di kawasan pantura yang sebagian besar mereka yang memiliki usia produktif yang cukup tinggi tetapi rendahnya kualitas SDM maka kesempatan kerja semakin kecil. Dengan adanya kebutuhan kesempatan kerja yang cukup tinggi maka kebutuhan ruang akan semakin besar sebagai penyedia.

Secara garis besar dengan adanya alih fungsi lahan maka dapat dikatakan bahwa di daerah pedesaan peralihan tenaga kerja dari sektor yang relatif kurang produktif (pertanian) ke sektor yang dianggap lebih produktif (manufaktur) masih mengalami beberapa hambatan. Gejala yang tampak adalah keluar dari sektor pertanian dan masuk ke sektor jasa yang kurang produktif. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani terutama petani pemilik lahan. Sehingga, kemungkinan besar mereka akan menjual lahannya dengan tujuan untuk dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka

- Kelembagaan

Peranan lembaga-lembaga penunjang pertanian pada umumnya sudah hampir “lumpuh”, dalam pengertian lembaga tersebut hampir tidak bermanfaat langsung dengan petani. Beberapa KUD hampir tidak bisa menampung kualitas pada dari petani yang memang harus memenuhi kriteria teknis tertentu (kekeringan antara lain). Juga mitra-mitra yang lebih berisifat grassroot, dengan adanya suasana reformasi dan demokrasi yang melanda hampir tidak berperan lagi di beberapa daerah. Di lain pihak ada solusi yang lebih bersifat katup pengaman, adalah tengkulak.

Tengkulak memberikan kemudahan-kemudahan dalam persyaratan kualitas ataupun pemberian dana talangan.

Berdasarkan permasalahan eksternal dan internal alih fungsi lahan sawah di Kawasan Pantura Jawa Barat, maka dapat dibuat suatu matriks permasalahannya. Matriks tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49
Matriks Permasalahan Eksternal dan Internal

Eksternal	Internal
<p>Adanya berbagai kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya perubahan alih fungsi lahan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ privatisasi pembangunan kawasan industri ✓ pembangunan permukiman berskala besar dan kota baru ✓ deregulasi investasi dan perizinan. <p>Hal ini dikarenakan lemahnya peraturan dan adanya pertentangan hukum antara yang rendah dengan undang-undang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Fisik / Penggunaan Lahan Adanya kecenderungan luas lahan sawah irigasi teknis di kawasan pantura mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 5 (lima) tahun (1999-2003) yaitu sebesar -4,40% pertahun atau sekitar 10,158 Ha / tahun. • Faktor Sosial Belum terpenuhinya kebutuhan hidup yang mereka peroleh dari sektor pertanian maka ada kecenderungan berpindahnya kepemilikan lahan kepada pihak lain atau swasta, sehingga terjadinya perubahan alih fungsi lahan • Faktor Potensi Sumber Daya Kurangnya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini terjadi di kawasan pantura yang sebagian besar mereka mempunyai usia produktif yang cukup tinggi. • Faktor Kelembagaan Peranan lembaga-lembaga penunjang pertanian pada umumnya sudah hampir “lumpuh”, dalam pengertian lembaga tersebut hampir tidak bermanfaat langsung dengan petani. Beberapa KUD hampir tidak bisa menampung kualitas pada dari petani yang memang harus memenuhi kriteria teknis tertentu (kekeringan antara lain). Juga mitra-mitra yang lebih bersifat grassroot, dengan adanya suasana reformasi dan demokrasi yang melanda hampir tidak berperan lagi di beberapa daerah. Di lain pihak ada solusi yang lebih bersifat katup pengaman, adalah tengkulak. Tengkulak memberikan kemudahan-kemudahan dalam persyaratan kualitas ataupun pemberian dana talangan.

3.8.2 Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dan

penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Pengawasan merupakan usaha-usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Kegiatan pengawasan terdiri dari pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Bentuk pelaporan dalam ketentuan ini adalah kegiatan memberikan informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bentuk pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sedangkan bentuk evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

Penertiban merupakan usaha-usaha untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Tindakan penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk penertiban dapat berupa :

A. Sanksi administrasi dan pembatalan kebijakan daerah.

Penyimpangan yang memerlukan sanksi administrasi dan pembatalan kebijakan dilaporkan oleh TKPRD kepada Gubernur dan ditindaklanjuti oleh Bawasda dan Biro Hukum. Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi administratif dapat berupa :

1. Penghentian sementara pelayanan administratif.
2. Penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan.
3. Denda administratif.
4. Pengurangan luas pemanfaatan ruang.
5. Pencabutan izin pemanfaatan ruang.

B. Sanksi pidana dan perdata

Penyimpangan yang berkaitan dengan tindak pidana dilaporkan oleh TKPRD kepada Gubernur dan diproses lebih lanjut oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik berwenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur didalam rencana tata ruang, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan serta

kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.8.3 Kelembagaan

Dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian / pengawasan RTRW masing – masing Kabupaten di Kawasan Pantura perlu diatur lebih lanjut ketatalaksananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketatalaksanaan tersebut harus memperhatikan prinsip deregulasi tanpa meninggalkan efektivitas dan keberadaan rencana. Karena ketentuan yang ada dalam rencana tata ruang masih bersifat arahan perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada dilapangan.

Untuk menyesuaikan diperlukan interpretasi arahan rencana secara tepat, maka agar interpretasi tersebut tidak keluar dari sasaran perlu ada pembinaan kemampuan personil yang secara terus menerus dan dapat menjadi bagian dari pembinaan kemampuan dari karier pegawai negeri, yang secara rutin dilaksanakan.

Rencana yang disusun sebagaimana RTRW ini tanpa adanya dukungan hukum, sulit untuk dapat dilaksanakan, sebab aspek ini merupakan pegangan yuridis bagi setiap pelaksanaan kegiatan yang ada dalam rencana umum tata ruang daerah. Aspek legalisasi RTRW ini merupakan landasan penting sebelum RTRW masing – masing Kabupaten di Kawasan Pantura dilaksanakan dan berfungsi sebagai kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Kabupaten. Untuk itu perlu dipertimbangkan kesesuaiannya dengan aspek legal, yaitu peraturan perundangan yang berlaku serta kewenangan kelembagaan yang ada di daerah.

RTRW dari masing – masing kabupaten di Kawasan Pantura yang telah disusun oleh pemerintah daerah (Tim Tata Ruang Daerah) dengan bantuan tenaga ahli telah pula dibahas dan disempurnakan dengan melibatkan instansi vertical dan dinas – dinas otonom yang terkait di daerah serta wakil masyarakat. Pembahasan ini telah pula dilakukan di tingkat pusat melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.

Kehadiran instansi terkait dalam rapat – rapat koordinasi untuk pembahasan dan penyempurnaan konsep RTRW jelas sangat bermanfaat untuk

mencapai kesepakatan dan sinkronisasi RTRW dengan rencana – rencana sektoral yang sudah ada.

Walaupun demikian, manfaat dari RTRW ini tidak dapat dirasakan dan tidak efektif oleh masing – masing daerah sebelum RTRW ini mempunyai ketentuan hukum untuk dilaksanakan, iklim administratif pemerintah yang mendukung (termasuk system informasinya) dan sumber biaya pengelolaanya yang memadai, serta struktur kelembagaan yang terintegrasi dan operasional.

Sehingga terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dan terjadinya perubahan alih fungsi lahan di Kawasan Pantura tetap terjadi.

Adapun lembaga yang mengatur terhadap pengendalian pemanfaatan ruang yang disebut TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah), masih belum berfungsi sebagai mestinya, yaitu dapat mengatur dan mengkoordinasi penataan ruang dari masing – masing daerah.

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang beranggotakan dinas/badan/lembaga propinsi dan kabupaten / kota yang terkait dengan penataan ruang. Tim ini ditetapkan oleh gubernur dalam bentuk surat keputusan. Tugas TKPRD adalah :

1. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan dan pemberian izin pemanfaatan ruang.
2. Melakukan kegiatan penertiban terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Mengumpulkan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan ruang.
4. Mengevaluasi pemanfaatan ruang.

Keterlibatan peran serta masyarakat diharapkan dapat memberikan suatu terobosan atas berbagai hambatan tersebut, selain untuk meningkatkan apresiasi dan wawasan penataan ruang bagi masyarakat luas, terutama terkait dengan mengoptimalkan keberadaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Jawa Barat.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24/1992 tentang Penataan Ruang yang menyatakan, tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan, baik direncanakan maupun tidak. Maksudnya adalah bahwa bentuk ruang yang terjadi

merupakan manifestasi dari hampir seluruh aspek kehidupan, baik fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan.

TKPRD Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120.05/Kep 691-Org/2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat. TKPRD merupakan perwujudan kelembagaan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, yang akan memantau dan mengawasi, serta melaporkan dan mengevaluasi, perkembangan pemanfaatan ruang daerah Jawa Barat.

Pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan salah satu dari tiga aspek penataan ruang, yaitu aspek perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan aspek pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam perwujudannya, aspek pengendalian pemanfaatan ruang memerlukan semangat koordinasi, kerja sama, dan mengutamakan upaya penyelesaian yang dilandaskan atas pandangan atau kepentingan yang lebih luas.

A. Peran Serta Masyarakat Dalam Kelembagaan Perencanaan Tata Ruang

Adanya sentralisasi kekuasaan pada Pemerintah Pusat, pembentukan budaya nasional sebagai pengganti budaya lokal oleh negara, dan juga sentralisasi redistribusi kekayaan/sumberdaya nasional (paradigma lama) telah mengakibatkan banyak hal antara lain pertumbuhan urbanisasi yang cukup tinggi (dari 37,5% pada tahun 1995 menjadi 40,5% pada tahun 1998), dan rendahnya peranserta masyarakat dalam pembangunan. Paradigma baru, pembangunan diarahkan agar sustainable yaitu pembangunan yang melibatkan masyarakat (mendesentralisasi kekuasaan), menghormati budaya lokal (menjamin pluralisme), desentralisasi sumber pendapatan dan penggunaan pendapatan nasional. Prinsip ini sejalan dengan pesan yang termuat dalam UU 22/1999, UU 25/1999, dan hakekat serta prinsip-prinsip penataan ruang.

Melalui penataan ruang pada akhirnya hak seseorang (*property right*) dapat terlindungi tanpa menghambat inovasi dan kreatifitasnya. Oleh sebab itu, penerapan prinsip-prinsip penataan ruang dalam pembangunan wilayah sangat

relevan dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah yang sistematis dan terintegrasi.

Beberapa isu strategi yang patut diperhatikan dalam kaitannya dengan peranserta masyarakat dalam penataan ruang khususnya perencanaan tata ruang adalah:

- a. Kebijakan penyusunan rencana tata ruang (juga pemanfaatan dan pengendalian) yang belum sepenuhnya melibatkan atau berpihak pada masyarakat (rendahnya pemahaman PP 69/1996 tentang peranserta masyarakat dalam penataan ruang).
- b. Kurang terbukanya para pelaku pembangunan dan rendahnya upaya diseminasi informasi dalam proses perencanaan tata ruang.
- c. Belum optimalnya kemitraan antar stakeholder.
- d. Panjangnya birokrasi pengambilan keputusan (kelembagaan perencanaan tata ruang yang belum optimal).

Berdasarkan pengalaman-pengalaman pembangunan yang telah terjadi, rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang telah mengakibatkan dampak negatif sebagai berikut:

- Rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program/proyek pembangunan wilayah yang disusun. Akibatnya telah mengakibatkan keberlanjutan (*sustainability*) dari program/proyek yang dilaksanakan tidak terwujud.
- Munculnya biaya transaksi (*transaction cost*) yang sangat mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dari program/proyek pembangunan sehingga seringkali muncul penolakan atas program/proyek yang dilaksanakan.
- Program/proyek pembangunan wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya.
- Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

B. Konsep Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Seiring dengan demokratisasi yang menjadi tuntutan bersama masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang madani (*civil society*), maka hal ini pun tidak luput berimbas terhadap proses perencanaan tata ruang.

Berdasarkan hal tersebut, guna mewujudkan peran masyarakat yang seutuhnya, proses pelibatan masyarakat tidak boleh berhenti sampai pada tahap yang hanya bersifat konsultasi dan sosialisasi, akan tetapi harus terlihat jelas bahwa aspirasi masyarakat terefleksi dalam proses perencanaan tata ruang. Oleh sebab itu, saluran-saluran aspirasi masyarakat harus diformulasikan secara jelas, sehingga apabila terjadi penyimpangan dilapangan dari proses perencanaan tata ruang, masyarakat dapat melakukan pengawasan dan berpartisipasi aktif.

Pada posisi lain dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah. Konsekuensi dari kondisi tersebut antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya Kabupaten/ Kota yang lebih memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan sinergi dalam perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pembangunan dengan Kabupaten/ Kota lainnya demi sekedar mengejar targetnya dalam lingkupnya masing-masing.

Dalam kaitan dengan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang guna mendukung pembangunan wilayah, maka terdapat beberapa prinsip dasar (konsep) sebagai berikut:

1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku (ujung tombak) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (termasuk dalam penataan ruang).
2. Memfasilitasi masyarakat agar menjadi *pelaku* dalam proses perencanaan tata ruang (Pemerintah sebagai fasilitator dan hormati hak masyarakat, serta kearifan lokal/keberagaman budayanya).
3. Mendorong agar stakeholder mampu bertindak secara transparan, akuntabel, dan professional dalam proses penataan ruang (terutama dalam perencanaan tata ruang).
4. Mendorong perkuatan kelembagaan yang mewadahi berbagai aspirasi dari berbagai stakeholder.

Prinsip-prinsip dasar tersebut dimaksudkan agar masyarakat sebagai pihak yang paling terkena akibat dari penataan ruang harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi yang sering tidak difahaminya.

C. Kendala Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang

Beberapa hal pokok yang merupakan kendala utama peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang adalah:

- a. Rendahnya pendidikan, pemahaman, kesadaran implementatif, konsistensi, dan komitmen di kalangan masyarakat akan peran yang seharusnya dapat dilakukan.
- b. Kebijakan Pemerintah yang ada belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat (hal ini tercermin dari rendahnya alokasi budget dan pelibatan masyarakat) dan sebagian besar peraturan masih berbasis paradigma lama (tidak menjadikan masyarakat sebagai pelaku).
- c. Belum berjalannya sistem kelembagaan perencanaan tata ruang dengan baik.

Berdasarkan kendala-kendala diatas, upaya keras untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang sesungguhnya harus terus diupayakan. Upaya-upaya tersebut tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Pemerintah. Mengingat hal tersebut, kerjasama atau kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (ornop), tokoh masyarakat, dewan perwakilan rakyat daerah, pers, dan pihak-pihak terkait lainnya harus terus diupayakan.

D. Upaya Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mendorong masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan tata ruang antara lain melalui pertemuan dengan warga, maupun berbagai kegiatan yang melibatkan forum–forum warga, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, DPR/DPRD dan pelaku pembangunan lainnya termasuk organisasi non Pemerintah. Sebagai gambaran dari sebagian potret dan upaya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan penataan ruang yang telah dilakukan adalah:

- a. Mendorong proses penyusunan kebijakan agar berpihak pada masyarakat.
- b. Melakukan berbagai konsultasi publik atas produk perencanaan tata ruang dalam berbagai level dan kesempatan kepada stakeholder seperti DPR/DPRD, LSM/Ormasy, Pemda, dan Pers.

- c. Mendorong public awarness melalui pendidikan/kampanye publik seperti dialog publik di TV dan radio, iklan layanan masyarakat di TV dan radio, dan tulisan di berbagai media massa.
- d. Meningkatkan public services (pelayanan peta dan Simtaru).
- e. Mendorong eksistensi dan efektifitas operasionalisasi kelembagaan penataan ruang seperti BKTRN, TKPRD, Org. Pokmasy.

Selain upaya diatas, sistem kelembagaan yang berperan dalam mengkoordinasi dan mengelola keberlanjutan dari perencanaan tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan harus dapat berjalan dengan baik dan kuat. Sistem kelembagaan perencanaan tata ruang tingkat Nasional dikoordinasikan oleh BKTRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional), sedangkan pada tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh TKPRD Propinsi (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dan pada tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh TKPRD Kabupaten/Kota. Pada tingkat *grass root* peran tersebut ditangani oleh LSM atau Forum Warga. Menteri terkait yang berada dalam wadah BKTRN dan Kepala Daerah yang dibantu oleh Bappeda dan TKPRD dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan tata ruang berperan dalam level dan tanggung jawab masing-masing untuk :

- a. Mengkoordinasikan proses sosialisasi dan adaptasi produk rencana tata ruang kepada warga masyarakat pada daerah peruntukan;
- b. Menerima dan memperhatikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan yang disampaikan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang;
- c. Menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan yang sesuai dengan asas perencanaan tata ruang untuk dijadikan pertimbangan dalam proses perencanaan tata ruang;
- d. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dalam perencanaan tata ruang dengan menegakkan ketentuan yang berlaku.